

ILMU SOSIAL DASAR: KONSEP DAN TEORI

Dena Mustika, Sari Sri Handani, Yunita Haryani,
Yeni Handayani, Liza Dwi Eftiza Khairunniza,
Hulipa, Noor Fahmi Pramuji, Barni,
Anastazia N Wattimena, Hermawan Setiawan

ILMU SOSIAL DASAR: KONSEP DAN TEORI

**Dena Mustika
Sari Sri Handani
Yunita Haryani
Yeni Handayani
Liza Dwi Eftiza Khairunniza
Hulipa
Noor Fahmi Pramuji
Barni
Anastazia N Wattimena
Hermawan Setiawan**



GET PRESS INDONESIA

ILMU SOSIAL DASAR: KONSEP DAN TEORI

Penulis :

Dena Mustika
Sari Sri Handani
Yunita Haryani
Yeni Handayani
Liza Dwi Eftiza Khairunniza
Hulipa
Noor Fahmi Pramuji
Barni
Anastazia N Wattimena
Hermawan Setiawan

ISBN : 978-634-255-669-6

Editor : Mila Sari., S.ST.,M.Si

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ilmu Sosial Dasar: Konsep Dan Teori ini.

Buku Ini Membahas : Konsep Dasar Dan Sejarah Ilmu Social, Paradigma Ilmu Sosial (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial), Konsep Masyarakat Dan Budaya (unsur-unsur Yang Membentuk Masyarakat), Sistem Sosial, Pelapisan Sosial, Interaksi Sosial, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat, Gender Dan Ketidaksetaraan, Isu-isu Lingkungan, Organisasi Sosial, Masalah Pedesaan Dan Perkotaan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 KONSEP DASAR DAN SEJARAH ILMU SOSIAL ..	1
1.1 Filsafat Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural	
Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-ilmu Sosial	5
1.2 Ilmu-ilmu Sosial	16
1.3 Perkembangan Ilmu Sosial	20
DAFTAR PUSTAKA	28
BAB 2 PARADIGMA ILMU SOSIAL (FAKTA SOSIAL, DEFINISI SOSIAL, DAN PERILAKU SOSIAL)	29
2.1 Fakta Sosial.....	30
2.1.1 Definisi dan Sejarah Perkembangan.....	30
2.1.2 Konsep-Konsep Utama Durkheim	31
2.1.3 Karakteristik Fakta Sosial.....	33
2.1.4 Metode Penelitian Paradigma Fakta Sosial	33
2.1.5 Kritik terhadap Paradigma Fakta Sosial.....	34
2.2 Paradigma Definisi Sosial	34
2.2.1 Definisi dan Landasan Filosofis	34
2.2.2 Konsep-Konsep Utama Weber	35
2.2.3 Interaksionisme Simbolik.....	36
2.2.4 Fenomenologi Sosial	37
2.2.5 Penerapan di Era Media Sosial.....	37
2.2.6 Kritik terhadap Paradigma Definisi Sosial	37
2.3 Paradigma Perilaku Sosial	38
2.3.1 Definisi dan Akar Historis	38
2.3.2 Konsep-Konsep Utama.....	39
2.3.3 Penerapan dalam Masyarakat Modern dan Digital.....	39
2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Paradigma Perilaku Sosial	40
2.4 Perbandingan Ketiga Paradigma	41
2.5 Relevansi Paradigma Ilmu Sosial Di Era Digital	43
2.5.1 Transformasi Sosial Digital di Indonesia	43

2.5.2 Relevansi Paradigma Fakta Sosial di Era Digital	43
2.5.3 Relevansi Paradigma Definisi Sosial di Era Digital	43
2.5.4 Relevansi Paradigma Perilaku Sosial di Era Digital	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 3 KONSEP MASYARAKAT DAN BUDAYA.....	47
3.1 Unsur-unsur yang Membentuk Masyarakat	48
3.2 Sistem Sosial	50
DAFTAR PUSTAKA.....	59
BAB 4 PELAPISAN SOCIAL.....	61
4.1 Pentingnya Permasalahan	62
4.2 Metode Pemecahan Masalah.....	63
4.3 Definisi Pelapisan Sosial.....	67
4.4 Jenis-Jenis Pelapisan Sosial.....	68
4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelapisan Sosial.....	68
4.6 Dampak Pelapisan Sosial	69
4.7 Strategi untuk Mengatasi Pelapisan Sosial.....	70
4.8 Kesimpulan	78
4.9 Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BAB 5 INTERAKSI SOSIAL	81
5.1 Definisi Interaksi Sosial	81
5.2 Syarat Terjadinya Interaksi Sosial.....	82
5.2.1 Kontak Sosial Langsung	83
5.2.2 Kontak Sosial Tidak Langsung	83
5.2.3 Komunikasi Verbal	83
5.2.4 Komunikasi Non-Verbal	84
5.3 Jenis dan Bentuk Interaksi Sosial.....	84
5.4 Teori Interaksi Sosial	85
5.4.1 Teori Pertukaran Sosial	85
5.4.2 Teori Interaksi Simbolik.....	86
5.4.3 Teori Dramaturgi	87
5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial.....	88
5.5.1 Nilai dan Norma Sosial	89
5.5.2 Status dan Peran Sosial	90

5.5.3 Sosialisasi	91
5.6 Transformasi Interaksi Sosial dalam Era Digital	93
5.6.1 Komunikasi Virtual	93
5.6.2 Hubungan Interpersonal	94
5.6.3 Dampaknya terhadap Norma-Norma Sosial.....	95
5.6.4 Perubahan dalam Pola Interaksi Sosial	96
DAFTAR PUSTAKA	97
BAB 6 PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT ...	99
6.1 Dialektika Teori dan Akar Pemicu Dinamika Sosial ...	100
6.2 Disrupsi Digital Dan Transformasi Struktur	
Masyarakat Kontemporer	103
6.2.1 Ruang Siber sebagai Arena Baru Interaksi Sosial	104
6.2.2 Ekonomi Digital dan Pergeseran Stratifikasi Ekonomi.....	105
6.2.3 Tantangan Identitas dan Privasi di Dunia Tanpa Batas.....	105
6.3 Dampak Dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Sosial	107
6.3.1 Dampak Perubahan pada Lembaga Kemasyarakatan	108
6.3.2 Tantangan Disorganisasi dan Jalan Menuju Reorganisasi Sosial	109
6.3.3 Resiliensi Komunitas dan Adaptasi Berkelanjutan.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
BAB 7 GENDER DAN KETIDAKSETARAAN.....	113
7.1 Konstruksi Sosial Gender	115
7.1.1 Definisi Konseptual Gender	116
7.1.2 Gender dan Identitas.....	117
7.2 Ketidaksetaraan Gender Struktural	118
7.2.1 Hierarki Struktural Gender	119
7.2.2 Dominasi Patriarki	120
7.3 Perspektif Teoretis Gender.....	120
7.3.1 Teori Feminis.....	121
7.4 Dampak Ketidaksetaraan Sosial.....	124
7.4.1 Marjinalisasi Kelompok Rentan.....	125

7.4.2 Ketimpangan Akses Sumberdaya.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 8 ISU-ISU LINGKUNGAN.....	143
8.1 Hubungan Manusia dan Lingkungan.....	144
8.1.1 Komponen Dasar Ekosistem.....	144
8.1.2 Konsep Timbal Balik Manusia dan Lingkungan ..	147
8.2 Pandangan Budaya tentang Alam	149
8.3 Isu lingkungan dalam Perspektif Sosial Budaya	155
8.4 Isu-Isu Lingkungan Global dan Nasional	160
DAFTAR PUSTAKA.....	166
BAB 9 ORGANISASI SOSIAL.....	169
9.1 Definisi Organisasi	169
9.2 Organisasi Sosial	171
9.3 Latar Belakang Pendirian Organisasi Sosial	173
9.4 Tujuan Organisasi Sosial	173
9.5 Jenis Organisasi Sosial.....	174
9.6 Peran Organisasi Sosial Lokal.....	176
9.7 Hambatan Organisasi Sosial	177
9.8 Kesimpulan	178
DAFTAR PUSTAKA.....	179
BAB 10 MASALAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN	181
10.1 Masalah Pedesaan.....	181
10.1.1 Kemiskinan Pedesaan	181
10.1.2 Keterbatasan Infrastruktur	183
10.1.3 Urbanisasi Anak Muda	186
10.1.4 Tingkat Pendidikan	186
10.1.5 Degradasi Lingkungan	187
10.2 Masalah Perkotaan	188
10.2.1 Penduduk dan Urbanisasi	188
10.2.2 Pemukiman Kumuh.....	190
10.2.3 Pengangguran dan Kriminalitas.....	191
10.2.4 Masalah Lingkungan Kota.....	193
10.2.5 Disorganisasi dan Individualisme.....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	197
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Konsep Utama Emile Durkheim dalam Paradigma Fakta Sosial.....	32
Tabel 2.2. Tipologi Tindakan Sosial menurut Max Weber	36
Tabel 2.3. Perbandingan Komprehensif Tiga Paradigma Ilmu Sosial.....	41
Tabel 3.1. Fungsi Lembaga Sosial	52
Tabel 3.2. Unsur-unsur Sistem Sosial	54
Tabel 6.1. Faktor Dinamika Sosial.....	103
Tabel 6.2. Transformasi Masyarakat Digital	107
Tabel 6.3. Dampak dan Respons Sosial.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ilmu Pendukung PIPS	14
Gambar 2.1. Hubungan Paradigma Ilmu Sosial dan Realitas Sosial	30
Gambar 2.2. Struktur Masyarakat Menurut Paradigma Fakta Sosial	34
Gambar 2.3. Proses Pembentukan Makna Sosial (Paradigma Definisi Sosial)	38
Gambar 2.4. Diagram Stimulus-Respons dalam Paradigma Perilaku Sosial	40
Gambar 2.5. Transformasi Sosial Digital dan Relevansi Paradigma Ilmu Sosial	44

BAB 1

KONSEP DASAR DAN SEJARAH ILMU SOSIAL

Seorang Sosiolog Jerman bernama Ralf Dahrendorf mengembangkan Teori Konflik Non- Marxis, beliau menyatakan bahwa “ilmu sosial” ialah upaya ambisius untuk mencirikan sekelompok bidang akademis yang berfokus pada aspek- aspek masyarakat. Ilmu sosial tersebut mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah termasuk humaniora (Dahrendorf, 2000: 999).

Dalam Dadang Supardan (2007:30), kalangan akademis di Inggris tidak sekadar mengkaji “ilmu sosial”. Mereka menafsirkan begitu luas yaitu seperti *Sciences Sociale* dan *Sozialwissenschaften*. Ilmu sosial yang dimaksud kerap disebut teori sosial sintetis yang termasuk kepada disiplin ilmu sosiologi.

Hanya sedikit orang yang mendukung menerima konsep ilmu sosial. Sebagaimana ilmu- ilmu alam berkembang dari filsafat alam, ilmu sosial juga muncul dari filsafat moral. Meskipun ekonomi politik bukanlah ilmu sosial, tetapi senantiasa disertai dengan penelitian tentang tema- tema sosial yang lebih universal di kalangan filsuf Skotlandia. Filsafat moral tidak lebih unggul dari positivisme pada awal abad ke- 19, khususnya di Perancis. Fokus positivisme, menurut August Comte, ialah pada hal- hal yang bersifat faktual serta bukan pada hal spekulatif, pada hal yang berfungsi daripada pada hal yang tak berfungsi, pada kepastian daripada pada keraguan, pada kebenaran daripada pada ketidakjelasan, serta pada hal positif daripada pada hal negatif maupun kritis. Dengan demikian, positivisme telah menjadi ilmu dalam penafsiran materialisme sejak abad ke- 19. Supremasi disiplin sintetis atas konstruksi sains kemudian digambarkan oleh Comte sebagai sains ilmiah, istilah yang

diungkapkan pula oleh Charles Fourier(1808). Metodologi ilmu sosial identik dengan metodologi ilmu alam. Gambaran metodologis ilmu-ilmu sosial agak dikaburkan oleh penggunaan metodologi ilmu sosial Comte.

Vilfredo Pareto (1916) dan Emile Durkheim (1895), yang meneruskan dan memperluas kajian ilmu sosial. Perbedaannya adalah bahwa Pareto mengilhami teori-teori spesifik dan pemikiran metaforis, namun Durkheim tertarik untuk mempelajari realitas sosial. Sedangkan, Wilhelm Diltthey (1911) dan Max Weber (1921) melakukan upaya lain dengan menggunakan strategi beda melalui Verstehen, pendekatan empatik, serta kesadaran akan apa yang disebut perspektif hermeneutik atau fenomenologis.

Karl Popper mencoba hal serupa dalam bukunya *The Logic of Scientific Discovery*. Meskipun teori ini sebenarnya dapat menghambat kemajuan ilmu sosial jika direkomendasikan, Popper (1959) menyoroti bahwasannya ada logika kemajuan melalui falsifikasi, dimana kita mengajukan hipotesis serta kemajuan dicapai dengan menolak hipotesis yang sudah diterima dari penelitian. Popper menawarkan panduan yang berguna bagi para sarjana ilmu sosial, namun hal ini ditolak. Karena 99% ilmu sosial tidak hanya sebatas kemajuan hipotetis-deduktif. Hal ini dapat diterima karena dalam penelitian ilmu sosial, hukum yang obyektif serta berlaku universal harus dipertanyakan atau dibedah karena berkaitan dengan ruang dan waktu.

Sementara itu, Talcot Parsons terfokus pada ilmu sosial dan konten teoretis, upaya tersebut sangat ambisius dan gigih. Parsons mengemukakan bahwa tindakan sosial merupakan inti ilmu sosial melalui berbagai analisis dan abstraksi. Lebih jauh lagi, sistem sosial menjadi landasan bagi seluruh perwujudan tindakan sosial. Sistem ekonomi, politik, budaya, dan integratif adalah empat subsistem yang membentuk sistem sosial. Maka, bidang ekonomi, politik, kajian budaya, serta sosiologi merupakan integrasi sosial yang saling mempunyai hubungan serta saling bergantung. Dalam suatu sistem sosial setiap subsistem perlu dianalisis dengan cara yang sama. Evolusi ilmu-

ilmu sosial tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pernyataan Parsons.

Hal lainnya ini diabaikan oleh beberapa ekonom. Salah satu kelemahan mendasarnya adalah meskipun masyarakat bisa diamati dari sudut pandang luas. Ilmu sosial dengan ciri-cirinya yang banyak dan rumit dan terdapat dinamika sosial di dalamnya. Pendapat yang agak berbeda mengenai ilmu-ilmu sosial lainnya diungkapkan Immanuel Wallerstein. Profesor sosiologi terkemuka serta direktur Pusat Studi Ekonomi, Sistem Sejarah dan Peradaban Fernand Braudel di Universitas Negeri New York di Birmingham ini memandang bahwa ilmu sosial tak sepesimis Ralf Dahrendorf, tetapi ia tetap kritis atas pandangan yang menyorot bahwa ilmu sosial ke dalam nomotesis ideografis. Oleh karena itu, pendekatannya untuk bersifat preventif agar tidak terjerumus ke dalam perubahan yang ekstrem. Hal ini bisa dipahami dari pernyataannya berikut:

1. Makna kognitif epistemologis nomotetik serta ideosinkratik tetap bertahan meski pada akhirnya akan hilang. Beliau tidak menegaskan bahwa cara yang memuaskan untuk mengatasi dikotomi ideosinkronis nomotetik telah ditemukan.
2. Tujuannya adalah mencari cara untuk memasukkan beragam pandangan dunia pada ilmu sosial tanpa kehilangan gagasan untuk menemukan dan mewujudkan serangkaian nilai yang mungkin sebenarnya sama atau pada akhirnya menjadi sama bagi seluruh umat manusia. Terbukti dari komentarnya bahwa Wallerstein tidak sepenuhnya menolak sudut pandang nomotetis.
3. Struktur disiplin ilmu sosial sesuai perkembangan zaman. Situasi pada saat ini adalah situasi dimana struktur-struktur yang saling berkompetisi untuk bertahan hidup.

Wallerstein tidak memberikan saran yang dapat digunakan sebagai strategi ideografis atau nomotetik (ideosinkratik). Sebaliknya, dia mendukung lebih banyak komunikasi antara kedua metode tersebut. Pencarian hukum-hukum nomotetis atau universal tentang alam yang berlaku di semua ruang dan waktu merupakan definisi umum dari ilmu-

ilmu alam (sains). Intuk ilmu sosial, Wallerstein berfokus pada perilaku sosial, yang merupakan perolehan deduksi atas pengalaman hidup manusia yang kaya di masa lalu dan menekankan lebih dari sekedar kebijaksanaan yang diwariskan.

Ilmu sosial berupaya untuk menemukan kebenaran melalui kebijaksanaan. Tujuan ilmu sosial adalah menyelidiki realitas kontemporer. Fondasinya terletak pada inisiatif yang telah berkembang sejak abad keenam belas serta bagian dari industri konstruksi dunia saat ini. Yang mempunyai tujuan adalah agar secara metodis menciptakan pengetahuan sekuler yang dapat diverifikasi secara empiris tentang realitas. Keberadaan persamaan pada ilmu sosial dalam aspek aksiologis yakni, kebijaksanaan yang terus digunakan sejak zaman dahulu guna memajukan tujuan pengetahuan manusia dan didukung secara eksperimental. Hal ini dianggap paling signifikan oleh Wallerstein. Terlepas dari apakah itu ideografik partikularistik, nomotetik generalis, atau mungkin campuran keduanya, ia benar-benar mendorong lebih banyak komunikasi antara kedua aliran pemikiran tersebut. Salah satu tokoh the founding fathers, Bung Hatta juga mempunyai pandangan serupa bahwa ilmu sosial, seperti disiplin ilmu lainnya, adalah suatu ragam yang memiliki tiga sisi (Abdullah, 2006: 6-26). Ilmu sosial sebagai ilmu pengetahuan terapan, sebagai upaya akademis, dan sebagai wacana kritis.

Pertama, sebagai percakapan kritis. Legitimasi diskusi penelitian tentang apa yang bergantung pada validitas persyaratan sistem rasionalitas kritis dan tradisi ilmiah yang relevan. Minat terhadap semua standar akademik menentukan nilai studi. Hasilnya, bidang ini dapat melihat tingkat perpaduan teoritis dan metodologis yang tinggi, seperti halnya ketika mempelajari sejumlah pertanyaan dasar, termasuk apa, bagaimana, dan mengapa.

Kedua, selaku upaya ilmiah. Pahami bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Ilmu sosial digambarkan oleh Taufik Abdullah sebagai sebuah ideologi, selaku sistematisasi metodis atas serangkaian nilai, serta sebagai filsafat selaku cara hidup yang benar-benar sarat akan nilai.

Ketiga, karena ilmu sosial merupakan ilmu terapan, maka diperlukan perolehan atau pencapaian hal-hal yang berguna dan praktis guna meminimalkan atau menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemiskinan, atau mewujudkan hal-hal yang diinginkan, seperti kesejahteraan umat manusia.

Sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, sejarah, psikologi, hukum, serta ilmu politik termasuk bidang keilmuan yang Wallerstein klasifikasikan sebagai ilmu sosial. Menurut Wallerstein, proses pelebagaan abad ke-19 terjadi di lima pusat utama aktivitas ilmu sosial, seperti di Inggris, Prancis, Jerman, Italia, serta Amerika Serikat. Hal ini sama pentingnya dalam sejarah ilmu sosial seperti di Yunani kuno dan Roma.

1.1 Filsafat Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-ilmu Sosial

Menurut Numan Somantri (2001: 95), Pendidikan IPS didasarkan pada beberapa disiplin ilmu sosial, humaniora, disiplin pendidikan, aktivitas dasar manusia dalam masyarakat, serta tujuan pendidikan nasional, yang semuanya harus dipikirkan dan dikembangkan secara integratif. Pendidikan IPS harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kebenaran yang dicari dalam pendidikan IPS adalah kebenaran yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan serta bercirikan budaya Indonesia dengan konsep hakikat Pancasila, ilmu intraseptif, serta ilmu ektraseptif, maka kita dapat mengkaji ideologi atau aliran filsafat ilmu dan filsafat. Filsafat ilmu merupakan bingkai dari kajian pendidikan IPS. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor merupakan kompetensi yang harus dikaji dalam filsafat ilmu.

Dalam konten maupun metodologi, pendidikan IPS dan bidang keilmuan lainnya memiliki hubungan struktural fungsional yang kuat. Ilmuwan sosial menyarankan para pendidik untuk memilih konten mereka dari struktur disiplin ilmu yang terorganisir secara metodis, agar konten bersifat komprehensif dalam bentuk generalisasi teoritis, untuk berpikir dan meneliti dengan cara yang konsisten dengan ilmuwan sosial, dan untuk memungkinkan pendekatan lintas sektoral dan

transstruktural. Pada kurikulum IPS kita tidak akan terlepas dari generalisasi dan penelitian melalui proses berpikir yang telah dipaparkan oleh para ilmuwan sosial.

Saat kita mempelajari filsafat kita akan bertindak sebagai ilmuwan maupun guru di masa depan. Sebab kajian terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis akan melihat banyak sisi subjektifitas secara meluas, mendalam, dan menyeluruh dalam upaya menemukan kebenaran dan signifikansi. Dalam Rochiati Wiriaatmadja (2015: 1), pencarian kebermaknaan dan kebenaran pada mahasiswa membawa pada kegiatan berpikir yang tidak terbatas kepada pencapaian pengetahuan dan pemahaman saja, melainkan dengan berfikir analitik dan sintetik melalui renungan atau refleksi diharapkan terjadi peraihian wisdom atau kearifan.

Filsafat ilmu bagi mahasiswa Pendidikan IPS akan memperluas pemikiran setiap individu dan akan memberikan pemahaman, kebermaknaan, dan kebenaran dalam mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan yang begitu kompleks di dalam aspek kependidikannya. Pendidikan IPS yang dimaksud adalah mencakup apa yang disebut dengan Pendidikan IPS Studi Sosial (*Social Science Education*) maupun yang mengacu pada Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (*Social Science Education*).

Adapun definisi *Social Studies Education* menurut NCSS (1994) yakni:

"Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines such as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people to develop the ability to make informed and reasoned decision for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world".

Sedangkan Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, definisinya serta perbedaannya dengan studi sosial menurut Frrasser and West dalam Numan Somantri (2001: 73), yaitu:

"The social science are systematically organized, scholarly bodies of knowledge that have built up through intellectual inquiry abd planned research. The social studies on the other hand, consists of materials selected from the social sciences abd organized for instruction of children and youth, The distinction is between systematically structured bodies if contenct and psycologically structured selectiob of instructional content".

Ketika peserta didik memulai studinya, filsafat ilmu akan dijadikan sebagai bingkai, kerangka, maupun pedoman. Misalnya, jika peserta didik mengkaji permasalahan diperlukan perspektif filosofis, diantaranya: 1) perubahan sosial dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri; 2) dampak kemajuan ilmu dan teknologi; 3) pengaruh masuknya modernisasi dan globalisasi; 4) kemajemukan dan pendidikan multikultural; 5) pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan anak dan anak jalanan; 6) kecenderungan menurunnya kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda; 7) kecenderungan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme pada generasi muda, dan lain sebagainya.

Untuk menjelaskan hal tersebut harus berawal dari kemampuan berpikir kritis. Hal ini sangat diperlukan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan masyarakat, khususnya untuk mengkaji secara filosofis. Otak adalah pusat proses berpikir manusia. Ketika informasi masuk ke otak, proses berpikir dimulai. Informasi yang masuk ke dalam sistem berfungsi sebagai pemicu untuk mulai berpikir. Misalnya, Anda mungkin mendengar di TV saat bangun di pagi hari bahwa cuaca akan memburuk di siang hari dan akan turun hujan. Padahal Anda haruspergi kuliah. Berdasarkan temuan analisis, Anda memilih untuk membawa payung untuk melindungi diri dari hujan dan hambatan lainnya.

Pendidikan IPS memberikan kontribusi yang penting terhadap tiga tugas pendidikan konvensional yang sering dijadikan landasan dalam lembaga pendidikan di sekolah, yaitu

bijak dalam kewarganegaraan, pengembangan moral dan karakter, dan literasi. Untuk mempersiapkan warga negara yang dapat mengolah informasi, kemampuan aktualisasi diri yang baik, dan sikap yang memungkinkan setiap orang berkembang secara pribadi agar dapat hidup baik dengan orang lain dan berhubungan dengan masyarakat.

IPS dan PIPS merupakan dua istilah yang sering diucapkan atau dituliskan dalam berbagai karya akademis secara tumpang tindih. Kesalahan dalam berbicara atau menulis tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pembicara atau penulis, melainkan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi. Faktor lain yang mungkin adalah kurangnya forum akademis yang membahas dan memopulerkan istilah atau nomenklatur yang disepakati oleh civitas akademika.

Istilah IPS di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan civitas akademika dan telah digunakan secara formal dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum, istilah ini diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam perkembangannya, muncul berbagai pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik seperti pendekatan yang berpusat pada peserta didik, pendekatan terpadu, pendekatan berbasis masalah sosial, pendekatan lapangan luas, dan sebagainya. Dalam literatur asing, istilah yang umum digunakan meliputi: studi sosial, pendidikan sosial, pendidikan studi sosial, pendidikan ilmu sosial, pendidikan kewarganegaraan, studi tentang masyarakat dan lingkungan.

Istilah IPS yang berlaku di Australia (Victoria) berbeda dengan negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat. IPS di Australia secara eksplisit mencakup istilah lingkungan yang mengacu pada sistem lingkungan alam dan manusia serta bagaimana sistem ini berinteraksi dalam komunitas yang beragam. Buku Saxe (1991) yang berjudul *Social Studies in Schools: A History of The Early Years*, awalnya terdapat dalam makalah National Herbert Society tahun 1896-1897, yang

menegaskan bahwa IPS merupakan upaya untuk membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan pedagogis.

Pada tahun 1921, didirikan *National Council for The Social Studies* (NCSS), sebuah organisasi profesi yang secara khusus membina dan mengembangkan IPS. Pada pertemuan pertama tahun 1935, dikeluarkan kesepakatan NCSS yang menegaskan bahwa ilmu-ilmu sosial merupakan inti dari kurikulum. Dari beberapa definisi, NCSS merupakan yang paling lengkap dan menjadi rujukan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Adapun Pengertian IPS dalam Konteks Indonesia yaitu PIPS tidak dapat dilepaskan dari dokumen tahun 1975 dan mengadopsi serta mengadaptasi dari NCSS bahkan mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum sekolah. Menurut Prof. Nu'man Somantri, Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang disusun dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001: 92).

Standar kurikulum nasional awalnya dirilis oleh NCSS pada tahun 1994. Sejak itu, guru, sekolah, distrik, dan negara lain telah menggunakan standar IPS sebagai kerangka kerja untuk pengembangan dan penyelarasan kurikulum. Sejak diterbitkannya standar kurikulum tersebut, banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk menawarkan kerangka pengajaran, pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran IPS yang mengartikulasikan tujuan kurikulum dengan lebih jelas dan menunjukkan koherensi yang lebih besar. Hal ini menggabungkan temuan terbaru dengan rekomendasi perbaikan dari berbagai pengalaman pembelajaran.

Meskipun dokumen tersebut telah diperbarui dan diubah, dokumen tersebut masih mempertahankan struktur yang sama seputar tema-tema dasar pendidikan IPS, karena pendekatan asli yang digunakan dalam standar kurikulum ini disambut baik, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Dokumen kurikulum berisi kerangka kerja mendorong lebih dari sekedar penyebaran pengetahuan dan menggunakan metode pengajaran yang

relevan. Fokus utama dokumen asli tersebut yaitu mendorong siswa agar mengambil peranan aktif pada pembelajaran.

Dengan membekali peserta didik dengan informasi, proses berpikir, dan sikap demokratis yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan partisipatif. IPS juga bertujuan untuk menumbuhkan kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan sangat penting dalam ilmu-ilmu sosial dibandingkan mata pelajaran akademis lainnya. Meskipun kompetensi ini bukan merupakan kewajiban eksklusif ilmu-ilmu sosial dan bukan merupakan domain eksklusifnya. NCSS telah lama mengakui pentingnya mendidik peserta didik untuk memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi, menjadikan kompetensi civic sebagai prioritas utama. Dedikasi terhadap prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan landasan kompetensi civic yang memerlukan adaptasi dalam masyarakat lingkup nasional maupun global. Dibutuhkan pula prosedur dalam investigasi fenomena sosial dan pengumpulan serta analisis data, bekerja secara tim, pengambilan keputusan, dan kemampuan pemecahan masalah.

Untuk melestarikan dan memajukan cara hidup yang demokratis kita membutuhkan generasi muda yang berpengetahuan, berbakat, dan berdedikasi pada demokrasi. Semua peserta didik harus diikutsertakan dalam IPS karena misi kewarganegaraannya, yang membahas keragaman budaya, bahasa, dan pembelajaran, termasuk persamaan dan perbedaan berdasarkan ras, etnis, bahasa, agama, gender, orientasi seksual, kebutuhan masyarakat, dan hal-hal penting lainnya. Terutama dalam karakteristik dan pribadi peserta didik. Tujuan masyarakat demokrasi yaitu menerima konsep pluralitas dan menjadikan ruang kelas IPS sebagai laboratorium demokrasi yang diwujudkan melalui keberagaman peserta didiknya.

Pemahaman menyeluruh terhadap isu-isu sosial, termasuk konsep migrasi, tantangan ekonomi, dan kebijakan luar negeri, memerlukan pendekatan multidisiplin pada masyarakat yang demokratis. Ilmu-ilmu sosial mengintegrasikan disiplin ilmu dalam berbagai cara. Topik-topik penting ini dapat dibahas dalam satu mata pelajaran yang menggabungkan dua atau lebih

bidang akademik. Namun dapat pula diajarkan di kelas yang berbeda berdasarkan disiplin ilmu yang berbeda (misalnya geografi atau sejarah). Kriteria ini sangat penting. Terlepas dari gaya organisasi atau pendidikannya (misalnya, pendekatan berbasis disiplin, pendekatan yang berpusat pada isu yang kontroversial, pendekatan pemecahan masalah, atau beberapa pendekatan campuran).

Tujuan Standar Kurikulum Nasional dalam NCSS menawarkan kerangka kerja untuk perencanaan profesional dan diskusi seputar apa yang harus dilakukan di kelas pada pembelajaran IPS. Sepuluh topik yang mencerminkan metode penataan pengetahuan tentang pengalaman manusia di dunia ditawarkan dalam kerangka ini. Harapan pembelajaran awal, menengah, dan tinggi menguraikan tujuan, keterampilan, serta proses berpikir yang perlu diperlihatkan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas selaku perolehan atas program pembelajaran IPS. Standar kurikulum ini menawarkan perspektif komprehensif untuk mengkaji standar standar topik terkait ilmu yang dipelajari dan dan desain kurikulum lainnya. NCSS menawarkan struktur yang diperlukan oleh warga negara global untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjadi warga negara demokratis.

Adapun sepuluh tema kajian untuk program studi sosial, yakni:

1. Budaya,
2. Waktu, kontinuitas, dan perubahan
3. Manusia, tempat, dan lingkungan,
4. Pengembangan dan identitas individu,
5. Individu, kelompok, dan lembaga,
6. Kekuasaan, otoritas, dan tata kelola,
7. Produksi, distribusi, dan konsumsi,
8. Sains, teknologi, dan masyarakat,
9. Koneksi global,
10. Cita-cita dan praktik kewarganegaraan.

Tema tersebut harus diimplementasikan melalui program studi sosial. Demikian pula, keterampilan dan pengetahuan geografis secara tematik diambil dari semua disiplin ilmu sosial

dan disiplin ilmu dan bidang studi terkait lainnya untuk menyediakan kerangka kerja pada desain dan pengembangan kurikulum ilmu sosial. Tema-tema tersebut memberikan dasar dimana pendidik ilmu sosial dapat mengembangkan program mereka secara lebih lengkap dengan rincian standar konten nasional yang dikembangkan pada ilmu sejarah, geografi, kewarganegaraan, ekonomi, psikologi, dan bidang lainnya, serta standar konten yang dikembangkan oleh setiap negara. Dengan demikian, standar kurikulum NCSS berfungsi sebagai dasar pengorganisasian untuk setiap program IPS. Standar konten untuk disiplin ilmu, serta standar lainnya, seperti untuk teknologi instruksional, memberikan detail tambahan untuk desain dan pengembangan kurikulum.

Pembelajaran diharapkan memberikan ilustrasi tentang apa yang dipelajari peserta didik di setiap tingkatnya dalam kurikulum ilmu sosial. Pada menyajikan pertanyaan kunci untuk mengeksplorasi terkait materi pada setiap tema. Kurikulum juga harus memberikan ilustrasi tentang jenis tujuan, pengetahuan, serta proses intelektual yang perlu ditujukan kepada siswa guna mengembangkan kompetensi. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan mengapa penting untuk mempelajari setiap tema. Peserta didik membangun pengetahuan pada saat mereka belajar untuk mengintegrasikan informasi baru ke dalam konstruksi kognitif yang ada, dan terlibat dalam proses yang mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir, bernalar, melakukan penelitian, dan mencapai pemahaman saat mereka menghadapi konsep, prinsip, dan masalah baru.

Selain itu, pada keterampilan praktik memberi pendidik gambaran tentang bagaimana standar pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran di kelas. Biasanya dengan mengilustrasikan tema tertentu. Misalnya, pelajaran yang berfokus pada Tema Waktu, Kontinuitas, dan Perubahan spesifiknya dalam ilmu sejarah dunia yang berhubungan dengan peradaban lembah sungai pasti akan melibatkan tema lain pula yaitu Manusia, Tempat, dan Lingkungan pada ilmu Geografi. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk praktik, menekankan

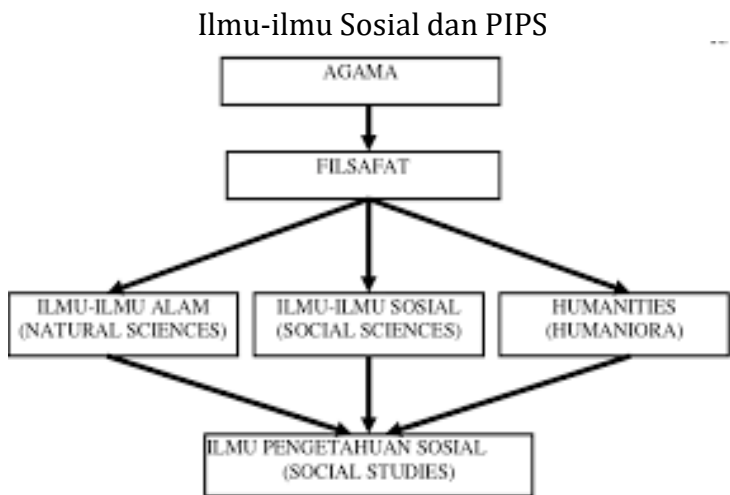
keterampilan dan strategi, dan memberikan, serta evaluasi yang komprehensif.

Standar kurikulum NCSS menawarkan kepada para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan suatu kerangka konseptual untuk desain dan pengembangan kurikulum serta persiapan warga negara yang terinformasi dan terdidik. Standar tersebut merupakan kerangka kerja profesional dan perencanaan kurikulum untuk pembelajaran studi sosial. NCSS membahas pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Sementara itu, standar konten berbasis disiplin ilmu berfungsi sebagai panduan untuk konten tertentu yang sesuai dengan kerangka kerja ini. Guru kelas, sekolah, dan administrator sekolah negeri dapat menggunakan dokumen NCSS ini sebagai titik awal untuk mendesain secara sistematis dan pengembangan kurikulum IPS yang efektif untuk peserta didiknya.

Ilmu Pengetahuan Sosial berlandaskan kepada prinsip-prinsip pendidikan serta karakteristik peserta didik. Peserta didik dan pendidik harus mengikuti pelatihan mempunyai pemahaman baik mengenai disiplin ilmu sosial, termasuk strukturnya, gagasan dasar, pertanyaan utama termasuk cara penyelidikan ilmu sosial, metodenya, dan konsep PIPS. PIPS pertama kali diusulkan sebagai pendidikan ilmu sosial pada tahun 1970-an oleh Numan Somantri dalam sejumlah publikasi tulisannya. Pembelajaran yang terintegrasi, interdisipliner, multidisiplin, bahkan transdisipliner menjadi beberapa ciri khasnya jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Kompleksitas dan luasnya isu-isu sosial semakin berkembang, sehingga memerlukan penelitian integratif dari berbagai bidang, termasuk IIS, ilmu alam, teknologi, humaniora, lingkungan, dan sistem kepercayaan.

PIPS dipelajari dan dikembangkan secara ontologis, aksiologis, dan epistemologis dalam pendidikan tinggi pada jenjang sarjana, pascasarjana, dan doktoral. PIPS sebagai Disiplin Pendidikan memiliki tiga tradisi dalam studi sosial: 1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, 2) IPS sebagai ilmu sosial, 3) IPS sebagai penelitian mendalam, yang kemudian berkembang

menjadi lima, 4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial, dan 5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu. Berikut ilmu pendukung PIPS:



Gambar 1.1. Ilmu Pendukung PIPS
(Sumber: Sapriya, dkk, 2007:7)

Numan Somantri (2001) mengidentifikasi sejumlah karakteristik IIS, yaitu: 1) Berbagai kumpulan informasi yang terstruktur secara ilmiah dan metodis dari bidang ilmu sosial. 2) Ada beberapa teori dan generalisasi yang solid dan dapat dipercaya dalam kumpulan dan disiplin ilmu yang dapat diperiksa untuk menentukan tingkat kebenarannya, 3) Kumpulan disiplin ilmu IIS terkadang disebut sebagai konsep dasar atau struktur disiplin ilmu. 4) Pendekatan “konseptual” dan “sintaksis” yaitu, prosedur, generalisasi, dan teori dalam struktur—terkadang disebut sebagai pengetahuan ilmiah. 5) mengajukan pertanyaan, merumuskan teori, dan mengumpulkan informasi melalui eksperimen dan observasi. Untuk membantu menjelaskan masa lalu, masa kini, dan masa depan serta membantu mengatasi masalah sosial melalui ide, sikap, dan tindakan terbaik, masing-masing teori dan generalisasi ini masih terus diciptakan, disempurnakan, dan ditingkatkan.

Dalam Sapriya (2008: 18), terdapat landasan dalam PIPS, diantaranya yaitu: 1) Landasan filosofis, yang menawarkan konsep-konsep fundamental untuk mengidentifikasi topik-topik penelitian utama atau area-area dan fitur-fitur pengembangan PIPS sebagai disiplin pendidikan (karakteristik ontologis, epistemologis, dan aksiologis), 2) Landasan ideologis, yang dirancang sebagai sistem konsep fundamental untuk menawarkan wawasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana teori-teori pendidikan berhubungan dengan hakikat dan penerapan etika, moral, politik, dan norma-norma perilaku dalam konstruksi dan pengembangan PIPS, dan bagaimana PIPS dan PIPS sebagai disiplin pendidikan saling berhubungan? Untuk mengembangkan teori-teori atau prinsip-prinsip PIPS sebagai disiplin pendidikan, landasan sosiologis menawarkan kerangka konsep fundamental untuk mengidentifikasi nilai-nilai, kebutuhan, minat, kekuatan, aspirasi, dan pola-pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial. 4) Landasan antropologis, yang menawarkan sistem konsep fundamental untuk mengidentifikasi pola-pola, sistem-sistem, dan struktur-struktur pendidikan khusus disiplin ilmu yang berkaitan dengan pola-pola, sistem-sistem, dan struktur-struktur budaya serta pola-pola perilaku manusia yang rumit, 5) Landasan kemanusiaan menawarkan kerangka fundamental untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas manusia yang diinginkan yang seharusnya menjadi fokus pendidikan. 6) Landasan politik, yang memberikan kerangka konsep-konsep dasar untuk menetapkan arah dan batasan kebijakan pendidikan PIPS, 7) Landasan psikologis, yang memberikan kerangka konsep-konsep dasar untuk memastikan bagaimana PIPS mengkonstruksi tubuh pengetahuan disiplin ilmu tersebut pada tingkat personal dan kolektif sesuai dengan entitas psikologisnya, 8) Landasan keagamaan, yang memberikan seperangkat prinsip-prinsip dasar tentang etika, moral, standar, dan nilai-nilai yang berfungsi sebagai jiwa (ruh) yang mendasari seluruh struktur PIPS, khususnya pendidikan Indonesia.

1.2 Ilmu-ilmu Sosial

Dalam Sapriya, dkk (2007: 6), Frasa “ilmu sosial” (IIS) merupakan terjemahan dari “ilmu sosial”, yang merupakan lawan dari “studi sosial”. Selain ilmu sosial, ada ilmu alam dan humaniora. Tiga bidang utama ilmu alam adalah kimia, fisika, dan biologi. Akan tetapi, humaniora mencakup sastra dan sejarah. Filsafat merupakan dasar dari semua humaniora dan disiplin ilmu sains. Setiap disiplin ilmu memiliki filosofinya sendiri, tetapi pada akhirnya, semuanya berakar pada doktrin agama.

Peran ilmu sosial dalam evolusi studi sosial Tidak diragukan lagi, teori di balik pertumbuhan ilmu sosial sama pentingnya dengan pengajaran dalam kurikulum sekolah. Menurut Banks, perancang kurikulum harus mencari ide-ide ilmu sosial yang akan membantu siswa dalam memperoleh konsep dan generalisasi serta membuat keputusan. Sejak awal abad ke-20, setidaknya tujuh bidang ilmu sosial telah muncul, diantaranya:

1. Antropologi

Kebudayaan manusia dipelajari oleh para antropolog. Baik budaya modern maupun budaya prasejarah, budaya yang sudah ada sebelum zaman sejarah menjadi perhatian para antropolog. Dari masa berburu dan mengumpulkan makanan hingga masa bertani dan industri, mereka mengkaji kebudayaan pada setiap tahap kemajuan teknis.

Antropolog dapat dibagi menjadi beberapa spesialisasi. Pertama, antropolog sosial (antropolog budaya) yang mempelajari kelompok manusia yang ada yang menggunakan cara hidup tertentu (misalnya budaya). Kedua, etnografer adalah antropolog yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan informasi tentang semua aspek budaya yang ada melalui kerja lapangan. Ketiga, antropolog linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan oleh manusia dengan fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Keempat, antropolog fisik (ahli biologi) menggunakan teknik ilmu pengetahuan alam dalam studi makhluk hidup dan fosil. Kelima, arkeolog menggunakan teknik untuk penggalian dan analisis ilmiah dari sisa-sisa

fisik makhluk hidup untuk merekonstruksi cara hidup manusia yang telah punah. Keenam, primatologi termasuk antropolog yang mempelajari perilaku kelompok primata.

2. Ilmu Ekonomi

Disiplin ilmu ekonomi mengkaji bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mikroekonomi dan makroekonomi adalah dua bidang utama analisis ekonomi yang dicakup oleh ilmu ekonomi. Perilaku individu, isu-isu domestik, bisnis, dan pasar semuanya dipelajari oleh para ahli ekonomi mikro. Penentuan harga produk dan jasa, pengaruh harga terhadap pola produksi, dan pengaruh pasar serta tindakan pemerintah terhadap pola-pola ini merupakan perhatian para ahli. Sementara itu, ahli ekonomi makro mempelajari bagaimana perekonomian berfungsi secara keseluruhan. Spesialis ini berfokus pada perubahan tingkat harga rata-rata, tingkat lapangan kerja, serta pengeluaran dan pendapatan ekonomi.

Ekonomi komparatif dan sejarawan ekonomi adalah dua bidang spesialisasi material. Dengan berupaya menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu telah membentuk kondisi perekonomian kontemporer, para sejarawan ekonomi bertujuan untuk menjembatani dua bidang ilmu sosial. Sebaliknya, para ekonom komparatif mengkaji dan membedakan sejumlah sistem ekonomi dari berbagai budaya atau negara, seperti Rusia dan Amerika Serikat, untuk menentukan bagaimana masing-masing sistem menangani masalah alokasi sumber daya yang terbatas dalam menghadapi permintaan yang tidak terbatas.

3. Geografi

Kita belajar tentang dunia dan bagaimana lingkungan fisik memengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia melalui geografi. Geografi fisik dan geografi manusia adalah dua subkategori geografi. Ahli geografi menyelidiki karakteristik

fisik tubuh manusia, termasuk iklim, tanah, sumber daya udara, distribusi tumbuhan dan hewan, serta bentuk lahan. Kajian geografi budaya (juga dikenal sebagai ahli kependudukan-demografer, berfokus pada bagaimana masyarakat berpindah-pindah di suatu wilayah tertentu, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisiknya, dan bagaimana masyarakat memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, bahkan mempelajari pula bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Kartografi, atau pemetaan, adalah bidang geografi lainnya. Kurikulum PIPS atau studi sosial biasanya juga berfokus pada bidang ini. Posisi orang dan lokasi di permukaan bumi menarik bagi para kartografer.

4. Sejarah

Sejarah adalah studi tentang keberadaan manusia sebelumnya. Segala aspek aktivitas manusia di masa lalu, termasuk politik, hukum, militer, sosial, agama, seni (termasuk yang berkaitan dengan seni, musik, arsitektur Islam, dan sastra), intelektual, dan ilmiah, menjadi perhatian sejarawan. Terdapat perdebatan mengenai apakah sejarah lebih baik dikategorikan sebagai ilmu sosial atau sebagai komponen humaniora. Persoalan ini muncul karena para peneliti berusaha merinci kehidupan masa lalu secara cermat dan ilmiah dengan sejumlah kendala. Tidak adanya catatan kejadian sejarah yang komprehensif merupakan salah satu kelemahannya.

Tantangan memperoleh data yang parsial atau berpotensi menyimpang dapat diselesaikan dengan dua cara. Meskipun karya sejarawan memiliki nilai artistik, deskripsi deskriptif atau naratif sejarawan tentang peristiwa sejarah menggunakan pendekatan sastra dan kurang objektif menjadi kendala. Meskipun demikian, semakin banyak sejarawan yang mengidentifikasi dirinya sebagai sejarawan ilmiah, dan mereka memiliki dedikasi yang sama terhadap sikap dan metodologi ilmiah seperti ilmuwan sosial lainnya dalam mengidentifikasi dan membangun kehidupan masa

lalu. Selama sejarawan menerapkan sikap dan metodologi ilmiah ketika mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan menghasilkan temuan yang metodis, tidak memihak, dan komprehensif, pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mereka adalah ilmuwan sosial.

5. Ilmu Politik

Para ilmuwan politik adalah hukum umum (hukum publik). Mereka prihatin terhadap pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia di masyarakat, terutama yang digunakan oleh pemerintah. Ilmu politik harus menciptakan keseimbangan antara masyarakat umum dan pemerintah.

Kekuasaan pemerintah (atau organisasi politik lainnya) atau berbagai fungsi pemerintah merupakan bidang khusus ilmu politik. Bergantung pada tingkat pemerintahan, topik yang menjadi perhatian khusus meliputi hubungan internasional (politik internasional) dan pemerintahan daerah dan pusat. Ilmuwan politik dapat mengekspresikan diri mereka dalam bentuk pemerintahan apa pun, termasuk monarki, kediktatoran, dan demokrasi. Bidang kajian khusus berdasarkan fungsi pemerintah mencakup proses pembentukan undang-undang (*creating law*) pada lembaga legislatif, sistem penafsiran di bidang yudikatif (*interpreting law*), dan proses pelaksanaan undang-undang di lembaga eksekutif (*law person dan small law*). Bidang-bidang spesialisasi tambahan meliputi kajian tentang hukum publik, perilaku politik, dan administrasi umum.

6. Psikologi

Psikolog secara historis telah menyelidiki pembelajaran, pemikiran, emosi, kelompok perilaku, perkembangan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan, dan perilaku abnormal.

Dalam psikologi, ada peminatan yang lebih fokus pada ilmu alam dan ada yang lebih fokus pada ilmu sosial. Semua aspek perilaku perkembangan manusia sepanjang hidup

dipelajari oleh psikolog perkembangan. Psikolog eksperimental menyelidiki perilaku individu manusia melalui metode penelitian laboratorium atau eksperimental. Perilaku manusia dalam kelompok, termasuk pengambilan keputusan, tempat kerja, dan keluarga, menjadi perhatian psikolog sosial. Sifat dan evolusi kepribadian manusia dipelajari oleh psikolog kepribadian. Psikolog pengetahuan mempelajari kognisi dan pembelajaran manusia. Psikolog klinis mempelajari perilaku manusia, baik normal maupun tidak teratur, dan lain sebagainya.

7. Sosiologi

Sosiolog menyelidiki bagaimana manusia berinteraksi dalam lingkungan sosial. Bidang studi utamanya adalah perilaku manusia dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pengoperasian lembaga dan organisasi. Keluarga, karyawan dalam organisasi, dan kelompok yang dibentuk khusus untuk tujuan melaksanakan penelitian ilmiah di laboratorium, seperti kelompok pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, adalah contoh kelompok yang muncul secara alami.

Sekolah, media, kelas sosial, bisnis, dll. biasanya dianggap sebagai institusi yang diminati. Sosiolog tertarik pada interaksi antara institusi dan kelompok. Keluarga, kriminologi, opini publik, organisasi yang kompleks, hubungan ras dan etnis, peran jenis kelamin, pendidikan, perilaku kelompok kecil, stratifikasi sosial, sosiologi medis, bidang pekerjaan atau jabatan, dan lain sebagainya.

1.3 Perkembangan Ilmu Sosial

Adapun sejarah perkembangan ilmu sosial dalam Iga Zahira (2021: 16), yaitu:

1. Perkembangan Ilmu Sosial Abad Ke-17

Manusia awalnya hidup pada lingkungan yang berbasis rasa takut ataupun muncul fenomena sosial, menurut ilmuwan abad ke-17 yang mempelajari masyarakat, seperti Thomas Hobbes (1588-1679) dalam bukunya *Laviathan*.

Orang-orang selalu membujuk satu sama lain, memperlakukan satu sama lain seperti binatang buas. Menurut Hobbes, suasana komunal adalah *homo homini lupus*, artinya manusia memperlakukan orang lain seperti serigala, atau manusia adalah serigala bagi sesamanya. Kutipan Thomas Hobbes menggambarkan bagaimana krisis ilmu sosial pada abad ke-17 dapat menyebabkan setiap orang menjadi egois dan berhenti mempertimbangkan orang lain. Setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan merendahkan satu sama lain demi memperoleh kedudukan atau gengsi.

Oleh karena itu, tidak pernah ada keadaan damai dalam masyarakat. Masyarakat mulai membuat kesepakatan komunitas untuk mengamankan hubungan mereka satu sama lain dan berhenti memandang orang lain sebagai musuh atau sekadar objek kepentingan. Kesepakatan yang melarang adanya perbedaan pendapat antar masyarakat yang berujung pada konflik dan ketidakpuasan satu sama lain diciptakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan antar masyarakat.

John Locke adalah seorang ilmuwan sosial (1632-1704). Teori pengetahuan empiris Locke, yang ia paparkan dalam bukunya *An essay on human Understanding* (1689), membantunya mencapai eksistensinya yang luar biasa. Selain itu, karyanya *Two Treatises of Government* (1690) menjelaskan pandangannya tentang hukum pemerintahan negara bagian. Ia dianggap sebagai salah satu intelektual liberal pada masanya. Locke menyarankan pemisahan cabang legislatif dan eksekutif untuk mencegah negara melampaui yurisdiksinya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara tidak membedakan kedudukan atau kekuasaan yang berbeda dalam arti hukum, karena semua individu adalah setara dan harus mematuhi hukum yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemimpin dibatasi oleh otoritas legislatif dan otonom parlemen. Pada abad ke-17, perkembangan ilmu-ilmu sosial dimulai dari kesepakatan-kesepakatan

kemasyarakatan kemudian berlanjut pada sistem pemerintahan, yang menjadi landasan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial yang menjadi standar dan arahan yang harus diikuti oleh warga suatu negara agar dapat maju dan berkembang dan mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan perpecahan antara pemerintah dan masyarakat dapat dihindari dan kesewenang-wenangan dapat dihentikan.

Penciptaan ilmu sosial sangatlah penting pada abad ke-17, namun kedua individu tersebut di atas mampu mengubah keadaan dan menciptakan semangat sosial dalam masyarakat yang sebelumnya tidak ada. Ilmu pengetahuan sosial dan sikap suatu bangsa terhadap keadilan mempunyai keterkaitan yang erat karena keduanya berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang adil, sejahtera, dan damai.

Aliran positivisme semakin kuat dalam melakukan pengamatan dan penyelidikan ilmiah dengan mulai berkembangnya ilmu-ilmu sosial yang disebut sebagai ilmu-ilmu “muda” sejak abad ke-17. Ketika meneliti suatu isu sosial, ilmuwan sosial meniru ilmuwan alam dengan cara ini. Tujuan ilmu sosial adalah untuk menjelaskan motivasi dibalik perilaku kemauan manusia. Kesulitan fisiologisnya adalah bagaimana tubuh bertindak sebagai respons terhadap naluri, sedangkan tantangan sosiologisnya adalah mengapa orang memilih satu hal dibandingkan yang lain. Akibatnya, sejumlah pertanyaan ilmu sosial dimunculkan untuk memperjelas bagaimana seseorang bertindak (menyampaikan suatu makna). Dalam evolusi ilmu sosial, ada satu teknik yang dapat dikembangkan secara efektif yaitu melalui metode interpretatif. Oleh karena itu, perilaku manusia berkaitan dengan makna dan penyampaian pesan selain sebab dan akibat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan ataupun mengatasi masalah masalah dari berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat.

2. Perkembangan Ilmu Sosial Abad Ke-18

Pada abad ke-18 para ahli seperti Kant dan Hatter mengusulkan pengelompokan ilmu menjadi tiga. Berdasarkan kenyataan berikut ini:

Fenomena alam dan masyarakat dijadikan subjek kajian dengan memperhatikan keterkaitan antar objek yang sama. Karena alam dan masyarakat merupakan komponen fundamental dalam proses sosialisasi, maka kemajuan ilmu sosial perlu diukur dengan melihat keberlangsungan masyarakat atau lingkungan alam secara umum. Berpartisipasi dalam komunitas untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan sosial dalam kehidupan dan masyarakat dengan tetap mengikuti kemajuan yang ada, perlu juga mempertimbangkan lingkungan alam dan masyarakat. Meningkatkan ilmu sosial juga memerlukan persiapan yang ekstensif, dimulai dengan instrumen, pola bicara, dan yang terpenting adalah memastikan bahwa proses keterlibatan sejalan dengan konteks dan tradisi. Aspek psikologis diperlukan untuk memahami dan mengetahui karakter masyarakat dan lingkungannya guna mencapai tahap perkembangan ilmu-ilmu sosial di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat. Hal ini memudahkan untuk menentukan metode atau teknik pembangunan di masyarakat. berdasarkan lingkungan sosial sebenarnya

Adanya waktu kronologis, seperti sejarah, dengan memperhatikan keseimbangan waktu. Landasan ilmu sosial yang sejati adalah kronologi atau alur cerita yang terdefinisi dengan baik. Sebab untuk menjamin suatu peristiwa tetap dikenang pada masyarakat maka pembangunan memerlukan adanya prosedur atau jalur yang jelas. Di bidang geografi, astronomi, dan geofisika, perlu diingat bahwa terdapat sebaran di ruang angkasa. Dalam arti luas, terlihat adanya realitas dalam aspek keruangan, seperti tekstur dan bentuk bumi yang bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi, serta variasi cuaca bahkan musim. Astronomi

dan ilmu antariksa yang menjelaskan keberadaan planet juga dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial.

3. Perkembangan Ilmu Sosial Abad Ke-19

Ilmu-ilmu sosial belum ditawarkan sebagai mata kuliah universitas pada abad ke-19, meskipun faktanya ilmu-ilmu tersebut diakui nilai dan manfaatnya di negara-negara utama Eropa Barat. Meskipun definisi hukum dan ilmu-ilmu sosial masih ambigu di benua Eropa lainnya, ilmu-ilmu sosial umumnya masih dianggap sebagai subbidang filsafat di Inggris. Sebenarnya, ilmu-ilmu sosial abad ke-19 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ilmu sosial bersifat luas dan komprehensif, sehingga cenderung bersifat relasional dan mampu menggambarkan suatu permasalahan secara utuh dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sebaliknya disiplin ilmu lain diperluas dan dirumuskan lebih tepat mengenai hubungannya dengan orang lain.
- b. Karena ilmu sosial memberikan informasi untuk berhubungan dengan manusia baik di dalam maupun di luar lingkungan, maka ilmu ini sangat membantu dalam semua bidang masyarakat. Kita dapat mengukur kemajuan dan pertumbuhan di semua elemen komprehensif dengan lebih mudah ketika ilmu-ilmu sosial hadir.
- c. Kemampuan untuk mengubah hubungan atau fantasi menjadi karya ilmiah atau bahasa yang mengarah pada penemuan dan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain menjadikan ilmu-ilmu sosial sebagai cabang sah dari pengajaran akademis dan upaya ilmiah masyarakat pada umumnya. Disiplin ilmu sosial dapat membantu orang mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka di berbagai bidang seperti analisis, perbandingan, dan menghasilkan solusi yang bisa diterapkan.
- d. Adanya kesadaran akan perlunya mengembangkan prosedur metodologis yang cukup kuat untuk berbagai

ilmu sosial. Karena ilmu-ilmu sosial ada, kita bisa mengembangkan metode yang akan digunakan untuk berbagi pengetahuan kita dengan orang lain di bidang sosial masyarakat. Ilmu sosial akan memudahkan orang atau kelompok untuk mengatasi tantangan yang memerlukan interaksi terbaik.

4. Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia

Baik ilmu alam maupun ilmu sosial selalu berkembang dalam komunitas ilmiah, baik secara perlahan maupun cepat. Meztika Zed menyatakan bahwa sejarah evolusi ilmu-ilmu sosial dapat dipecah menjadi tiga tahap, dimulai dari tahap embrionik. mencakup masa kolonial, masa pembangunan tahun 1950an hingga Orde Baru, dan masa kini Pembagian tahapan perkembangan ilmu sosial memudahkan untuk menelusuri dan memahami bagaimana perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Berikut tiga tahapan perkembangan ilmu sosial:

- a. Tahap embrio. Tahap ini sering disebut dengan ilmu sosial kolonial atau Indologie. Alasannya, ilmu-ilmu sosial yang muncul saat itu lebih diarahkan pada tujuan penjajah, khususnya membantu pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan kebijakan dan administrasinya. Keadaan ini semakin disorot pada tahun 1842 ketika pemerintah Hindia Belanda bersiap untuk mendirikan Indologie, suatu cabang ilmu ketimuran yang diciptakan untuk melatih pekerja masa depan yang akan bertugas di Hindia Belanda. Karena ilmu-ilmu sosial dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja para pekerja yang kelak bekerja di Hindia Belanda, maka perkembangannya di Indonesia sepanjang abad ke-20 lebih berorientasi pada pemanfaatan kolonialisme Belanda. pemerintahan kolonial. Hanya satu individu yang memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu sosial pada saat itu, bukan bidang ilmu sosial secara keseluruhan. Di Belanda, ideologi berkembang sangat pesat, terlihat dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi yang berfokus pada ilmu

sosial pada tahun 1864. Faktanya, Universitas Leiden mendirikan Indologi sebagai program studi pada tahun 1891. Pada abad ke-20, ideologi mempunyai dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Namun hingga tahun 1950, hal itu terus terjadi. Pada abad ke-20, ideologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia. Namun hingga tahun 1950 masih belum berkembang secara signifikan.

- b. Tahap Perkembangan Jika perkembangan ilmu-ilmu sosial pada masa Indologi lebih bersifat eurosentris, maka tahun 1950-an dan 1960-an menjadi titik balik perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang lebih berorientasi ke Amerika Serikat, titik terjadinya perang dingin yang diikuti. Perang Dunia II menyaksikan upaya negara-negara adidaya untuk menggunakan pengaruhnya di Indonesia salah satunya melalui ilmu-ilmu sosial. Tidak mengherankan jika Amerika Serikat, misalnya, mencoba memberi dampak pada ilmu-ilmu sosial yang sedang berkembang di Indonesia. Ada yang mungkin berargumen bahwa negara-negara adidaya memanfaatkan kemajuan ilmu-ilmu sosial selama era developmentalis ini untuk mempengaruhi Indonesia, sehingga menciptakan kesan bahwa mereka telah menjajah dan menguasai negara ini. Selain itu, media ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap bidang ilmu sosial yang sedang berkembang di Indonesia saat itu. Karena indologi berkembang pada ilmu-ilmu sosial pada saat itu dan terikat kuat dengan negara-negara yang baru merdeka, maka perkembangan ilmu-ilmu sosial pada saat itu disebut sebagai ilmu sosial developmentalis. Karena developmentalisme identik dengan pembangunan, ilmu sosial memberikan penekanan yang kuat pada penggunaannya untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Bung Hatta, perkembangan ilmu-ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari penemuan-penemuan dan persoalan-persoalan kemasyarakatan

yang juga dihasilkan oleh ilmu-ilmu alam. Lebih lanjut Bung Hatta menjelaskan bahwa ilmu-ilmu sosial mempunyai peranan yang unik dalam departemen pembangunan negara dan masyarakat saat ini. Semakin banyak lulusan ilmu sosial dari berbagai dunia yang menjadi ilmuwan sosial.

- c. Fase Kontemporer pada tahun 1970an dan 1980an. Pertumbuhan ilmu-ilmu sosial di Indonesia dipengaruhi oleh titik balik yang signifikan ini. Maraknya perguruan tinggi yang mendirikan jurusan atau program studi ilmu sosial menunjukkan banyaknya jumlah tersebut. Setidaknya ada 74 fakultas ilmu sosial dan budaya yang berdiri pada awal tahun 1970-an. Perluasan institusi akademis tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan penelitian dan penerapan ilmu sosial di Indonesia, sehingga sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang berfungsi sebagai pusat studi ilmu sosial mulai tumbuh. Era tahun 1976 hingga tahun 1980 merupakan sejarah awal pesatnya perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan hingga saat ini masih berkembang pesat mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, Banks, James A. (1977). *Teaching Strategies for Social Studies Inquiry, Valuing, and Decision Making*. Seattle. University of Washington. Addison Wesley Publishing Company
- Dahrendorf, Ralf. (2000). *Social Science (Ilmu Sosial) dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial. Diterjemahkan oleh Haris Munandar, dkk.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- NCSS. Tersedia pada link: <https://www.socialstudies.org/>
- Parker, Walter. C. (2010). *Social Studies Today*. New York: Routledge
- Sapriya. (2007). *Konsep Dasar IPS*. Bandung : Lab. PKN Universitas Pendidikan Indonesia
- Sapriya. (2008). *Pendidikan IPS*. Bandung : Lab. PKN Universitas Pendidikan Indonesia
- Somantri, Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Supardan, Dadang. (2007). *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2015). *Filsafat Ilmu dan Relevansinya dengan Pendidikan IPS*. Bandung: Rizqi Press
- Zahira, Iga, dkk. (2021). *Pengantar Perkembangan Ilmu Sosial*. Mataram: Sanabil

BAB 2

PARADIGMA ILMU SOSIAL (FAKTA SOSIAL, DEFINISI SOSIAL, DAN PERILAKU SOSIAL)

Perkembangan ilmu sosial sebagai sebuah disiplin akademis tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mendasar mengenai cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami realitas sosial. Kerangka berpikir inilah yang dikenal sebagai paradigma. Istilah paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear melainkan melalui revolusi paradigmatik—pergeseran fundamental dalam cara komunitas ilmiah memandang objek kajiannya (Kuhn, 1962).

Dalam konteks ilmu sosial, George Ritzer mendefinisikan paradigma sebagai *'a fundamental image of the subject matter within a science'*, yakni gambaran mendasar tentang subjek kajian dalam sebuah ilmu (Ritzer, 2010). Paradigma membentuk pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sah, metode yang digunakan, dan interpretasi yang dihasilkan dalam sebuah penelitian sosial.

"A paradigm is what the members of a scientific community share, and conversely, a scientific community consists of men who share a paradigm." (Kuhn, 1962, hlm. 176)

Ilmu sosial modern mengenal tiga paradigma utama yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda dalam memahami masyarakat: (1) Paradigma Fakta Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, yang menekankan realitas sosial sebagai entitas otonom di luar individu; (2) Paradigma Definisi Sosial yang berpusat pada pemikiran Max Weber, yang menempatkan makna subjektif dan tindakan individu sebagai inti

kajian sosial; dan (3) Paradigma Perilaku Sosial yang diilhami oleh B.F. Skinner, yang memfokuskan analisis pada pola perilaku yang dapat diamati secara empiris.

Memahami ketiga paradigma ini sangat krusial bagi mahasiswa ilmu sosial karena paradigma menentukan cara peneliti mengidentifikasi masalah, memilih metode, dan menafsirkan data. Lebih dari itu, di era Indonesia kontemporer yang tengah mengalami transformasi digital yang masif, pemahaman paradigmatis menjadi semakin relevan untuk menganalisis fenomena-fenomena baru seperti media sosial, hoaks, dan perubahan identitas sosial.

REALITAS SOSIAL		
FAKTA SOSIAL <i>(Durkheim)</i> Struktur & Institusi Sosial	DEFINISI SOSIAL <i>(Weber)</i> Makna & Tindakan Individu	PERILAKU SOSIAL <i>(Skinner)</i> Stimulus-Respons & Perilaku
PEMAHAMAN KOMPREHENSIF TENTANG MASYARAKAT		

Gambar 2.1. Hubungan Paradigma Ilmu Sosial dan Realitas Sosial

Sumber: Diolah dari Ritzer (2010), Durkheim (1895), Weber (1922), dan Skinner (1953)

2.1 Fakta Sosial

2.1.1 Definisi dan Sejarah Perkembangan

Paradigma fakta sosial merupakan salah satu paradigma tertua dan paling berpengaruh dalam ilmu sosial. Paradigma ini berakar pada tradisi positivisme Auguste Comte yang kemudian disempurnakan secara sistematis oleh Emile Durkheim (1858–1917). Dalam karya monumentalnya *The Rules of Sociological Method* (1895), Durkheim menegaskan bahwa sosiologi harus mengkaji *social facts* — fakta-fakta sosial — sebagai objek studi yang independen dan otonom dari individu.

Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai '*every way of acting, fixed or not, capable of exercising on the individual an external constraint; or again, every way of acting which is general throughout a given society, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestations*' (Durkheim, 1895, hlm. 13). Definisi ini mengandung tiga karakteristik fundamental: bersifat eksternal terhadap individu, memiliki kekuatan memaksa (*coercive*), dan bersifat kolektif.

2.1.2 Konsep-Konsep Utama Durkheim

Durkheim mengembangkan beberapa konsep kunci yang menjadi fondasi paradigma fakta sosial:

1. Fakta Sosial (*Social Facts*)

Fakta sosial mencakup dua jenis: (1) *material social facts*, yang memiliki wujud fisik seperti hukum, bangunan, dan infrastruktur sosial; dan (2) *non-material social facts*, yang tidak berwujud seperti moralitas, kesadaran kolektif, dan representasi kolektif (Durkheim, 1895). Di Indonesia, fakta sosial material dapat dilihat pada sistem hukum adat yang tertulis, sedangkan fakta sosial non-material tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang mengikat seluruh warga negara.

2. Solidaritas Mekanik dan Organik

Dalam *The Division of Labor in Society* (1893), Durkheim membedakan dua tipe solidaritas sosial. *Solidaritas mekanik* (*mechanical solidarity*) ditemukan pada masyarakat sederhana yang homogen, di mana kohesi sosial dibangun atas dasar kesamaan kepercayaan dan praktik bersama. Sebaliknya, *solidaritas organik* (*organic solidarity*) muncul pada masyarakat modern yang kompleks dengan pembagian kerja yang tinggi, di mana kohesi dibangun melalui saling ketergantungan dan komplementaritas fungsi.

Relevansi konsep ini sangat jelas dalam konteks Indonesia. Masyarakat pedesaan di Jawa atau komunitas adat di Papua masih menunjukkan karakteristik solidaritas mekanik yang kuat, sementara masyarakat perkotaan Jakarta atau Surabaya telah bergerak menuju solidaritas organik

dengan spesialisasi pekerjaan dan heterogenitas nilai yang tinggi.

3. Kesadaran Kolektif

Konsep *conscience collective* (kesadaran kolektif) merujuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen yang dimiliki bersama oleh rata-rata anggota masyarakat. Kesadaran kolektif merupakan kekuatan yang mengikat masyarakat dan membedakannya dari sekumpulan individu. Dalam konteks Indonesia, semangat gotong royong, nilai-nilai kebhinnekaan, dan rasa nasionalisme merupakan manifestasi nyata dari kesadaran kolektif bangsa.

4. Anomie

Konsep *anomie* yang diperkenalkan Durkheim dalam *Suicide* (1897) merujuk pada kondisi ketidaknormaan sosial yang terjadi ketika norma-norma yang mengatur perilaku individu melemah atau hilang. Anomie dapat terjadi akibat perubahan sosial yang terlalu cepat. Indonesia pasca-Reformasi 1998 menunjukkan gejala anomie, ditandai oleh meningkatnya korupsi, konflik horizontal, dan disintegrasi nilai sosial.

Tabel 2.1. Konsep Utama Emile Durkheim dalam Paradigma Fakta Sosial

Konsep	Definisi	Contoh dalam Masyarakat Indonesia
Social Facts	Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang bersifat eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan koersif.	Hukum adat, aturan lalu lintas, norma gotong royong.
Solidaritas Mekanik	Solidaritas berdasarkan kesamaan, homogenitas, dan kesadaran kolektif yang kuat.	Komunitas adat Badui yang mempertahankan tradisi leluhur secara ketat.

Konsep	Definisi	Contoh dalam Masyarakat Indonesia
Solidaritas Organik	Solidaritas berbasis pembagian kerja dan saling ketergantungan antar individu yang berbeda fungsi.	Masyarakat perkotaan Jakarta dengan spesialisasi pekerjaan yang beragam.
Kesadaran Kolektif	Sistem kepercayaan dan perasaan bersama yang dimiliki rata-rata anggota masyarakat.	Semangat nasionalisme pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Anomie	Kondisi ketidaknormaan sosial akibat melemahnya norma dan nilai dalam masyarakat.	Peningkatan kriminalitas dan disintegrasi sosial pasca krisis ekonomi 1998.

2.1.3 Karakteristik Fakta Sosial

Fakta sosial memiliki tiga karakteristik yang membedakannya dari fenomena psikologis atau biologis:

Pertama, *eksternalitas*: fakta sosial berada di luar individu dan mendahuluinya. Ketika seorang anak lahir, ia sudah dihadapkan pada sistem bahasa, norma moral, dan institusi yang tidak ia ciptakan sendiri. Kedua, *koersivitas* (sifat memaksa): fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksakan dirinya kepada individu—pelanggaran terhadap norma sosial akan mendapat sanksi formal maupun informal. Ketiga, *kolektivitas*: fakta sosial bersifat umum dan menyebar di seluruh masyarakat, bukan milik individu tertentu.

2.1.4 Metode Penelitian Paradigma Fakta Sosial

Sesuai dengan ontologinya yang positivistik, paradigma fakta sosial menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai pendekatan utama. Peneliti fakta sosial berusaha memperlakukan fenomena sosial sebagaimana ilmuwan alam memperlakukan objek fisik dengan observasi sistematis, pengukuran statistik, dan analisis kausal. Survei nasional, analisis

statistik data sensus, dan studi komparatif lintas budaya merupakan metode yang lazim digunakan (Durkheim, 1895; Creswell, 2014).

2.1.5 Kritik terhadap Paradigma Fakta Sosial

Meskipun sangat berpengaruh, paradigma fakta sosial tidak luput dari kritik. Kritik utama datang dari kalangan interpretivist yang berpendapat bahwa paradigma ini terlalu deterministik dan mengabaikan agensi individu. Max Weber, misalnya, menolak pandangan bahwa masyarakat dapat dipahami tanpa mempertimbangkan makna subjektif yang diberikan aktor terhadap tindakannya. Selain itu, paradigma ini dianggap terlalu mengabaikan dimensi kekuasaan, konflik, dan ketidaksetaraan yang inheren dalam struktur sosial (Turner, 2003).

MASYARAKAT (Realitas Sui Generis)
INSTITUSI SOSIAL: Negara Agama Pendidikan Hukum Ekonomi
NORMA SOSIAL: Nilai Aturan Tradisi Budaya Moralitas Kolektif
KESADARAN KOLEKTIF: Internalisasi nilai dan norma oleh individu
INDIVIDU: Tunduk dan dibentuk oleh fakta sosial yang bersifat eksternal dan koersif

Gambar 2.2. Struktur Masyarakat Menurut Paradigma Fakta Sosial

Sumber: Diadaptasi dari Durkheim (1895) dalam *The Rules of Sociological Method*

2.2 Paradigma Definisi Sosial

2.2.1 Definisi dan Landasan Filosofis

Paradigma definisi sosial menempatkan makna, interpretasi, dan tindakan individu sebagai pusat kajian ilmu

sosial. Berbeda dengan Durkheim yang melihat masyarakat *dari atas ke bawah*, paradigma ini menekankan perspektif *dari bawah ke atas*: masyarakat dipahami sebagai produk dari interaksi dan pemaknaan yang dilakukan oleh individu-individu.

Tokoh sentral paradigma ini adalah Max Weber (1864–1920), sosiolog Jerman yang mengembangkan *soziologie des verstehens* — sosiologi pemahaman. Dalam *Economy and Society* (1922), Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial melalui interpretasi, dan melalui cara itu menjelaskan kausalitasnya dalam jalannya dan konsekuensinya (Weber, 1922).

"Sociology... is a science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects." (Weber, 1922, hlm. 4)

2.2.2 Konsep-Konsep Utama Weber

1. Tindakan Sosial (*Social Action*)

Konsep *social action* merupakan inti dari sosiologi Weber. Tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diorientasikan terhadap perilaku orang lain. Dengan demikian, tidak semua perilaku manusia adalah tindakan sosial — hanya yang bermakna dan berorientasi sosial.

2. Metode *Verstehen*

Metode *verstehen* (pemahaman interpretatif) merupakan pendekatan khas Weber. Peneliti tidak hanya mengamati perilaku dari luar, tetapi berupaya memahami makna subjektif yang melatarbelakangi tindakan aktor sosial. Weber membedakan dua level *verstehen*: pemahaman langsung (*aktuelles Verstehen*) yang menangkap makna tindakan secara segera, dan pemahaman motivasional (*erklärendes Verstehen*) yang menggali motivasi di balik tindakan (Weber, 1922).

Tabel 2.2. Tipologi Tindakan Sosial menurut Max Weber

Tipe Tindakan	Karakteristik Utama	Contoh Kontekstual Indonesia
Rasional Instrumental (Zweckrational)	Berorientasi pada tujuan dan efisiensi cara yang dipilih secara sadar.	Wirausahawan memilih platform e-commerce untuk memaksimalkan penjualan.
Rasional Nilai (Wertrational)	Berorientasi pada nilai intrinsik tanpa memperhitungkan konsekuensi pragmatis.	Tokoh agama berdakwah tanpa mengharapkan imbalan materi.
Afektif (Affektual)	Didasarkan pada emosi, perasaan, atau kondisi afektif pelaku.	Ungkapan solidaritas masyarakat saat bencana alam di Cianjur.
Tradisional (Traditionale)	Berdasarkan kebiasaan dan adat-istiadat yang telah tertanam lama.	Upacara adat pernikahan Jawa (siraman, midodareni, panggih).

3. Makna Subjektif dan Konstruksi Realitas Sosial

Ide bahwa realitas sosial adalah konstruksi makna yang terus-menerus dibangun oleh individu dalam interaksi mereka kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* (1966). Mereka berpendapat bahwa pengetahuan manusia tentang realitas dikonstruksi secara sosial melalui tiga momen dialektik: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966).

2.2.3 Interaksionisme Simbolik

Cabang penting dari paradigma definisi sosial adalah *symbolic interactionism* (interaksionisme simbolik) yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan dipopulerkan oleh

Herbert Blumer. Teori ini berargumen bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan kepadanya; makna tersebut muncul dari interaksi sosial; dan makna dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan individu dalam menghadapi hal-hal yang mereka jumpai (Blumer, 1969).

Dalam masyarakat Indonesia, interaksionisme simbolik sangat relevan untuk memahami praktik-praktik komunikasi sehari-hari. Penggunaan kata 'bapak' atau 'ibu' sebagai panggilan hormat, budaya sungkeman dalam adat Jawa, atau penggunaan pakaian adat dalam upacara resmi kenegaraan, semuanya merupakan contoh interaksi simbolik yang sarat makna.

2.2.4 Fenomenologi Sosial

Alfred Schutz mengembangkan *fenomenologi sosial* sebagai varian lain dari paradigma definisi sosial. Schutz berpendapat bahwa dunia kehidupan sehari-hari (*lifeworld*) merupakan fondasi dari semua konstruksi ilmu sosial. Individu memahami dunia melalui *typifications* yang merupakan kategori pemahaman yang dibentuk melalui pengalaman dan diwariskan secara sosial (Schutz, 1967).

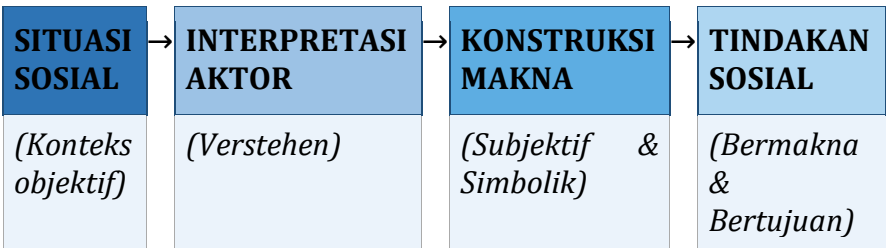
2.2.5 Penerapan di Era Media Sosial

Paradigma definisi sosial sangat relevan dalam memahami fenomena media sosial di Indonesia. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X menjadi arena konstruksi identitas sosial yang intensif. Pengguna media sosial secara aktif mengelola presentasi diri mereka (*impression management*, konsep Erving Goffman) untuk memproyeksikan citra tertentu kepada audiens digital mereka. Hashtag, caption, dan filter foto bukan sekadar elemen teknis, ia adalah sistem simbol yang digunakan untuk mengkomunikasikan makna dan membangun identitas (Nasrullah, 2015).

2.3.6 Kritik terhadap Paradigma Definisi Sosial

Kritik utama terhadap paradigma ini berkaitan dengan kecenderungannya untuk mengabaikan struktur sosial makro

dan hubungan kekuasaan. Dengan terlalu fokus pada makna mikro dan interaksi individual, paradigma ini dinilai kurang mampu menjelaskan fenomena-fenomena sosial makro seperti kemiskinan struktural, diskriminasi sistemik, atau dominasi kelas. Selain itu, metode kualitatif yang menjadi andalannya sering dikritik karena subjektivitasnya dan kesulitan dalam generalisasi (Craib, 1992).



Gambar 2.3. Proses Pembentukan Makna Sosial (Paradigma Definisi Sosial)

Sumber: Diadaptasi dari Weber (1922) dalam Economy and Society

2.3 Paradigma Perilaku Sosial

2.3.1 Definisi dan Akar Historis

Paradigma perilaku sosial berakar pada tradisi *behaviorism* dalam psikologi yang dikembangkan oleh John B. Watson dan kemudian disempurnakan oleh Burrhus Frederic Skinner (1904–1990). Dalam sosiologi, paradigma ini diwakili oleh pendekatan *social exchange theory* (teori pertukaran sosial) yang dikembangkan oleh George Homans. Paradigma ini berargumen bahwa perilaku sosial manusia, seperti perilaku organisme lainnya, dapat dipahami melalui hukum-hukum stimulus-respons dan reinforcement (Skinner, 1953).

Skinner dalam karyanya *Science and Human Behavior* (1953) menegaskan bahwa perilaku manusia merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Perilaku yang mendapat penguatan positif (*positive reinforcement*) akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang mendapat hukuman (*punishment*) akan cenderung dihindari.

"The behavior of an organism is that part of the functioning of the organism which is engaged in acting upon or having commerce with the outside world." (Skinner, 1953, hlm. 6)

2.3.2 Konsep-Konsep Utama

1. *Stimulus-Respons*

Model dasar *stimulus-respons* (S-R) menyatakan bahwa setiap perilaku merupakan respons terhadap stimulus dari lingkungan. Dalam konteks sosial, stimulus dapat berupa tindakan orang lain, situasi sosial, atau ekspektasi normatif. Perilaku protes sosial, misalnya, dapat dipahami sebagai respons terhadap stimulus berupa ketidakadilan atau tekanan ekonomi.

2. *Reinforcement*

Konsep *reinforcement* (penguatan) adalah inti dari paradigma perilaku sosial. Skinner membedakan antara: (1) *positive reinforcement*, penambahan stimulus menyenangkan yang memperkuat perilaku; (2) *negative reinforcement*, penghilangan stimulus tidak menyenangkan yang memperkuat perilaku; dan (3) *punishment*, konsekuensi tidak menyenangkan yang melemahkan perilaku.

3. *Teori Pertukaran Sosial*

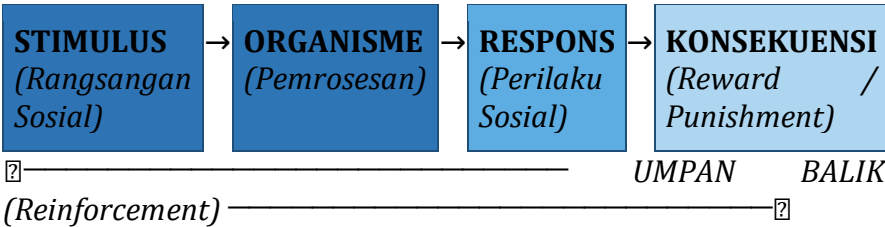
George Homans menerapkan prinsip behaviorisme ke dalam analisis interaksi sosial melalui *social exchange theory*. Menurutny, interaksi manusia pada dasarnya adalah proses pertukaran di mana aktor berupaya memaksimalkan reward dan meminimalkan cost. Gotong royong dalam masyarakat Indonesia, misalnya, dapat dipahami sebagai pertukaran sosial di mana individu berkontribusi karena mengharapkan timbal balik di masa depan (Homans, 1961).

2.3.3 Penerapan dalam Masyarakat Modern dan Digital

Paradigma perilaku sosial memiliki relevansi yang sangat besar dalam memahami masyarakat digital. Desain platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok secara eksplisit memanfaatkan prinsip-prinsip reinforcement. Fitur

'like', 'share', dan komentar berfungsi sebagai positive reinforcement yang mendorong pengguna untuk terus memproduksi konten. Notifikasi dirancang untuk menjadi stimulus yang memicu pengguna untuk kembali membuka aplikasi, menciptakan siklus ketergantungan yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai 'slot machine effect' (Alter, 2017).

Di bidang pendidikan, prinsip perilaku sosial diaplikasikan dalam sistem reward dan punishment: nilai rapor, penghargaan siswa berprestasi, dan sanksi akademis semuanya merupakan mekanisme reinforcement. Program beasiswa dan insentif akademis di Indonesia pada dasarnya merupakan penerapan sistematis dari positive reinforcement untuk mendorong perilaku belajar.



Gambar 2.4. Diagram Stimulus-Respons dalam Paradigma Perilaku Sosial

Sumber: Diadaptasi dari Skinner (1953) dalam Science and Human Behavior

2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Paradigma Perilaku Sosial

Kelebihan utama paradigma ini adalah kemampuannya menghasilkan prediksi yang terukur dan dapat diverifikasi secara empiris. Prinsip-prinsip behaviorisme telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai program modifikasi perilaku, dari terapi psikologis hingga desain sistem insentif. Namun, paradigma ini mendapat kritik tajam karena dianggap mereduksi kompleksitas manusia menjadi sekadar mesin respons mekanis yang mengabaikan kesadaran, makna, dan free will. B.F. Skinner sendiri secara eksplisit menolak konsep *autonomous man*,

manusia otonom yang memiliki kebebasan yang dianggapnya sebagai ilusi (Skinner, 1971).

Kritik juga datang dari perspektif etis: apakah tepat memandang manusia semata sebagai objek yang dapat 'dikondisikan' dan 'dimanipulasi' seperti tikus percobaan di laboratorium? Pertanyaan ini semakin relevan di era digital ketika perusahaan teknologi secara sistematis menggunakan prinsip-prinsip behaviorisme untuk merekayasa perilaku konsumen demi keuntungan komersial (Zuboff, 2019).

2.4 Perbandingan Ketiga Paradigma

Ketiga paradigma ilmu sosial yang telah dibahas diantaranya fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku social, masing-masing menawarkan perspektif yang unik dan komplementer dalam memahami realitas sosial. Alih-alih saling menggantikan, ketiga paradigma ini sesungguhnya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih kaya ketika digunakan secara bersama-sama (Ritzer, 2010).

Tabel 2.3. Perbandingan Komprehensif Tiga Paradigma Ilmu Sosial

Aspek	Fakta Sosial	Definisi Sosial	Perilaku Sosial
Tokoh Utama	Emile Durkheim, Talcott Parsons	Max Weber, G.H. Mead, Alfred Schutz	B.F. Skinner, George Homans
Fokus Kajian	Struktur dan institusi sosial	Makna subjektif dan tindakan individu	Pola perilaku yang dapat diamati
Objek Studi	Kolektivitas, norma, institusi	Aktor sosial dan interaksi bermakna	Stimulus-respons, reinforcement
Metode Penelitian	Kuantitatif, statistik, survei	Kualitatif, verstehen, fenomenologi	Eksperimen, observasi sistematis

Aspek	Fakta Sosial	Definisi Sosial	Perilaku Sosial
Cara Memahami Masyarakat	Top-down; masyarakat membentuk individu	Bottom-up; individu membangun realitas sosial	Melalui pola perilaku yang terukur
Kelebihan	Analisis makro yang komprehensif	Memahami motivasi dan makna mendalam	Prediktif dan terukur secara empiris
Kelemahan	Mengabaikan agen dan kreativitas individu	Sulit digeneralisasi dan subjektif	Mereduksi kompleksitas manusia
Relevansi Modern	Analisis kebijakan, koherensi sosial	Studi media sosial, identitas digital	Desain platform, modifikasi perilaku

Perbedaan mendasar di antara ketiga paradigma terletak pada unit analisis yang diprioritaskan. Paradigma fakta sosial beroperasi pada level makro seperti struktur, institusi, dan sistem sosial yang melampaui individu. Paradigma definisi sosial beroperasi pada level mikro-interpretif seperti makna, simbol, dan interaksi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari individu. Sementara itu, paradigma perilaku sosial beroperasi pada level mikro-empiris seperti pola perilaku yang dapat diamati dan diukur.

Dalam mengkaji fenomena korupsi di Indonesia, misalnya, ketiga paradigma akan menghasilkan analisis yang berbeda namun saling melengkapi: paradigma fakta sosial akan menganalisis sistem hukum, struktur birokrasi, dan norma yang mendorong praktik korupsi; paradigma definisi sosial akan mengkaji bagaimana korupsi dikonstruksi dan dimaknai oleh pelakunya sebagai 'hal yang wajar' atau 'budaya'; sedangkan

paradigma perilaku sosial akan menganalisis sistem reward dan punishment yang ada dan mengapa ia tidak cukup efektif untuk mengubah perilaku koruptif.

2.5 Relevansi Paradigma Ilmu Sosial Di Era Digital

2.5.1 Transformasi Sosial Digital di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta jiwa, atau sekitar 60% dari total penduduk. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi secara fundamental mengubah struktur sosial, pola interaksi, dan konstruksi identitas.

2.5.2 Relevansi Paradigma Fakta Sosial di Era Digital

Di era digital, fakta sosial tidak lagi terbatas pada institusi fisik tetapi juga mencakup struktur-struktur digital. Algoritma media sosial, misalnya, merupakan fakta sosial digital, ia bersifat eksternal bagi pengguna individual, memiliki kekuatan memaksa (apa yang ditampilkan dan tidak ditampilkan), dan berdampak kolektif pada jutaan orang. Regulasi digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan fakta sosial material yang mempengaruhi perilaku warga net Indonesia (Jati, 2016).

Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* di media sosial mencerminkan bekerjanya mekanisme sosial mekanik Durkheim di ruang digital, pengguna cenderung berkumpul dalam kelompok-kelompok yang homogen secara ideologis, memperkuat solidaritas dalam kelompok tetapi sekaligus meningkatkan polarisasi antara kelompok.

2.5.3 Relevansi Paradigma Definisi Sosial di Era Digital

Paradigma definisi sosial sangat relevan dalam memahami konstruksi identitas di media sosial. Pengguna Instagram atau TikTok secara aktif melakukan *impression management* yaitu memilih foto, teks, dan filter yang akan memproyeksikan identitas yang diinginkan kepada audiens.

Proses ini merupakan bentuk modern dari apa yang Goffman sebut sebagai 'dramaturgi sosial' yang kini berlangsung di panggung digital (Goffman, 1959).

Fenomena hoaks dan disinformasi di Indonesia juga dapat dianalisis melalui paradigma definisi sosial. Hoaks menyebar bukan semata karena kontennya tetapi karena ia beresonansi dengan sistem makna dan identitas kelompok tertentu. Masyarakat tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan secara aktif menafsirkan dan mengkonstruksi makna berdasarkan worldview mereka (Juditha, 2018).

2.5.4 Relevansi Paradigma Perilaku Sosial di Era Digital

Paradigma perilaku sosial mungkin yang paling langsung terlihat relevansinya dalam ekosistem digital. Desain platform media sosial secara eksplisit menggunakan *variable ratio reinforcement schedule* yaitu jadwal penguatan yang bervariasi secara acak, yang terbukti menghasilkan perilaku yang paling adiktif dan persisten. Setiap kali pengguna membuka aplikasi, mereka tidak tahu apakah akan menemukan sesuatu yang menarik atau tidak, dan ketidakpastian inilah yang membuat mereka terus kembali (Alter, 2017).

MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA		
📌 FAKTA SOSIAL DIGITAL • Algoritma platform media sosial • Regulasi konten digital (UU ITE) • Norma netizen • Budaya viral	📌 DEFINISI SOSIAL DIGITAL • Konstruksi identitas online Makna emoji & hashtag • Interaksi simbolik virtual • Presentasi diri di media sosial	📌 PERILAKU SOSIAL DIGITAL • Like & share sebagai reinforcement • Notifikasi sebagai stimulus • Gamifikasi platform • Kecanduan media sosial
IMPLIKASI: Diperlukan pendekatan multi-paradigma untuk memahami kompleksitas masyarakat digital Indonesia		

Gambar 2.5. Transformasi Sosial Digital dan Relevansi Paradigma Ilmu Sosial

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. dan Luckmann, T. (1966) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Blumer, H. (1969) *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Craib, I. (1992) *Modern Social Theory: From Parsons to Habermas*. 2nd edn. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Creswell, J. W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th edn. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1893) *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press (edisi terj. 1984).
- Durkheim, E. (1895) *The Rules of Sociological Method*. Diterjemahkan oleh S. A. Solovay dan J. H. Mueller. New York: Free Press (edisi terj. 1938).
- Durkheim, E. (1897) *Suicide: A Study in Sociology*. Diterjemahkan oleh J. A. Spaulding dan G. Simpson. New York: Free Press (edisi terj. 1951).
- Giddens, A. (1984) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Goffman, E. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books.
- Homans, G. C. (1961) *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Jati, W. R. (2016) 'Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Indonesia', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), pp. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524>.
- Juditha, C. (2018) 'Hoaks Komunikasi Interaktif di Media Sosial serta Antisipasinya', *Pekommas*, 3(1), pp. 31-44. DOI: <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Kuhn, T. S. (1962) *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

- Nasrullah, R. (2015) '*Konstruksi Identitas di Media Sosial: Dari Individu ke Budaya Siber*', *Komunikasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(1), pp. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.24912/jk.v8i1.28>.
- Prasetyo, B. dan Trisyanti, U. (2018) '*Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, pp. 22–27. DOI: <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.
- Ritzer, G. (2010) *Sociological Theory*. 8th edn. New York: McGraw-Hill.
- Schutz, A. (1967) *The Phenomenology of the Social World*. Diterjemahkan oleh G. Walsh dan F. Lehnert. Evanston: Northwestern University Press.
- Skinner, B. F. (1953) *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.
- Turner, J. H. (2003) *The Structure of Sociological Theory*. 7th edn. Belmont: Wadsworth.
- Weber, M. (1922) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Diterjemahkan oleh G. Roth dan C. Wittich. Berkeley: University of California Press (edisi terj. 1978).

BAB 3

KONSEP MASYARAKAT DAN BUDAYA

Masyarakat dan budaya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus (Koentjaraningrat, 2009) sedangkan budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Soemarjan & Soemardi, 1974). Keduanya saling memengaruhi karena budaya lahir dari kehidupan masyarakat, sementara masyarakat menjalankan kehidupannya berdasarkan nilai dan norma budaya yang berlaku.

Manusia, sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses interaksi tersebut, terbentuk kebiasaan, aturan, bahasa, kepercayaan, serta berbagai bentuk perilaku yang kemudian menjadi bagian dari budaya. Budaya berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam masyarakat sehingga tercipta keteraturan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, budaya menjadi pedoman perilaku masyarakat. Nilai, Bahasa, seni, adat istiadat, norma dan tradisi yang ada dalam suatu budaya mengatur cara manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Misalnya, budaya gotong royong di Indonesia membentuk masyarakat yang terbiasa bekerja sama dan saling membantu. Sebaliknya, masyarakat juga berperan menjaga, mengembangkan dan mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, mempelajari konsep masyarakat dan budaya penting untuk memahami kehidupan sosial manusia, termasuk cara manusia beradaptasi, bekerja sama, dan membangun peradaban.

Budaya berfungsi sebagai identitas masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri budaya yang berbeda, seperti makanan khas, bahasa daerah, pakaian adat dan tradisi tertentu. Perbedaan budaya tersebut menciptakan keanekaragaman sosial yang memperkaya kehidupan manusia. Sehingga masyarakat perlu menjaga toleransi agar perbedaan budaya tersebut tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hubungan budaya dan masyarakat juga bersifat dinamis. Perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkembangan teknologi dapat memengaruhi budaya yang ada, misalnya budaya berkirim surat berubah menjadi komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Di sisi lain, budaya juga dapat memengaruhi perubahan sosial, misalnya globalisasi yang memungkinkan masuknya budaya Barat memengaruhi cara berpakaian, pola makan, dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan sosial terutama pada generasi muda.

3.1 Unsur-unsur yang Membentuk Masyarakat

Istilah ‘masyarakat’ berasal dari bahasa Arab, ‘*syaraka*’ yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, masyarakat merujuk pada kata ‘*society*’ yang berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari proses interaksi tersebut terbentuk hubungan sosial, aturan, nilai, dan budaya yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan disusun oleh berbagai unsur yang saling berkaitan. Horton dan Hunt (1984) berpendapat bahwa,

“A society is a relatively independent, self-perpetuating human group which occupies a territory, shares a culture, and has most of its associations within the group.”

Artinya, Masyarakat merupakan kelompok manusia yang relatif mandiri, hidup menetap di suatu wilayah, memiliki

kebudayaan yang sama, dan sebagian besar hubungan sosial terjadi di dalam kelompok.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting masyarakat menurut Horton dan Hunt, yaitu:

1. Terdiri dari sekelompok manusia.
2. Menempati wilayah tertentu.
3. Memiliki budaya atau kebudayaan bersama.
4. Memiliki hubungan sosial yang berlangsung terus-menerus.
5. Bersifat relatif mandiri dan mampu mempertahankan kehidupannya.

Selanjutnya menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2012) menekankan pentingnya kebiasaan dan proses sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat terbentuk karena :

1. Adanya hubungan sosial
2. Interaksi yang terus-menerus
3. Kebiasaan bersama
4. Kerja sama sosial
5. Norma dan aturan sosial

Selanjutnya, MacIver dan Page (1961) berpendapat bahwa unsur-unsur pembentuk masyarakat meliputi:

1. Adanya manusia yang hidup Bersama. Sekelompok manusia menjadi dasar terbentuknya masyarakat.
2. Interaksi sosial. Hubungan timbal balik antaranggota masyarakat melalui komunikasi dan tindakan sosial.
3. Kesadaran sebagai satu kesatuan. Anggota masyarakat memiliki rasa identitas dan kebersamaan.
4. Sistem aturan dan norma. Norma diperlukan untuk mengatur perilaku agar tercipta ketertiban sosial.
5. Kebudayaan. Nilai, adat istiadat, bahasa, dan tradisi menjadi pedoman hidup masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk masyarakat meliputi adanya sekelompok manusia, interaksi sosial, norma dan nilai sosial,

kerja sama, serta kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan bersama. Unsur-unsur tersebut berperan penting dalam menciptakan keteraturan, persatuan, dan kesinambungan hidup sosial. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, suatu kelompok manusia belum dapat disebut sebagai masyarakat.

Lebih lanjut, MacIver dan Page (1961) membedakan antara Masyarakat dan komunitas. Masyarakat (*society*) merupakan jaringan hubungan sosial yang luas sedangkan komunitas (*community*) yaitu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh adanya tingkat keteraturan, kesatuan, dan kebersamaan sosial tertentu. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa komunitas merupakan bagian dari masyarakat dengan ikatan yang erat berdasarkan minat atau tujuan sosial yang sama, contohnya komunitas Peduli Sampah, klub lari dan sebagainya.

MacIver (1961) memandang masyarakat bukan hanya sekumpulan individu, melainkan suatu jaringan hubungan sosial (*web of social relationships*) yang saling berkaitan. Artinya, masyarakat terbentuk karena adanya interaksi sosial yang terus-menerus antara individu maupun kelompok sehingga tercipta aturan, norma, dan lembaga sosial yang mengatur kehidupan bersama.

3.2 Sistem Sosial

Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses interaksi tersebut, terbentuk hubungan-hubungan sosial yang teratur dan berlangsung terus-menerus sehingga menciptakan suatu pola kehidupan bersama yang disebut sistem sosial. Sistem sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok agar tercipta keteraturan, keseimbangan, dan stabilitas sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sistem sosial terlihat melalui adanya nilai, norma, adat istiadat, lembaga sosial, serta peran sosial yang dijalankan oleh anggota masyarakat. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Tanpa adanya sistem sosial, kehidupan

masyarakat akan mengalami kekacauan karena tidak ada aturan maupun pedoman dalam berinteraksi.

1. Talcott Parsons

Menurut Parsons (1951), sistem sosial adalah suatu jaringan hubungan sosial yang tersusun dari tindakan individu-individu yang saling berinteraksi berdasarkan nilai dan norma yang disepakati bersama. Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai bagian yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Jika salah satu bagian terganggu, maka bagian lain juga akan terpengaruh.

Parsons termasuk tokoh aliran struktural fungsional, yaitu pandangan yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang cenderung menciptakan keseimbangan dan keteraturan sosial. Parsons menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat melakukan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai sosial, norma sosial, tujuan bersama, harapan masyarakat serta status dan peran sosial. Karena itu, perilaku manusia tidak dilakukan secara bebas sepenuhnya, tetapi dibatasi oleh aturan sosial yang berlaku. Contohnya, Guru menjalankan peran mengajar sesuai norma pendidikan, Polisi menjaga keamanan sesuai aturan hukum, Orang tua mendidik anak sesuai nilai keluarga, Semua peran tersebut saling berhubungan dan membentuk keteraturan sosial.

Parsons (1951) juga menjelaskan bahwa sistem sosial memiliki empat fungsi utama yang dikenal dengan teori AGIL:

- a. *Adaptation* (Adaptasi), artinya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, sistem ekonomi menyediakan kebutuhan masyarakat dan teknologi berkembang untuk menghadapi perubahan zaman.
- b. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan), artinya menentukan dan mencapai tujuan bersama. Masyarakat harus memiliki tujuan bersama dan cara mencapainya. Contohnya Pemerintah membuat kebijakan untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sembako yang bertujuan membantu masyarakat miskin.

- c. *Integration* (Integrasi), artinya menjaga hubungan antaranggota masyarakat. Sistem sosial harus menjaga hubungan antaranggota agar tetap harmonis. Misalnya, hukum dan norma menjaga ketertiban sosial serta lembaga agama memperkuat solidaritas masyarakat.
- d. *Latency* (Pemeliharaan pola), artinya mempertahankan nilai dan budaya masyarakat. Masyarakat harus menjaga dan mewariskan nilai serta budaya kepada generasi berikutnya. Contohnya, keluarga dan sekolah menanamkan nilai moral kepada anak-anak.

Menurut Parsons, lembaga sosial memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Fungsi Lembaga Sosial

Lembaga Sosial	Fungsi
Keluarga	Pendidikan karakter dan sosialisasi
Pendidikan	Transfer ilmu dan nilai sosial
Agama	Menjaga moral dan solidaritas
Ekonomi	Memenuhi kebutuhan hidup
Pemerintahan	Mengatur ketertiban dan tujuan masyarakat

2. Selo Soemardjan

Soemardjan (1990) berpendapat bahwa sistem sosial adalah keseluruhan hubungan antarunsur sosial dalam masyarakat yang saling berkaitan dan membentuk suatu struktur yang teratur. Sistem sosial muncul karena adanya interaksi antara individu maupun kelompok yang diatur oleh nilai, norma, dan lembaga sosial. Soemardjan memiliki pandangan bahwa masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang bekerja bersama untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Dalam sistem

sosial, setiap individu memiliki kedudukan dan peran tertentu yang saling memengaruhi satu sama lain, misalnya dalam sistem sosial keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing, yaitu ibu mengurus rumah tangga, ayah mencari nafkah sedangkan anak belajar dan menghormati orang tua.

Menurut Soemarjan (1990), ciri-ciri sistem sosial meliputi:

- a. Adanya hubungan sosial. Sistem sosial terbentuk karena adanya hubungan dan interaksi antaranggota masyarakat. Contohnya hubungan antara guru dan siswa, Hubungan antaranggota keluarga atau hubungan antara penjual dan pembeli.
- b. Memiliki pola yang teratur. Interaksi dalam masyarakat berlangsung secara teratur berdasarkan aturan dan kebiasaan yang berlaku. Misalnya, tata tertib sekolah, norma sopan santun dalam masyarakat.
- c. Berdasarkan nilai dan norma. Norma dan nilai menjadi pedoman dalam bertindak sehingga tercipta keteraturan sosial. Contohnya, menghormati orang tua, mematuhi hukum.
- d. Memiliki tujuan bersama. Masyarakat memiliki tujuan bersama, seperti menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.
- e. Adanya lembaga sosial. Lembaga sosial membantu mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan baik. Contohnya, keluarga, pendidikan, agama, pemerintahan dan ekonomi.

Menurut pandangan Soemardjan (1990), sistem sosial terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu :

Tabel 3.2. Unsur-unsur Sistem Sosial

Unsur	Penjelasan
Individu	Anggota masyarakat yang saling berinteraksi
Interaksi sosial	Hubungan timbal balik antaranggota masyarakat
Nilai sosial	Pedoman mengenai sesuatu yang dianggap baik
Norma sosial	Aturan perilaku dalam masyarakat
Status dan peran	Kedudukan dan fungsi seseorang dalam masyarakat
Lembaga sosial	Organisasi yang mengatur kebutuhan masyarakat

Menurut Soemarjan (1990), sistem sosial memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- Menjaga keteraturan sosial. Sistem sosial membantu menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- Mengatur perilaku masyarakat. Nilai dan norma menjadi pedoman dalam bertindak.
- Menciptakan kerja sama. Sistem sosial memungkinkan masyarakat bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup.
- Menjaga persatuan. Adanya sistem sosial membantu memperkuat solidaritas dan integrasi sosial.
- Mengendalikan penyimpangan sosial. Norma dan aturan sosial digunakan untuk mengontrol perilaku yang menyimpang.

3. Emile Durkheim

Menurut Durkheim (1961), sistem sosial adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui hubungan antarindividu yang diikat oleh nilai, norma, dan kesadaran kolektif. Ia memandang masyarakat sebagai suatu kenyataan sosial yang memiliki kekuatan lebih besar daripada individu-individu di dalamnya. Durkheim juga menekankan bahwa keteraturan sosial tercipta karena

adanya aturan, norma, dan solidaritas sosial yang dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat tetap stabil dan terorganisasi.

Durkheim (1961) berpendapat bahwa sistem sosial tidak hanya dibentuk oleh individu, tetapi juga oleh fakta sosial (*social facts*), yaitu aturan dan kebiasaan sosial yang memengaruhi perilaku manusia. Contoh fakta sosial, hukum, norma agama, adat istiadat dan tata tertib sekolah. Fakta sosial bersifat memaksa karena individu harus menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ciri sistem sosial menurut Durkheim (1961) meliputi :

- a. Adanya Fakta Sosial. Perilaku individu dipengaruhi oleh aturan dan norma yang berada di luar dirinya.
- b. Memiliki Kesadaran Kolektif. Anggota masyarakat memiliki nilai dan keyakinan bersama yang menciptakan persatuan sosial.
- c. Terciptanya Solidaritas Sosial. Hubungan sosial dalam masyarakat dibangun atas dasar solidaritas atau rasa kebersamaan.
- d. Adanya Keteraturan Sosial. Masyarakat memiliki aturan yang menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.
- e. Bersifat Mengikat. Norma dan nilai sosial mengikat anggota masyarakat agar bertindak sesuai harapan sosial.

Lebih lanjut Durkheim menjelaskan bahwa sistem sosial tercipta melalui solidaritas sosial yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Solidaritas Mekanik. Solidaritas mekanik terdapat pada masyarakat sederhana atau tradisional, cirinya yaitu pembagian kerja masih sederhana, anggota masyarakat memiliki pekerjaan dan nilai yang hampir sama, ikatan sosial sangat kuat dan kesadaran kolektif tinggi. Misalnya, masyarakat desa tradisional atau kehidupan suku adat. Pada solidaritas mekanik, pelanggaran norma dianggap sebagai ancaman bagi seluruh masyarakat sehingga hukuman biasanya bersifat keras.

- b. Solidaritas Organik. Solidaritas organik terdapat pada masyarakat modern. Cirinya yaitu pembagian kerja lebih kompleks, setiap individu memiliki pekerjaan berbeda, ketergantungan antarindividu tinggi dan hubungan sosial didasarkan pada fungsi dan kebutuhan. Contohnya masyarakat perkotaan atau dunia industri modern. Dalam solidaritas organik, keteraturan sosial tercipta karena adanya saling ketergantungan antarprofesi.

Selanjutnya, Durkheim (1961) menjelaskan bahwa pembagian kerja sangat penting dalam sistem sosial karena membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kerja sama sosial dan menciptakan ketergantungan antaranggota masyarakat. Semakin modern masyarakat, semakin kompleks pembagian kerjanya.

Durkheim (1961) juga memperkenalkan konsep anomie, yaitu keadaan ketika norma sosial melemah atau tidak mampu mengatur perilaku masyarakat. Anomie dapat terjadi akibat perubahan sosial yang terlalu cepat, krisis ekonomi, konflik sosial dan modernisasi yang tidak terkendali. Akibat anomie yaitu meningkatnya penyimpangan sosial, hilangnya pedoman hidup serta konflik dan ketidakstabilan sosial.

4. Max Weber

Menurut Weber (1978), sistem sosial terbentuk dari tindakan sosial (*social action*) yang dilakukan individu dalam masyarakat. Weber memandang bahwa masyarakat tidak hanya terdiri atas struktur dan aturan sosial, tetapi juga dibangun oleh tindakan manusia yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem sosial menurut Weber adalah pola hubungan sosial yang muncul karena individu saling berinteraksi berdasarkan makna, nilai, dan tujuan yang mereka pahami. Weber menekankan bahwa manusia bertindak bukan sekadar karena kebiasaan, tetapi karena tindakan tersebut memiliki arti bagi dirinya dan orang lain.

Menurut Weber (1978), “Tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain.” Artinya, suatu tindakan disebut sosial apabila mempertimbangkan perilaku orang lain. Contohnya seorang siswa belajar karena ingin mendapatkan nilai baik, pedagang melayani pembeli agar memperoleh keuntungan, seseorang membantu tetangga karena adanya nilai solidaritas. Dari tindakan-tindakan tersebut kemudian terbentuk pola hubungan yang teratur dan menjadi sistem sosial. Ciri sistem sosial menurut Weber (1978) sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tindakan sosial. Sistem sosial terbentuk dari tindakan individu yang saling berhubungan.
- b. Memiliki makna subjektif. Setiap tindakan sosial memiliki tujuan dan makna tertentu bagi pelakunya.
- c. Adanya interaksi sosial. Hubungan antarindividu menciptakan pola sosial dalam masyarakat.
- d. Dipengaruhi nilai dan budaya. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh nilai, norma, agama, dan tradisi.
- e. Bersifat dinamis. Sistem sosial dapat berubah sesuai perubahan nilai dan pola pikir masyarakat.

Selanjutnya, Weber (1978) membagi tindakan sosial menjadi empat jenis utama, yaitu :

- a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*). Tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhitungkan cara paling efektif. Contohnya Pengusaha menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan keuntungan, Siswa belajar keras agar lulus ujian.
- b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrational*). Tindakan yang dilakukan karena dianggap sesuai nilai tertentu, tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Misalnya seseorang beribadah karena keyakinan agama, membantu korban bencana karena alasan kemanusiaan.
- c. Tindakan Afektif. Tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Contohnya menangis karena sedih atau marah ketika dihina.

- d. Tindakan Tradisional. Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau adat istiadat. Misalnya upacara adat atau tradisi gotong royong.

Weber juga menjelaskan bahwa sistem sosial berkaitan erat dengan kekuasaan dan wewenang (*authority*). Ia membagi wewenang menjadi tiga bentuk:

- a. Wewenang Tradisional. Berdasarkan adat dan kebiasaan turun-temurun. Contohnya raja adat, Pemimpin suku.
- b. Wewenang Karismatik. Berdasarkan kharisma atau pengaruh pribadi seseorang. Contoh Tokoh agama, Pemimpin revolusi
- c. Wewenang Rasional-Legal. Berdasarkan aturan hukum dan jabatan resmi. Contoh, Presiden, Hakim, Polisi

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, Emile. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1893).
- Durkheim, Emile. (1982). *The rules of sociological method* (S. Lukes, Ed.; W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1895).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Linton, Ralph. (1994). *The study of man*. Appleton-Century-Crofts.
- MacIver, Robert M., & Page, Charles H.. (1961). *Society: An introductory analysis*. Macmillan.
- Parsons, Talcott. (1951). *The social system*. Free Press.
- Soemardjan, Selo, & Soemardi, Soelaiman. (1974). *Setangkai bunga sosiologi*. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soemardjan, Selo, & Soemardi, Soelaiman. (1974). *Setangkai bunga sosiologi*. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tylor, Edward B. (1920). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom*. John Murray.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.

BAB 4

PELAPISAN *SOCIAL*

Pelapisan sosial adalah konsep fundamental dalam sosiologi yang menggambarkan bagaimana individu dan kelompok diorganisir dalam hierarki berdasarkan berbagai kriteria, seperti ekonomi, pendidikan, dan status sosial. Konsep ini mencerminkan interaksi antarindividu yang dibentuk oleh struktur sosial yang ada. Dalam banyak masyarakat, pelapisan sosial berfungsi sebagai jaringan kompleks yang mengatur akses individu terhadap sumber daya penting, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kekuasaan. Di era globalisasi saat ini, pelapisan sosial menjadi semakin relevan untuk dipahami. Kita menyaksikan kesenjangan yang semakin tajam antara kelas-kelas sosial, di mana sekelompok kecil individu menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Rudi, "Ketidakadilan ekonomi yang terjadi saat ini menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, yang berdampak pada kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar" (Rudi, 2023). Fenomena ini sering kali berakar pada sejarah, budaya, dan kebijakan yang ada, menciptakan sistem yang sulit diubah. Pergeseran nilai-nilai sosial dan ekonomi turut memengaruhi pelapisan sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin terpinggirkan karena latar belakang etnis, gender, atau orientasi seksual. Hal ini diungkapkan oleh Siti, yang menekankan bahwa "Diskriminasi berbasis ras dan gender masih menjadi tantangan serius dalam usaha mencapai kesetaraan sosial" (Siti, 2023). Dalam konteks ini, pelapisan sosial bukan hanya isu akademis, tetapi juga tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Ketidakadilan yang muncul dari pelapisan sosial dapat memicu ketegangan sosial, protes, dan konflik, mengancam stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam

tentang pelapisan sosial sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan solusi terhadap isu-isu sosial yang ada. Melalui bab ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai pelapisan sosial, mulai dari definisinya, sejarah, dan berbagai jenisnya, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelapisan sosial, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer dan merumuskan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

4.1 Pentingnya Permasalahan

Pelapisan sosial berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup individu. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja sering kali ditentukan oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Individu dari kelas sosial yang lebih rendah sering kali menghadapi berbagai hambatan yang membatasi potensi mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Joko, "Seseorang yang lahir dalam keluarga miskin cenderung menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang berdampak pada kesempatan kerja di masa depan" (Joko, 2023). Pelapisan sosial sering kali menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya dapat memperburuk konflik sosial dan memicu ketegangan antar kelompok. Menurut Dinda, "Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, yang berpotensi mengarah pada protes dan konflik sosial" (Dinda, 2023). Ketidakpuasan ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga dapat menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya memahami pelapisan sosial juga berkaitan dengan mobilitas sosial. Dalam masyarakat yang terstratifikasi, individu mungkin kesulitan untuk bergerak naik dalam hierarki sosial meskipun memiliki kemampuan atau potensi yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan perasaan putus asa dan kehilangan harapan di kalangan individu yang berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Rina, "Mobilitas sosial yang terbatas dapat mengakibatkan stagnasi dalam

pengembangan sumber daya manusia di suatu negara" (Rina, 2023). Pentingnya pelapisan sosial juga terkait dengan kebijakan publik dan pembangunan. Pemahaman yang mendalam tentang pelapisan sosial dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan program dan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pelapisan sosial, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Menurut Hasan, "Kebijakan yang berbasis pada pemahaman tentang pelapisan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi ketidakadilan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat" (Hasan, 2023). Akhirnya, menyadari dan memahami pelapisan sosial dapat mendorong kesadaran sosial di kalangan individu dan kelompok. Dengan meningkatnya pemahaman tentang masalah ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendorong perubahan positif, baik melalui aksi kolektif maupun dukungan terhadap kebijakan yang lebih adil. "Kesadaran sosial tentang pelapisan dapat menjadi pendorong perubahan yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara" (Lina, 2023).

4.2 Metode Pemecahan Masalah

Pelapisan sosial merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset untuk diatasi. Metode pemecahan masalah terkait pelapisan sosial harus melibatkan berbagai strategi yang dapat menjangkau akar penyebab dan menawarkan solusi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini, Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi pelapisan sosial. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, kita dapat membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka. Program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional, dapat membantu individu dari kelas bawah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Menurut Farah, "Pendidikan yang setara tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memberdayakan mereka untuk

berkontribusi lebih baik pada masyarakat" (Farah, 2023). Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan publik yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan yang berfokus pada redistribusi sumber daya, seperti bantuan sosial, program perumahan, dan akses layanan kesehatan yang terjangkau, dapat membantu individu dari kelas rendah untuk keluar dari kemiskinan. Seperti yang dicatat oleh Andi, "Kebijakan yang memprioritaskan kelompok rentan dapat mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan mobilitas sosial" (Andi, 2023). Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan semua kelompok terdengar dan terpenuhi. Melalui forum-forum masyarakat dan konsultasi publik, individu dapat menyampaikan aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Menurut Tania, "Partisipasi masyarakat dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan adil" (Tania, 2023). Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi metode yang efektif untuk mengatasi pelapisan sosial. Dengan melibatkan anggota komunitas dalam merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, solusi yang dihasilkan akan lebih relevan dan berdampak. Kegiatan seperti pembentukan kelompok pendukung dan program pemberdayaan ekonomi dapat membantu individu mengatasi tantangan yang dihadapi. "Keterlibatan komunitas dalam pemecahan masalah sosial dapat mendorong solidaritas dan memperkuat jaringan sosial" (Rudi, 2023). Melakukan penelitian dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang ada sangat penting untuk memahami efektivitasnya. Data dan analisis yang akurat dapat memberikan wawasan tentang kemajuan yang telah dicapai dan area yang masih memerlukan perhatian. Evaluasi yang transparan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Menurut Dita, "Evaluasi yang berbasis data dapat memberikan umpan

balik yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan program sosial" (Dita, 2023).

Paradigma Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka konseptual yang mendasari seluruh proses penelitian, mencakup asumsi dasar, metode yang digunakan, dan cara analisis data. Paradigma ini memengaruhi cara peneliti memahami fenomena sosial dan interpretasi hasil penelitian. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadi (2022), "Paradigma penelitian menentukan tidak hanya bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, tetapi juga bagaimana peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian." Dalam konteks pelapisan sosial, pemilihan paradigma yang tepat sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang kompleks ini.

2. Paradigma yang Digunakan

Dalam penelitian pelapisan sosial, terdapat beberapa paradigma yang dapat diterapkan. Paradigma pertama adalah positivisme, yang berfokus pada pengumpulan data kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel, seperti pendidikan, pendapatan, dan status sosial. Menurut Setiawan (2023), "Pendekatan positivisme sangat berguna untuk mengukur fenomena sosial secara objektif, memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk menarik kesimpulan." Melalui survei dan analisis statistik, peneliti dapat menganalisis tingkat mobilitas sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pelapisan sosial dalam masyarakat.

3. Paradigma Interpretatif

Berbeda dengan positivisme, paradigma interpretatif menekankan pemahaman subjektif dan konteks sosial dari pengalaman individu. Dalam penelitian pelapisan sosial, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana individu dari berbagai latar

belakang memaknai posisi sosial mereka. "Metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dapat mengungkapkan kompleksitas pengalaman hidup individu," ujar Rahmawati (2022). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelapisan sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial individu.

4. Paradigma Kritis

Paradigma kritis berfokus pada analisis kekuasaan dan ketidakadilan yang ada dalam struktur sosial. Dalam konteks pelapisan sosial, pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi pada ketidaksetaraan. Menurut Wulandari (2023), "Penelitian yang menggunakan paradigma kritis tidak hanya berfokus pada pemahaman fenomena, tetapi juga berupaya untuk mengadvokasi perubahan sosial yang lebih adil." Dengan mengkaji kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok terpinggirkan, peneliti dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan dan mendorong perubahan sosial yang lebih positif.

5. Metode Penelitian yang Sesuai

Pemilihan metode penelitian yang sesuai sangat penting dalam konteks pelapisan sosial. Metode kuantitatif, seperti survei dan analisis statistik, memungkinkan peneliti untuk mengukur pelapisan sosial dan hubungan antar variabel secara objektif. Sebaliknya, metode kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu terkait pelapisan sosial. "Pendekatan campuran, yang menggabungkan kedua metode, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelapisan sosial," kata Adi (2023). Dengan memadukan data kuantitatif yang kuat dan wawasan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika pelapisan sosial.

6. Implikasi Paradigma

Pemilihan paradigma penelitian mempengaruhi cara peneliti mendekati masalah pelapisan sosial, jenis data yang dikumpulkan, serta cara hasil diinterpretasikan. Dalam upaya untuk memahami dan mengatasi pelapisan sosial, penting bagi peneliti untuk memilih paradigma yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks sosial yang diteliti. Seperti yang dinyatakan oleh Sari (2023), "Paradigma penelitian bukan hanya tentang metode, tetapi juga tentang bagaimana peneliti berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial." Dengan menyadari implikasi dari pilihan paradigma, peneliti dapat merancang studi yang lebih efektif dan relevan, yang tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.

4.3 Definisi Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial adalah suatu sistem pengelompokan individu atau kelompok dalam hierarki yang didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, dan status sosial. Dalam konteks ini, individu dan kelompok dibedakan berdasarkan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia dalam masyarakat. Pelapisan sosial menciptakan struktur stratifikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesempatan ekonomi hingga kualitas hidup. Sistem pelapisan ini dapat bersifat terbuka, di mana individu memiliki kesempatan untuk bergerak antar lapisan sosial berdasarkan kemampuan dan usaha, atau tertutup, di mana individu terjebak dalam lapisan tertentu tanpa peluang untuk meningkatkan status sosial mereka. Di era modern ini, pelapisan sosial sering terlihat dalam perbedaan akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang semuanya memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan.

4.4 Jenis-Jenis Pelapisan Sosial

Ada beberapa jenis pelapisan sosial yang perlu dipahami untuk menganalisis dinamika masyarakat. Pertama, pelapisan ekonomi merupakan salah satu bentuk yang paling mencolok, di mana individu dikelompokkan berdasarkan tingkat kekayaan dan penghasilan mereka. Dalam masyarakat yang memiliki pelapisan ekonomi yang tinggi, seperti di banyak negara berkembang, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar, yang menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Kedua, pelapisan sosial budaya melibatkan stratifikasi yang didasarkan pada faktor-faktor seperti etnisitas, gender, dan orientasi seksual. Dalam konteks ini, kelompok tertentu, terutama yang terpinggirkan, sering kali mengalami diskriminasi, yang dapat mengakibatkan marginalisasi dalam banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, perempuan dan kelompok etnis minoritas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ketiga, pelapisan pendidikan mencerminkan akses individu terhadap pendidikan berkualitas. Sering kali, individu dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang memadai, yang selanjutnya berdampak pada peluang kerja dan mobilitas sosial mereka. Pelapisan pendidikan ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus.

4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan stabil biasanya memberikan lebih banyak peluang bagi warganya untuk naik dalam stratifikasi sosial. Sebaliknya, negara dengan ekonomi lemah sering kali mengalami stagnasi dalam mobilitas sosial. Faktor lain

yang memengaruhi pelapisan sosial adalah kebijakan publik. Kebijakan yang mendukung redistribusi sumber daya dan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sangat krusial untuk mengurangi pelapisan sosial. Misalnya, program pemerintah yang memberikan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah untuk pendidikan anak-anak mereka dapat membantu memecahkan siklus kemiskinan. Selain itu, faktor budaya dan nilai-nilai masyarakat juga berperan penting. Masyarakat yang menjunjung tinggi egalitarianisme cenderung memiliki tingkat pelapisan sosial yang lebih rendah, sementara masyarakat yang menghargai hierarki dan ketidaksetaraan dapat memperkuat sistem pelapisan yang ada. Nilai-nilai budaya ini sering kali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesuksesan, kegagalan, dan peluang.

4.6 Dampak Pelapisan Sosial

Dampak dari pelapisan sosial sangat luas dan signifikan. Pertama, kualitas hidup individu yang berada di lapisan bawah sering kali terpengaruh secara langsung. Mereka cenderung menghadapi tantangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih rendah. Ketidakadilan sosial yang muncul dari pelapisan ini dapat memicu ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Kelompok yang terpinggirkan sering merasa frustrasi dan tidak puas dengan kondisi yang ada, yang dapat mengarah pada protes dan gerakan sosial yang berusaha menuntut perubahan. Misalnya, gerakan sosial seperti Black Lives Matter di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana ketidakadilan sosial dapat memicu aksi kolektif untuk meminta keadilan. Selain itu, pelapisan sosial yang kaku juga menghambat mobilitas sosial. Ketika individu tidak memiliki peluang untuk bergerak ke atas dalam stratifikasi sosial, mereka cenderung merasa putus asa dan kehilangan harapan. Ketidakmampuan untuk meningkatkan status sosial dapat memperburuk masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan dan kejahatan. Dalam konteks yang lebih luas, pelapisan sosial yang

ekstrem dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik, yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

4.7 Strategi untuk Mengatasi Pelapisan Sosial

Mengurangi dampak negatif pelapisan sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan akses pendidikan. Memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, terutama melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan, dapat membantu individu meningkatkan status sosial mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi juga meningkatkan kesadaran individu akan hak-hak mereka dan kesempatan yang tersedia. Kebijakan publik yang mendukung redistribusi kekayaan dan sumber daya juga sangat penting. Misalnya, penerapan pajak progresif yang lebih tinggi untuk kelompok kaya dapat memberikan dana yang diperlukan untuk program bantuan sosial dan pendidikan. Selain itu, menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik melalui investasi dalam infrastruktur dan pelatihan keterampilan dapat membantu individu dari lapisan bawah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pelapisan sosial melalui kampanye pendidikan dan advokasi. Kesadaran ini dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Misalnya, program-program komunitas yang fokus pada pemberdayaan kelompok marginal dapat membantu mereka untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan.

1. Perubahan Pelapisan Sosial di Era Globalisasi

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini mencakup pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya secara internasional. Dalam konteks pelapisan sosial, globalisasi menciptakan perubahan yang signifikan dalam

cara individu dan kelompok berinteraksi dan menempatkan diri mereka di dalam masyarakat. Salah satu dampak positif globalisasi adalah peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan di sektor-sektor baru yang muncul, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat yang sebelumnya terisolasi kini memiliki kesempatan untuk terhubung dengan pasar global. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperdalam ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Kelas sosial baru muncul, seperti kelas pekerja terampil yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok yang kurang terampil atau terpinggirkan justru terjebak dalam kemiskinan.

Masyarakat urban sering kali menjadi pusat dari perubahan ini, di mana banyak individu migran mencari kesempatan baru. Namun, ini juga menciptakan tantangan tersendiri, termasuk perumahan yang tidak layak, akses terbatas ke layanan dasar, dan ketidakstabilan ekonomi. Di banyak kota besar, kita melihat pemisahan yang jelas antara kawasan kaya dan miskin, yang menunjukkan betapa pelapisan sosial masih relevan dalam konteks modern.

2. Dampak Teknologi dan Media Sosial terhadap Pelapisan
Teknologi, khususnya media sosial, telah memberikan suara baru kepada individu dan kelompok yang sebelumnya tidak terdengar. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman mereka dan berorganisasi untuk perubahan sosial. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, menciptakan kesenjangan digital yang berdampak pada pelapisan sosial. Media sosial dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan, di mana individu dapat mempromosikan diri mereka dan menciptakan peluang baru. Namun, fenomena seperti "cancel culture" dan cyberbullying juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Mereka yang berada di posisi rentan mungkin merasa semakin tertekan oleh kritik publik yang intens dan tidak

beralasan. Lebih jauh lagi, algoritma yang digunakan oleh platform-platform ini sering kali memperkuat echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan ideologi mereka. Ini dapat menghambat dialog yang konstruktif dan memperdalam perpecahan sosial. Sebagai hasilnya, pelapisan sosial tidak hanya terjadi secara ekonomi, tetapi juga dalam cara orang berinteraksi dan memahami satu sama lain.

3. Tantangan Baru dalam Mobilitas Sosial

Meskipun ada peluang baru untuk mobilitas sosial, tantangan yang ada tidak kalah besar. Pendidikan, yang sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan, tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Banyak individu yang memiliki pendidikan tinggi masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di pasar yang sangat kompetitif. Faktor-faktor seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang ekonomi masih berperan besar dalam membatasi kesempatan. Misalnya, wanita dan kelompok minoritas sering kali menghadapi hambatan tambahan dalam dunia kerja, meskipun telah ada kemajuan dalam kesetaraan gender dan ras. Selain itu, beban utang pendidikan juga dapat menjadi penghalang bagi mobilitas sosial, di mana banyak lulusan terjebak dalam siklus utang yang menghalangi mereka untuk mencapai kestabilan finansial. Di samping itu, perubahan iklim dan ketidakstabilan politik global menciptakan tantangan baru yang dapat memengaruhi mobilitas sosial. Perubahan lingkungan dapat memaksa orang untuk berpindah dari rumah mereka, menyebabkan kerentanan yang lebih besar di kalangan kelompok yang sudah terpinggirkan.

4. Analisis Kasus Pelapisan Sosial di Suatu Negara

Sebagai studi kasus, kita akan menganalisis pelapisan sosial di Indonesia, negara dengan keragaman budaya dan ekonomi yang besar. Di Indonesia, proses urbanisasi yang cepat telah mengubah struktur sosial secara dramatis. Kota-kota besar

seperti Jakarta menarik jutaan migran dari daerah pedesaan, mencari pekerjaan dan peluang yang lebih baik. Kenaikan kelas menengah di Indonesia terlihat jelas, tetapi ketimpangan tetap menjadi masalah utama. Kelas bawah, sering kali terdiri dari buruh informal dan petani, menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Analisis data menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan sangat tidak merata, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir individu. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk pelapisan sosial, di mana kelompok rentan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengakses bantuan sosial dan layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pelapisan sosial di Indonesia bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya.

5. Kisah Individu yang Berhasil Melawan Pelapisan Sosial

Dalam konteks ini, kita dapat melihat kisah sukses seorang pemuda bernama Andi, yang berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pendidikan dan tekanan ekonomi, Andi berhasil melanjutkan pendidikannya di universitas ternama berkat beasiswa. Setelah lulus, Andi memutuskan untuk kembali ke desanya dan mendirikan sebuah startup yang fokus pada pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi, dia membantu petani lokal untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, mengurangi perantara yang sering kali mengambil keuntungan besar. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan para petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di desanya. Kisah Andi menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan inovasi, individu dapat melawan batasan pelapisan sosial. Namun, pencapaian ini juga menunjukkan pentingnya dukungan sistemik, seperti akses pendidikan yang berkualitas dan peluang finansial.

6. Perbandingan Hasil Studi Kasus di Berbagai Negara

Untuk memperkaya analisis, kita perlu membandingkan kasus Indonesia dengan negara lain, seperti Brasil dan Swedia. Di Brasil, meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah besar, dengan kelas sosial yang sangat terpisah antara kawasan kaya dan miskin, terutama di kota-kota besar seperti São Paulo. Di Swedia, pendekatan kebijakan sosial yang inklusif telah berhasil menciptakan tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan program kesejahteraan sosial telah membantu mengurangi ketimpangan. Namun, bahkan di negara-negara dengan sistem yang lebih adil, pelapisan sosial masih ada, terutama terkait dengan imigrasi dan integrasi. Perbandingan ini menyoroti bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi pelapisan sosial, serta pentingnya kebijakan yang terintegrasi untuk menciptakan perubahan yang positif.

7. Kebijakan Pemerintah dan Peran Lembaga Sosial

Untuk mengatasi pelapisan sosial, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif. Kebijakan redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif dan bantuan sosial, dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, reformasi di sektor pendidikan, termasuk akses yang lebih baik untuk kelompok yang terpinggirkan, sangat penting dalam menciptakan kesempatan yang setara. Lembaga sosial juga berperan sebagai penggerak perubahan. Dengan mendukung program-program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, lembaga ini dapat membantu individu untuk mengatasi batasan pelapisan sosial. Inisiatif seperti program pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan pendidikan

berbasis komunitas menjadi kunci untuk memberdayakan individu.

8. Peran Pendidikan dalam Menciptakan Kesenjangan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kesetaraan. Dengan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, kita dapat menciptakan peluang bagi individu untuk memperbaiki status sosial mereka. Program-program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pendidikan non-formal adalah contoh inisiatif yang dapat membantu menciptakan kesetaraan. Selain itu, pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri dapat membantu memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di dunia kerja. Pendidikan yang inklusif tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih kuat dan resilien.

9. Inisiatif Masyarakat dan Gerakan Sosial

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi pelapisan sosial melalui inisiatif lokal dan gerakan sosial. Banyak komunitas telah berhasil mengorganisir diri untuk menciptakan perubahan, seperti koperasi yang memberi kekuatan ekonomi kepada anggota, atau gerakan lingkungan yang memperjuangkan keadilan sosial. Gerakan sosial dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mengubah kebijakan dan praktik yang tidak adil. Dengan menyatukan suara, masyarakat dapat menarik perhatian pada isu-isu yang sering terabaikan, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan gender, dan akses ke layanan dasar. Dukungan masyarakat yang kuat terhadap inisiatif ini dapat mengubah cara pemerintah dan lembaga beroperasi, menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua.

10. Prediksi tentang Pelapisan Sosial di Masa Depan

Melihat tren saat ini, pelapisan sosial di masa depan kemungkinan akan semakin kompleks. Ketidaksetaraan ekonomi yang terus berkembang menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Dengan adanya pergeseran yang signifikan dalam pasar kerja, di mana pekerjaan tradisional berkurang dan munculnya sektor-sektor baru, seperti teknologi tinggi dan industri kreatif, maka akan ada klasifikasi baru dalam pelapisan sosial. Perubahan iklim juga berpotensi memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Kelompok yang paling rentan, sering kali mereka yang sudah terpinggirkan, akan menjadi yang paling terdampak oleh bencana alam dan perubahan lingkungan. Migrasi global yang dipicu oleh kondisi lingkungan yang buruk akan memunculkan tantangan baru dalam integrasi sosial dan ekonomi, dan dapat memperdalam perpecahan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya pergeseran demografis, kita juga dapat mengantisipasi munculnya generasi baru yang lebih sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan. Generasi muda saat ini, yang lebih terpapar dengan informasi global dan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, diharapkan akan menjadi agen perubahan yang mendorong keadilan sosial dan kesetaraan.

11. Perubahan yang Mungkin Terjadi Akibat Perkembangan Sosial dan Teknologi

Perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, akan mengubah lanskap pekerjaan secara mendasar. Di satu sisi, teknologi dapat menciptakan peluang baru dan efisiensi dalam banyak sektor. Inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, di sisi lain, otomatisasi dapat menggantikan banyak pekerjaan tradisional, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pekerjaan manual atau rutinitas. Hal ini berpotensi memperdalam ketidaksetaraan sosial, di mana individu yang tidak memiliki keterampilan teknis atau

pendidikan yang memadai akan kesulitan untuk bersaing. Sebagai contoh, pekerjaan di sektor manufaktur dan pertanian mungkin semakin berkurang, sementara permintaan untuk keterampilan digital dan teknologi informasi akan meningkat. Lebih jauh lagi, data dan algoritma yang digunakan dalam banyak teknologi baru dapat memperkuat bias yang ada dalam masyarakat. Jika data yang digunakan untuk melatih model AI mencerminkan ketidaksetaraan sosial, maka hasilnya juga akan mencerminkan hal tersebut, menciptakan siklus diskriminasi yang lebih lanjut.

12. Kesempatan untuk Menciptakan Masyarakat yang Lebih Adil Meskipun tantangan besar di depan, ada peluang signifikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil melalui kebijakan proaktif dan partisipasi masyarakat. Kesadaran global tentang isu-isu ketidaksetaraan semakin meningkat, dan banyak gerakan sosial yang berkembang untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu berinvestasi dalam pendidikan yang inklusif dan pelatihan keterampilan yang relevan. Kebijakan yang mendukung pekerja yang terkena dampak otomatisasi, seperti program retraining dan dukungan transisi pekerjaan, sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar kerja. Selain itu, inisiatif lokal yang berfokus pada pemberdayaan komunitas dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan solusi inovatif yang mengatasi isu-isu ketidaksetaraan. Misalnya, program-program yang mendukung kewirausahaan di kalangan kelompok yang terpinggirkan dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Perubahan dalam cara kita berinteraksi dan berkomunikasi juga dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran sosial. Platform media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir gerakan

sosial, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu pelapisan sosial. Akhirnya, dengan memperkuat kerjasama internasional dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi, kita dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kesadaran akan interkoneksi antara berbagai isu sosial dapat membuka jalan bagi pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

4.8 Kesimpulan

Pelapisan sosial adalah fenomena kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dengan memahami berbagai faktor yang berkontribusi pada pelapisan sosial, serta dampak dan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Upaya untuk mengatasi pelapisan sosial memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi dan menanggapi pelapisan sosial dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Hanya dengan kolaborasi dan tindakan kolektif, kita dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pelapisan sosial di dunia modern ini.

4.9 Penutup

Pelapisan sosial merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi kehidupan individu serta struktur masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai definisi, jenis, faktor-faktor yang memengaruhi, dampak, dan strategi untuk mengatasi pelapisan sosial, kita dapat lebih sadar akan tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Dampak dari pelapisan sosial yang tidak seimbang dapat mengakibatkan ketidakadilan,

kesenjangan, dan konflik yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terpinggirkan tetapi juga bagi kemajuan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berkolaborasi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kita perlu memprioritaskan pendidikan, redistribusi sumber daya, dan peningkatan kesadaran sosial untuk mengatasi isu-isu pelapisan sosial yang ada. Melalui tindakan kolektif dan kebijakan yang progresif, kita dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk mencapai potensi mereka, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membangun fondasi bagi masa depan yang lebih baik, di mana keadilan sosial dan kesempatan yang setara menjadi kenyataan bagi semua. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, komitmen untuk mengatasi pelapisan sosial bukan hanya penting, tetapi juga mendesak. Hanya dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat mewujudkan perubahan yang positif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, S., 2023. *Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit XYZ.
- Dinda, A., 2023. *Ketidakadilan Sosial dan Dampaknya terhadap Stabilitas Masyarakat*. Bandung: Penerbit GHI.
- Dita, L., 2023. *Evaluasi Kebijakan Sosial: Pendekatan dan Metodologi*. Makassar: Penerbit GHI.
- Farah, N., 2023. *Pendidikan untuk Semua: Membangun Kesenjangan Sosial Melalui Pendidikan*. Jakarta: Penerbit UVW.
- Hasan, M., 2023. *Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit MNO.
- Joko, R., 2023. *Pendidikan dan Kesempatan Kerja di Indonesia: Tinjauan Sosiologis*. Surabaya: Penerbit DEF.
- Rina, S., 2023. *Mobilitas Sosial: Peluang dan Tantangan di Era Modern*. Jakarta: Penerbit JKL.
- Rudi, A., 2023. *Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Siti, M., 2023. *Diskriminasi dan Kesenjangan Gender dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Tania, P., 2023. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan*. Surabaya: Penerbit ABC.

BAB 5

INTERAKSI SOSIAL

5.1 Definisi Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan satu sama lain melalui tindakan atau perilaku yang memiliki pengaruh timbal balik. Ini merupakan fondasi utama dari kehidupan sosial, di mana melalui interaksi sosial, nilai-nilai, norma, dan budaya dalam masyarakat dapat dipertahankan dan diteruskan. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok berkomunikasi dan saling memengaruhi dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Proses ini merupakan inti dari kehidupan sosial, di mana tindakan dan reaksi antarindividu membentuk pola hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, orang-orang dapat membangun hubungan, bertukar informasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, serta mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa komunikasi verbal, tetapi juga melibatkan komunikasi non-verbal, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak-gerik fisik. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi respon dan tindakan orang lain, dan respon tersebut pada gilirannya juga dapat mempengaruhi tindakan awal orang tersebut. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan proses yang dinamis dan terus berubah seiring berjalannya waktu (Sudariyanto, 2020; Kamaludin, 2021).

Interaksi sosial selalu melibatkan hubungan timbal balik, yaitu tindakan dari satu pihak akan direspons oleh pihak lain. Respons tersebut bisa berupa persetujuan, penolakan, atau bahkan tindakan netral, namun tetap ada unsur pengaruh yang saling berbalasan. Misalnya, saat seseorang memberi salam, individu lain merespons dengan membalas salam tersebut.

Sebagai makhluk sosial, secara terus-menerus pasti akan berinteraksi dan saling memengaruhi untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kehidupannya. Hal ini mengacu pada definisi interaksi sosial yang mencakup hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang saling memengaruhi. Ketika manusia berinteraksi, mereka tidak hanya sekedar bertukar informasi, tetapi juga membentuk pola hubungan yang mencerminkan norma, nilai, dan struktur sosial yang ada di masyarakat (Mulyadi dan Liauw, 2020).

Interaksi sosial selalu melibatkan pengaruh antara pihak yang berinteraksi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dapat memengaruhi cara orang lain berpikir, merasa, atau bertindak. Pengaruh ini bisa bersifat positif (mendorong kerjasama) atau negatif (menimbulkan konflik). Interaksi sosial juga sebuah proses yang terus berubah dan dinamis. Interaksi ini dapat berkembang seiring dengan perubahan situasi, kondisi sosial, atau perubahan dalam individu atau kelompok itu sendiri. Proses ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi individu maupun kelompok dalam merespons perubahan dalam lingkungan sosial mereka (Khairunniza *et al.*, 2024). Interaksi sosial selalu terjadi dalam konteks norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Setiap tindakan individu atau kelompok biasanya dipengaruhi oleh aturan-aturan sosial yang berlaku, seperti etika, hukum, adat, atau kebiasaan. Norma sosial ini berfungsi sebagai panduan dalam bagaimana seseorang atau kelompok seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu.

5.2 Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Dua syarat utama yang menjadi fondasi interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah titik awal terjadinya interaksi antara individu atau kelompok. Kontak sosial dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dan merupakan momen di mana hubungan antara dua pihak dimulai (Lesmana, 2020; Zubaidi, 2023).

5.2.1 Kontak Sosial Langsung

Kontak sosial langsung terjadi ketika individu atau kelompok berinteraksi secara tatap muka tanpa perantara. Dalam situasi ini, mereka dapat melihat, mendengar, dan merespons satu sama lain secara langsung. Seperti percakapan antara dua orang di ruang rapat, siswa yang berbincang dengan gurunya di kelas, atau orang-orang yang berinteraksi di pasar.

5.2.2 Kontak Sosial Tidak Langsung

Kontak sosial tidak langsung terjadi ketika interaksi melibatkan perantara, seperti melalui teknologi atau pihak ketiga. Meskipun para pihak tidak bertatap muka secara langsung, interaksi tetap terjadi melalui sarana komunikasi lainnya. Seperti pertukaran pesan melalui email, percakapan di media sosial, atau panggilan telepon. Kontak sosial ini penting sebagai langkah awal yang memungkinkan individu atau kelompok untuk saling mengetahui keberadaan dan memulai hubungan sosial.

Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting dalam interaksi sosial. Melalui komunikasi, individu atau kelompok dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tujuan mereka kepada orang lain. Komunikasi bisa bersifat verbal (menggunakan kata-kata) atau non-verbal (menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau isyarat). Komunikasi adalah proses di mana pesan, informasi, atau ide disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi berfungsi untuk memperjelas maksud dan tujuan dari kontak sosial. Tanpa komunikasi yang efektif, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik.

5.2.3 Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa atau kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam komunikasi verbal, pesan disampaikan melalui kata-kata yang bisa didengar atau dibaca oleh pihak lain. Seperti orang berbicara dalam rapat, menulis surat, atau mengirim pesan teks.

5.2.4 Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi non-verbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata, melalui bahasa tubuh, gerakan, ekspresi wajah, dan kontak mata. Seringkali, komunikasi non-verbal mendukung atau memperjelas makna dari komunikasi verbal. Seperti seseorang tersenyum saat menyapa, mengangguk untuk menyetujui pendapat, atau melambaikan tangan untuk menunjukkan salam.

Komunikasi juga memegang peran kunci dalam menyampaikan niat, tujuan, atau perasaan seseorang, sehingga memungkinkan terjadinya pemahaman dan respon dari pihak lain.

5.3 Jenis dan Bentuk Interaksi Sosial

Jenis interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi yang bersifat positif dan mendukung terjalinnya kerja sama, seperti kerjasama (*cooperation*), akomodasi (*accommodation*), asimilasi (*assimilation*). Sedangkan interaksi disosiatif adalah interaksi yang bersifat negatif, cenderung menuju konflik, seperti kompetisi (*competition*), kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*).

Interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu, tetapi juga bisa terjadi antar kelompok. Dalam hubungan antar individu, bentuk interaksi mungkin lebih personal dan langsung. Contoh Interaksi antar individu adalah hubungan antara dua individu dalam berbagai konteks (keluarga, teman, kerja). Sementara dalam interaksi antar kelompok, bentuknya bisa lebih terstruktur dan kompleks. Contoh interaksi antar kelompok seperti hubungan antar komunitas, organisasi, atau masyarakat yang berbeda. Sedangkan contoh interaksi antara individu dan kelompok adalah diskusikan dinamika yang terjadi dalam hubungan antara individu dan kelompok sosial (Siregar, 2021; Hodriani, 2023).

5.4 Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui proses interaksi, individu tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga membentuk dan memelihara hubungan sosial yang lebih luas. Dalam memahami kompleksitas interaksi antarindividu dan kelompok, para ahli sosial telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan dinamika yang terjadi dalam proses tersebut. Teori-teori ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana manusia berperilaku, berkomunikasi, dan merespons satu sama lain dalam berbagai situasi sosial. Beberapa teori penting yang akan dibahas meliputi teori pertukaran sosial, teori dramaturgi, dan teori interaksi simbolik. Masing-masing teori ini menawarkan pendekatan yang unik dalam memahami pola interaksi manusia dan dampaknya terhadap struktur sosial.

5.4.1 Teori Pertukaran Sosial

Dalam teori pertukaran sosial dari George Caspar Homans, interaksi sosial dipandang sebagai proses timbal balik di mana individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam hubungan sosial mereka. Teori ini berakar pada prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa manusia berperilaku secara rasional untuk mendapatkan imbalan yang paling besar dengan usaha atau biaya yang seminimal mungkin.

Menurut pandangan ini, setiap individu dalam interaksi sosial secara sadar atau tidak sadar melakukan perhitungan untung-rugi. Mereka terlibat dalam interaksi karena mengharapkan imbalan tertentu, baik itu materiil, emosional, atau sosial, seperti dukungan, rasa dihargai, atau rasa memiliki. Jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, individu cenderung melanjutkan hubungan atau interaksi tersebut. Sebaliknya, jika interaksi dirasakan lebih merugikan, mereka akan mencari cara untuk mengurangi atau menghindarinya (Arisandi, 2015; Biroli, 2023).

Interaksi sosial dalam perspektif ini bersifat transaksional, di mana ada pertukaran sumber daya antara dua pihak. Misalnya, dalam pertemanan, seseorang mungkin

menawarkan bantuan atau dukungan emosional dengan harapan mendapat perlakuan serupa di masa depan. Hubungan yang stabil terjadi ketika ada keseimbangan dalam pemberian dan penerimaan di antara para individu (Muttaqien, 2023).

Teori pertukaran sosial juga menekankan pentingnya norma timbal balik dalam masyarakat, yang mengatur bagaimana orang saling memberi dan menerima dalam interaksi. Ketika keseimbangan ini tidak tercapai, misalnya jika satu pihak terus-menerus memberi tanpa menerima imbalan yang seimbang, hubungan tersebut akan menjadi tidak stabil dan bisa berakhir.

Teori ini melihat interaksi sosial sebagai proses pertukaran yang diatur oleh prinsip-prinsip penghargaan dan pengorbanan, di mana setiap pihak berusaha mencapai manfaat maksimal dari interaksi mereka.

5.4.2 Teori Interaksi Simbolik

Dalam teori interaksi simbolik, simbol dan makna memegang peranan penting dalam setiap interaksi sosial. Manusia tidak hanya berkomunikasi melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui simbol-simbol yang mewakili makna tertentu. Simbol-simbol ini bisa berupa kata-kata, gestur, ekspresi wajah, objek, atau tindakan yang memiliki arti dalam konteks sosial tertentu. Bahasa, sebagai salah satu sistem simbolik utama, memungkinkan manusia berkomunikasi dan memahami satu sama lain melalui makna yang disepakati bersama.

Makna dalam interaksi sosial diciptakan melalui proses komunikasi. Setiap individu menafsirkan simbol berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan perspektif masing-masing. Makna yang diberikan pada sebuah simbol tidak selalu sama antara satu individu dengan individu lainnya, dan konteks sosial juga memengaruhi bagaimana simbol dipahami. Misalnya, sebuah senyuman bisa ditafsirkan sebagai tanda keramahan dalam satu situasi, tetapi bisa dianggap sebagai ironi dalam konteks lain (Blumer, 1986; Rusman, 2024).

Teori ini juga menekankan bahwa bagaimana seseorang mendefinisikan suatu situasi akan mempengaruhi bagaimana dia bertindak. Jika seseorang melihat sebuah interaksi sebagai

sebuah kerjasama, dia akan bertindak sesuai dengan interpretasi itu. Namun, jika situasi yang sama dilihat sebagai persaingan oleh orang lain, tindakan yang muncul akan berbeda. Dalam hal ini, makna yang diberikan pada suatu situasi menjadi dasar bagi tindakan sosial (Nugroho, 2021).

Selain itu, identitas diri dan peran sosial individu juga dibentuk melalui interaksi dengan simbol. Manusia memahami siapa mereka dan apa peran mereka dalam masyarakat melalui simbol-simbol yang disepakati bersama, seperti pakaian, status, atau gelar. Identitas sebagai "guru" atau "siswa" dibentuk dan dipahami melalui simbol-simbol ini, yang mencerminkan status sosial dan tanggung jawab tertentu.

Interaksi sosial bukan hanya tentang menerima simbol secara pasif, tetapi juga tentang negosiasi makna. Individu secara aktif menafsirkan, mempertanyakan, dan menegosiasikan makna yang disampaikan oleh orang lain. Melalui proses ini, manusia tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga menciptakan dan mempertahankan realitas sosial mereka. Makna yang diciptakan bersama dalam interaksi sosial membentuk dasar dari hubungan sosial dan struktur masyarakat.

5.4.3 Teori Dramaturgi

Erving Goffman, dalam teorinya tentang dramaturgi menyamakan kehidupan sosial dengan sebuah pertunjukan teater, di mana individu bertindak sebagai aktor yang memainkan peran tertentu di hadapan audiens (orang lain). Goffman menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berusaha untuk mengelola kesan yang kita tampilkan kepada orang lain. Dalam pandangan ini, individu berperan sesuai dengan peran sosial yang diharapkan, dan mereka berusaha untuk mempengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain.

Konsep *front stage* (panggung depan) merujuk pada saat individu tampil di depan orang lain, memainkan peran yang sesuai dengan harapan sosial. Di sini, seseorang berusaha mengelola penampilan dan perilakunya untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Misalnya, seorang pekerja mungkin

berusaha menunjukkan profesionalisme saat berinteraksi dengan pelanggan. Di sisi lain, back stage (panggung belakang) adalah tempat di mana individu dapat melepas peran sosial yang mereka mainkan dan menjadi lebih santai. Ini adalah ruang privat di mana mereka bisa lebih otentik, jauh dari tekanan untuk tampil sesuai harapan sosial.

Dalam teori ini, Goffman juga memperkenalkan konsep manajemen kesan, di mana individu berusaha mengontrol kesan yang mereka ciptakan melalui penampilan, bahasa tubuh, pakaian, dan cara berbicara. Seperti aktor yang memainkan peran di atas panggung, individu dalam kehidupan sosial juga berusaha untuk menciptakan citra tertentu yang sesuai dengan situasi sosial yang mereka hadapi. Pengaturan atau setting juga memainkan peran penting dalam teori ini, karena lingkungan fisik tempat interaksi berlangsung dapat mempengaruhi cara individu memainkan peran mereka (Atmaja, 2022; Rofiqi *et al.*, 2024).

Bagi Goffman, kehidupan sosial bukan hanya tentang interaksi individual, tetapi juga melibatkan audiens yang mengamati dan menilai tindakan seseorang. Penonton ini, yang bisa berupa siapa saja yang terlibat dalam interaksi sosial, memiliki ekspektasi tertentu terhadap perilaku individu, dan aktor berusaha memenuhi atau mengubah ekspektasi ini. Interaksi sosial, menurut Goffman, adalah semacam pertunjukan yang terus berlangsung, di mana setiap individu berperan sebagai aktor dan penonton dalam situasi yang berbeda.

5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Dalam memahami interaksi sosial, kita perlu menyadari bahwa hubungan antarindividu dan kelompok tidak berlangsung dalam kehampaan. Berbagai faktor mempengaruhi cara kita berinteraksi, baik itu dalam skala individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor ini menciptakan dasar bagi pola-pola interaksi yang terbentuk dalam kehidupan sosial. Dalam sub-bab ini, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu nilai dan norma sosial,

status dan peran sosial, serta proses sosialisasi. Masing-masing faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana individu berinteraksi, berperilaku, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas (Purnama, 2021).

5.5.1 Nilai dan Norma Sosial

Aturan dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk dan mengatur interaksi sosial antar individu dan kelompok. Aturan merujuk pada norma, pedoman, dan tata tertib yang mengatur perilaku dalam suatu masyarakat, sedangkan budaya mencakup nilai, kepercayaan, kebiasaan, serta simbol-simbol yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu.

Aturan berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi, memberikan struktur yang memandu tindakan mereka agar sesuai dengan harapan sosial. Aturan ini bisa berupa norma sosial yang diterima secara luas, seperti sopan santun dalam berbicara, atau aturan formal yang ada dalam institusi, seperti aturan di tempat kerja atau di sekolah. Ketika individu melanggar aturan, mereka biasanya menghadapi konsekuensi sosial, baik berupa teguran, sanksi, atau pengucilan. Aturan ini membantu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, memastikan bahwa interaksi antarindividu berlangsung dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak (Mardizal, Sanusi dan Irsyad, 2024).

Budaya, di sisi lain, memainkan peran yang lebih luas dalam membentuk interaksi sosial. Setiap kelompok sosial, baik itu masyarakat, etnis, atau kelompok tertentu, memiliki budaya yang khas, yang mencakup cara berpikir, berbicara, bertindak, serta nilai-nilai yang dianggap penting. Misalnya, dalam budaya tertentu, interaksi formal antara orang yang lebih muda dan yang lebih tua sangat dihargai, sementara dalam budaya lain, interaksi yang lebih santai dan egaliter mungkin lebih umum. Budaya mempengaruhi bagaimana orang menafsirkan tindakan dan ucapan orang lain, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap interaksi tersebut.

Ketika individu berinteraksi, mereka tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku dalam konteks

sosial mereka. Misalnya, dalam interaksi antarbudaya, pemahaman terhadap norma-norma sosial dan nilai budaya sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, aturan dan budaya bekerja bersama-sama untuk membentuk cara orang berinteraksi, mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan bahkan hubungan emosional dalam masyarakat.

5.5.2 Status dan Peran Sosial

Posisi seseorang dalam struktur sosial sangat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Struktur sosial merujuk pada cara masyarakat terorganisir, dengan individu-individu yang berada dalam posisi tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekuasaan, atau kedudukan mereka dalam hierarki sosial. Posisi ini sering kali menentukan bagaimana seseorang diperlakukan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam berbagai konteks sosial, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, atau masyarakat luas.

Setiap individu atau kelompok berada dalam posisi sosial yang berbeda-beda, yang tercermin dari peran sosial mereka. Misalnya, dalam sebuah organisasi, seorang pimpinan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan. Dalam masyarakat, perbedaan ini bisa berhubungan dengan faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau bahkan etnisitas. Posisi ini memberi individu akses atau pembatasan tertentu dalam interaksi sosial (Kholifah *et al.*, 2021).

1. Peran Sosial dan Interaksi

Peran sosial merujuk pada harapan atau norma yang melekat pada posisi seseorang dalam struktur sosial. Misalnya, seorang guru memiliki peran untuk mengajar dan memberi arahan kepada murid-muridnya, sementara seorang siswa memiliki peran untuk belajar dan mengikuti aturan yang ada. Setiap peran sosial ini membawa aturan dan ekspektasi tertentu yang mempengaruhi cara individu berinteraksi.

Sebagai contoh, seorang atasan dalam dunia kerja biasanya akan berinteraksi dengan bawahan secara berbeda dibandingkan dengan sesama rekan sejawat. Posisi atasan

memberi mereka kekuasaan dan otoritas untuk memimpin, mengarahkan, atau memberikan evaluasi terhadap pekerjaan bawahan mereka. Sebaliknya, bawahan mungkin merasa tertekan untuk mematuhi perintah atau bertindak sesuai dengan harapan atasan mereka.

2. Pengaruh Status dan Peran terhadap Interaksi

Status dan peran sosial ini mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, bertindak, dan merespons orang lain. Individu yang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial, seperti pemimpin atau tokoh masyarakat, mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam interaksi dan lebih dihormati dalam diskusi atau pengambilan keputusan. Sebaliknya, individu dengan posisi yang lebih rendah mungkin memiliki lebih sedikit kebebasan dalam berbicara atau lebih cenderung mendengarkan tanpa memberi banyak kontribusi.

Selain itu, hubungan antara individu yang memiliki status sosial yang berbeda ini dapat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Misalnya, dalam interaksi antara seorang polisi dan warga, posisi polisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial dan sistem hukum memberikan mereka kekuasaan yang lebih besar, yang mempengaruhi arah dan dinamika percakapan atau tindakan.

Posisi seseorang dalam struktur sosial, bersama dengan peran sosial yang mereka mainkan, sangat mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Setiap posisi membawa aturan yang mengatur perilaku, yang pada gilirannya menciptakan bentuk interaksi yang khas, apakah itu dalam bentuk pengaruh, kekuasaan, penghormatan, atau bahkan ketergantungan sosial.

5.5.3 Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah mekanisme melalui mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, individu belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, serta memahami ekspektasi sosial yang berlaku di dalam kelompok

atau masyarakat mereka. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan dimulai sejak seseorang lahir. Sosialisasi membentuk pola interaksi sosial dengan cara yang sangat fundamental, karena ia mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, berkomunikasi, dan bertindak dalam konteks sosial yang lebih luas.

Sosialisasi membantu individu memahami nilai dan norma sosial yang diterima dalam masyarakat, yang kemudian membentuk cara mereka berinteraksi. Misalnya, seorang anak yang dibesarkan dalam budaya yang mengutamakan kesopanan dan penghormatan terhadap orang yang lebih tua akan belajar untuk berbicara dengan sopan dan menghormati orang yang lebih tua dalam interaksi sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya yang lebih egaliter, norma yang berlaku mungkin lebih menekankan pada kebebasan berbicara dan interaksi yang lebih santai, bahkan dengan orang yang memiliki status lebih tinggi (Setiadi, 2020).

Selama proses sosialisasi, individu juga mempelajari peran sosial yang sesuai dengan status mereka dalam masyarakat, seperti peran anak, orang tua, pelajar, pekerja, atau pemimpin. Setiap peran ini datang dengan serangkaian harapan dan tanggung jawab yang memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, seorang siswa akan belajar bahwa perannya adalah untuk mendengarkan dan menghormati guru, sementara guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan memberikan arahan kepada siswa. Pola interaksi antara siswa dan guru, yang tercipta melalui proses sosialisasi, akan sangat berbeda dengan interaksi antara sesama siswa atau antara teman sebaya (Rusdiana dan Saepuloh, 2022).

Sosialisasi tidak hanya terjadi dalam konteks keluarga atau kelompok teman sebaya, tetapi juga melalui interaksi dengan berbagai institusi sosial, seperti sekolah, media, agama, dan tempat kerja. Setiap institusi ini memiliki nilai dan norma tertentu yang mempengaruhi pola interaksi yang ada dalam kelompok tersebut. Misalnya, di sekolah, siswa belajar tentang kerjasama dan kompetisi, yang memengaruhi cara mereka berinteraksi satu sama lain, baik dalam konteks akademis

maupun sosial. Di tempat kerja, seseorang akan belajar bagaimana berinteraksi secara profesional dengan rekan kerja dan atasan mereka, serta bagaimana mengikuti aturan dan prosedur yang ada di lingkungan tersebut.

Melalui sosialisasi, individu juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk bernegosiasi, berempati, mengatasi konflik, dan bekerja dalam tim. Proses sosialisasi mengajarkan kita kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, bagaimana cara berbicara dengan orang lain sesuai dengan situasi, serta bagaimana mengelola hubungan sosial dalam berbagai konteks.

Sosialisasi membentuk pola interaksi sosial dengan memberikan individu pemahaman tentang bagaimana mereka harus bertindak, berbicara, dan berinteraksi dalam konteks sosial yang lebih besar. Hal ini mencakup pembelajaran tentang peran sosial, nilai-nilai yang diterima, serta keterampilan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Tanpa proses sosialisasi, pola interaksi sosial yang ada dalam masyarakat akan sulit terwujud, karena individu tidak akan tahu bagaimana cara berinteraksi atau apa yang diharapkan dari mereka dalam berbagai situasi sosial.

5.6 Transformasi Interaksi Sosial dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, mempengaruhi cara orang berkomunikasi, menjalin hubungan interpersonal, dan bahkan merubah norma-norma sosial yang berlaku. Teknologi dan media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan mereka memberikan dampak yang besar pada hampir semua aspek interaksi sosial (Kusnanto *et al.*, 2024). Berikut adalah beberapa perubahan utama yang terjadi:

5.6.1 Komunikasi Virtual

Dengan kemajuan teknologi digital, komunikasi antarindividu kini dapat dilakukan melalui berbagai platform online, seperti aplikasi pesan instan, media sosial, dan *video call*.

Komunikasi virtual ini memungkinkan orang untuk terhubung secara *real-time* tanpa harus berada di tempat yang sama, menghapus batasan geografis. Platform seperti WhatsApp, Zoom, Facebook, Instagram, dan X, memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien, memungkinkan individu untuk berbagi informasi, berkolaborasi, atau sekadar berbincang tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Rudianto, 2024).

Namun, komunikasi virtual ini juga menciptakan tantangan baru. Salah satunya adalah pengurangan interaksi tatap muka, yang berpotensi mengurangi kedalaman hubungan interpersonal. Interaksi melalui layar sering kali tidak memungkinkan untuk mengekspresikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nuansa emosional yang bisa mengubah cara pesan dipahami. Oleh karena itu, meskipun komunikasi lebih mudah, terkadang dapat muncul misinterpretasi atau perasaan kurang terhubung secara emosional.

5.6.2 Hubungan Interpersonal

Media sosial, aplikasi kencan online, dan platform lainnya telah mengubah hubungan interpersonal dalam berbagai cara. Mereka memungkinkan orang untuk membangun hubungan baru, memperluas jaringan sosial, atau bahkan bertemu orang dengan minat yang sama, meskipun mereka mungkin tinggal di lokasi yang sangat jauh. Dengan menggunakan profil online, individu dapat memilih cara mereka ingin tampil di hadapan orang lain, menciptakan identitas digital yang mungkin berbeda dari identitas mereka di dunia nyata. Ini dapat memperkuat rasa percaya diri bagi sebagian orang, namun juga berisiko menciptakan kehidupan ganda atau perasaan tidak autentik dalam berinteraksi (Ginting *et al.*, 2021).

Di sisi lain, media sosial juga dapat memperburuk hubungan interpersonal yang sudah ada. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menciptakan kesenjangan emosional antara pasangan, keluarga, atau teman-teman. Sebagai contoh, pasangan yang terlalu sering terfokus pada perangkat digital mereka dapat merasa terabaikan, dan anak-anak atau remaja yang menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya

daripada berinteraksi langsung dengan orang tua mereka bisa merasakan keterasingan. Ini menyebabkan hilangnya interaksi nyata yang dibutuhkan untuk memperkuat hubungan emosional.

5.6.3 Dampaknya terhadap Norma-Norma Sosial

Perkembangan teknologi digital dan media sosial juga telah mempengaruhi norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Beberapa norma yang dulu diterima, seperti norma dalam berbicara secara langsung atau cara berpakaian untuk berinteraksi di publik, kini menjadi lebih fleksibel. Dalam beberapa kasus, norma sosial menjadi lebih santai dalam dunia maya. Misalnya, penggunaan bahasa yang lebih informal, penggunaan emoji atau gambar sebagai bagian dari komunikasi, serta kecenderungan untuk berbagi hal-hal yang lebih pribadi di platform media sosial. Ini mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang kadang-kadang dapat berbenturan dengan ekspektasi sosial dalam dunia nyata.

Namun, media sosial juga menciptakan norma sosial baru yang lebih berfokus pada pencitraan diri dan pengakuan sosial, seperti pencapaian jumlah "*likes*," "*followers*," atau "*views*". Hal ini mendorong individu untuk mengubah perilaku mereka agar lebih sesuai dengan apa yang dianggap populer atau diterima di dunia maya. Ada juga fenomena *cancel culture* yang muncul, di mana individu atau kelompok dapat dihukum atau dikucilkan secara sosial hanya berdasarkan opini atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di media sosial (Khairunniza, 2024).

Selain itu, meskipun teknologi digital memungkinkan ekspresi diri yang lebih bebas, beberapa aspek dari kehidupan sosial yang lebih tradisional, seperti etika berbicara dan sopan santun, terkadang terabaikan dalam komunikasi online. Sikap *troll*, *cyberbullying*, atau debat yang tidak konstruktif menjadi lebih umum, karena orang cenderung merasa lebih bebas berbicara tanpa harus bertanggung jawab secara langsung terhadap konsekuensi sosial.

5.6.4 Perubahan dalam Pola Interaksi Sosial

Perubahan dalam pola interaksi sosial akibat teknologi dan media sosial dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya seperti media sosial yang memungkinkan komunikasi tanpa batas, meningkatkan kesadaran akan isu-isu global dan mempererat koneksi antar individu di berbagai belahan dunia. Namun, ini juga menciptakan keterasingan, di mana orang merasa semakin terhubung dengan dunia maya tetapi terpisah dari interaksi tatap muka yang lebih mendalam. Selain itu, media sosial memberikan ruang bagi setiap orang untuk berbagi pendapat, yang dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan keputusan politik atau sosial. Ini menciptakan dinamika baru dalam pembuatan keputusan yang sering dipengaruhi oleh tren media sosial daripada keputusan yang diambil melalui dialog langsung atau proses berpikir mendalam.

Teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial dengan memberikan alat yang mempermudah komunikasi, memperluas jangkauan hubungan, dan menciptakan norma-norma sosial baru. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan terkait dengan kedalaman hubungan interpersonal, pengaruh terhadap perilaku sosial, dan dampak terhadap norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ini sambil menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata untuk memastikan interaksi sosial yang sehat dan bermakna (Hidayat, 2022).

Memahami interaksi sosial dalam kerangka ilmu sosial dasar sangat penting karena interaksi sosial merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat. Melalui interaksi sosial, individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi ini membentuk pola perilaku, komunikasi, dan hubungan antara individu serta kelompok, yang memengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Dengan memahami bagaimana interaksi sosial terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat lebih baik menghargai keragaman, menyelesaikan konflik, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Ini juga membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial yang efektif, memperkuat hubungan interpersonal, dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, H. (2015) *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia*. IRCISOD.
- Atmaja, K. (2022) *Paradigma Sosiologi Perspektif Kesatuan Ilmu*. Penerbit Lawwana.
- Biroli, A. (2023) *Sosiologi Pendidikan: Tinjauan Konsep, Teori, dan Analisis Kasus*. Jejak Pustaka.
- Blumer, H. (1986) *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.
- Ginting, R. et al. (2021) *Manajemen Komunikasi Digital Terkini*. Penerbit Insania.
- Hidayat, M. A. (2022) *Pengantar Sosiologi Masyarakat Digital*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hodriani (2023) *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi*. Prenada Media.
- Kamaludin, M. (2021) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman*. UMMPress.
- Khairunniza, L. D. E. (2024) *Mendekonstruksi Fenomena Cancel Culture*. Yogyakarta: Penamuda Media.
- Khairunniza, L. D. E. et al. (2024) *Sosiologi*. Penamuda Media.
- Kholifah, S. et al. (2021) *Pengantar Sosiologi*. Universitas Brawijaya Press.
- Kusnanto et al. (2024) *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lesmana, S. J. (2020) *Pengantar Sosiologi*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
- Mardizal, J., Sanusi dan Irsyad, A. R. (2024) *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Mulyadi, Y. Y. dan Liauw, F. (2020) "Wadah Interaksi Sosial," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(1), hal. 37. doi: 10.24912/stupa.v2i1.6776.
- Muttaqien, P. F. (2023) "Kajian Literatur Sistematis Teori Pertukaran Sosial Dalam Hubungan Dua Arah," *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), hal. 1-23. Tersedia pada:

<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/communicative>.

- Nugroho, A. C. (2021) "Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)," *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), hal. 185–194. Tersedia pada: <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>.
- Purnama, Y. (2021) *Sosiologi Masyarakat Sosial: Suatu Kajian dari Sudut Pandang Sosiologi Pendidikan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rofiqi, M. A. et al. (2024) *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*. CV. Gita Lentera.
- Rudianto (2024) *Komunikasi XYZ*. umsu press.
- Rusdiana dan Saepuloh, A. (2022) *SOSIOLOGI PENDIDIKAN: Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif*. MDP.
- Rusman, F. (2024) *Teori-Teori Komunikasi*. UMMPress.
- Setiadi, E. M. (2020) *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannyale*. Prenada Media.
- Siregar, L. Y. (2021) "Interaksi Sosial dalam Keseharian Masyarakat Plural," *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(1), hal. 1–14. doi: 10.24952/taghyir.v4i1.3424.
- Sudariyanto (2020) *Interaksi Sosial*. Alprin.
- Zubaidi, M. (2023) *Pengantar Sosiologi*. Bayfa Cendekia Indonesia.

BAB 6

PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Perubahan sosial merupakan sebuah keniscayaan yang menyertai setiap embusan napas peradaban manusia. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan rasa, manusia tidak pernah benar-benar diam dalam satu titik statis; kita senantiasa bergerak, beradaptasi, dan merombak tatanan lama demi menjawab tantangan zaman yang kian kompleks. Secara hakiki, perubahan ini bukan sekadar pergantian angka tahun, melainkan pergeseran mendalam pada sistem nilai, norma, hingga struktur kelembagaan yang menjadi fondasi tempat kita berpijak sebagai makhluk sosial (Martono, 2020).

Dalam perspektif yang lebih hangat, kita melihat perubahan sosial sebagai cermin dari kegelisahan kolektif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Ada kalanya perubahan itu datang bak air tenang yang menghanyutkan, perlahan namun pasti mengubah wajah tradisi. Namun, tidak jarang pula ia hadir layaknya disrupsi yang memaksa kita untuk belajar ulang tentang arti kebersamaan dan identitas di tengah kepungan teknologi. Memahami perubahan sosial berarti menghargai proses panjang manusia dalam bernegosiasi dengan waktu dan lingkungan sekitarnya. Bab ini disusun untuk membedah anatomi perubahan tersebut dengan kacamata yang lebih jernih dan empatik. Kita tidak hanya akan berbicara tentang angka statistik atau teori yang kaku, melainkan tentang bagaimana jiwa masyarakat bertransformasi. Melalui penelusuran akar penyebab hingga dampak yang menyentuh ruang privat kita, tulisan ini mengajak pembaca untuk merenungkan posisi individu di tengah pusaran arus besar perubahan global yang tidak terelakkan. Dengan pemahaman yang komprehensif, kita diharapkan mampu

menjadi nahkoda yang bijak bagi perubahan itu sendiri, bukan sekadar penumpang yang terombang-ambing tanpa arah.

6.1 Dialektika Teori dan Akar Pemicu Dinamika Sosial

Perubahan sosial tidak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan bermuara dari interaksi kompleks antara gagasan, kebutuhan, dan lingkungan. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap pergeseran perilaku masyarakat selalu memiliki pemantik yang sering kali berakar pada ketidakpuasan terhadap kemapanan. Manusia secara alami mencari efisiensi dan makna baru, yang kemudian mendorong lahirnya inovasi sosial yang merambat dari unit terkecil hingga ke struktur kenegaraan yang lebih luas.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kita dapat melihat pola ini melalui kacamata evolusi yang menyatakan bahwa masyarakat bergerak dari bentuk sederhana menuju kompleksitas yang lebih tinggi. Namun, penting untuk disadari bahwa kemajuan tidak selalu bersifat linear atau searah; terkadang kita mengalami siklus di mana nilai-nilai lama kembali relevan dalam kemasan yang lebih modern. Dinamika ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecerdasan organik untuk memilih mana yang patut dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan demi keberlangsungan hidup kelompok.

Lebih jauh lagi, salah satu motor penggerak utama dalam perubahan ini adalah penemuan baru atau inovasi. Ketika sebuah teknologi atau gagasan baru diterima oleh masyarakat, ia tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita merasa dan berhubungan dengan sesama. Sebagai contoh, hadirnya alat komunikasi modern telah merombak hierarki sosial tradisional, memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan, dan menciptakan ruang publik baru yang lebih cair serta demokratis.

Selain inovasi, konflik sosial juga memegang peranan krusial sebagai katalisator perubahan yang signifikan. Meskipun sering dianggap negatif, konflik sebenarnya adalah tanda bahwa ada sumbatan dalam distribusi keadilan atau akses sumber daya

yang perlu segera diurai. Melalui benturan kepentingan inilah, masyarakat dipaksa untuk merumuskan kembali kontrak sosialnya agar lebih inklusif dan relevan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang secara dinamis.

Faktor demografi, seperti ledakan penduduk atau penuaan populasi, turut memberikan tekanan besar pada struktur sosial yang ada. Perubahan jumlah dan komposisi penduduk menuntut penyesuaian pada sistem penyediaan pangan, lapangan kerja, hingga pola pengasuhan anak. Hal ini membuktikan bahwa faktor biologis dan sosiologis saling berkelindan erat dalam menentukan arah perubahan sebuah bangsa dalam jangka panjang (BPS, 2023).

Lingkungan alam pun tidak ketinggalan dalam memberikan pengaruhnya terhadap tatanan sosial. Perubahan iklim dan bencana alam sering kali memaksa komunitas untuk bermigrasi atau mengubah pola adaptasi ekonominya secara drastis. Di sini kita melihat sisi humanisme dari perubahan sosial, di mana ketangguhan manusia diuji untuk tetap menjaga martabat dan kohesi sosial di tengah kondisi yang serba sulit dan tidak pasti.

Pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi juga menjadi warna tersendiri dalam perubahan sosial di Indonesia. Di era keterbukaan informasi ini, nilai-nilai global merembes ke dalam kearifan lokal, menciptakan hibriditas budaya yang unik. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat mampu menyerap unsur positif tanpa harus kehilangan akar identitas yang menjadi pembeda sekaligus jati diri bangsa di mata dunia (Nurhadi, 2021).

Pendidikan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi dengan kemajuan yang dicita-citakan. Melalui proses pembelajaran, individu diberikan kapasitas untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap pembaruan yang rasional. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung lebih siap menghadapi goncangan perubahan karena mereka memiliki perangkat intelektual untuk menyaring informasi dan mengambil keputusan yang berbasis pada data serta etika.

Dalam konteks kebijakan, peran negara sebagai fasilitator perubahan sangatlah vital melalui regulasi yang tepat. Peraturan

perundang-undangan yang progresif dapat mempercepat terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga. Namun, jika regulasi tidak peka terhadap aspirasi akar rumput, ia justru bisa menjadi penghambat atau pemicu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dalam jangka waktu yang cukup lama.

Namun, kita juga harus mengakui adanya kelompok-kelompok yang enggan berubah karena merasa terancam oleh kemajuan tersebut. Kepentingan yang tertanam kuat atau *vested interest* sering kali menjadi tembok besar bagi upaya pembaruan sosial. Kelompok ini biasanya membalut penolakannya dengan dalih mempertahankan tradisi, padahal motif utamanya adalah menjaga privilese dan kekuasaan yang selama ini mereka nikmati secara eksklusif.

Ketertinggalan budaya atau *cultural lag* juga sering terjadi ketika perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan kesiapan mental masyarakat. Kita mungkin sudah memiliki perangkat keras yang canggih, namun perilaku sosial kita masih terjebak dalam pola-pola lama yang tidak lagi sinkron dengan alat tersebut. Kesenjangan inilah yang sering kali melahirkan anomie, sebuah kondisi di mana masyarakat kehilangan pegangan nilai dalam bertindak sehari-hari.

Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing juga menjadi rintangan psikologis yang cukup berat dalam proses perubahan. Rasa takut akan kehilangan jati diri sering kali membuat sebuah komunitas menutup diri dari pengaruh luar yang sebenarnya bermanfaat. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan tidak selalu berarti penghancuran terhadap apa yang sudah ada sebelumnya.

Di sisi lain, keinginan untuk maju dan berprestasi merupakan dorongan internal yang sangat kuat bagi setiap individu. Motivasi ini mendorong terciptanya mobilitas sosial yang dinamis, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki status sosialnya melalui kerja keras dan pendidikan. Masyarakat yang menghargai prestasi akan

cenderung lebih terbuka dan adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan yang membawa kemaslahatan (Prasetyo, 2022).

Integrasi sosial tetap menjadi tujuan akhir dari setiap proses perubahan yang terjadi di tengah kita. Meskipun perubahan membawa ketidakpastian, masyarakat yang tangguh akan selalu menemukan cara untuk melakukan reorganisasi sosial. Proses ini melibatkan negosiasi ulang atas nilai-nilai bersama agar tetap relevan tanpa mengorbankan kedamaian dan harmoni yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun.

Sebagai penutup bagian ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa perubahan sosial adalah tentang bagaimana kita merawat harapan. Di balik setiap pergeseran struktur, ada kerinduan kolektif akan keadilan dan keberlanjutan hidup. Dengan memahami akar pemicu dinamika ini, kita tidak lagi memandang perubahan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk bertumbuh menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih bijaksana.

Tabel 6.1. Faktor Dinamika Sosial

Kategori	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Internal	Penemuan Baru, Konflik, Demografi	<i>Vested Interest</i> , Prasangka, Tradisionalisme
Eksternal	Difusi Budaya, Lingkungan Alam, Peperangan	Isolasi Geografis, Ideologi Tertutup
Sistemik	Pendidikan, Kebijakan Progresif	<i>Cultural Lag</i> , Kurangnya Literasi

Sumber: Faktor Dinamika Sosial Masyarakat

6.2 Disrupsi Digital Dan Transformasi Struktur Masyarakat Kontemporer

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, wajah perubahan sosial tidak lagi ditentukan oleh revolusi fisik semata, melainkan oleh deretan angka biner di ruang siber. Disrupsi digital telah

mengubah cara kita mendefinisikan komunitas, pekerjaan, hingga cara kita memandang diri sendiri. Jika dahulu ruang sosial dibatasi oleh sekat geografis, kini batas-batas tersebut luruh oleh kehadiran konektivitas internet yang menyatukan seluruh penjuru bumi ke dalam satu genggam tangan (Hendarsyah, 2020).

Pergeseran ini membawa dampak yang sangat mendalam pada pola interaksi antarmanusia secara menyeluruh. Kita menyaksikan lahirnya masyarakat jaringan di mana informasi mengalir tanpa henti dan otoritas tradisional mulai ditantang oleh kekuatan massa digital yang cair. Fenomena ini menciptakan paradoks; di satu sisi kita merasa lebih terhubung secara global, namun di sisi lain, kedalaman relasi emosional sering kali tergerus oleh interaksi yang bersifat superfisial di media sosial.

6.2.1 Ruang Siber sebagai Arena Baru Interaksi Sosial

Dalam ranah interaksi, kehadiran media sosial telah menciptakan ruang publik ketiga yang sangat dinamis. Di sini, setiap individu memiliki panggung untuk menyuarakan opini dan membentuk komunitas berdasarkan minat, bukan lagi sekadar kesamaan lokasi tempat tinggal. Perubahan ini memungkinkan terjadinya demokratisasi informasi, di mana narasi-narasi kecil yang sebelumnya terabaikan kini dapat memperoleh perhatian luas melalui fenomena viralitas (Nurhadi, 2021).

Namun, keterbukaan ini juga menuntut kecakapan baru dalam menyaring kebenaran di tengah banjir informasi. Masyarakat kini dipaksa untuk terus belajar membedakan antara fakta dan manipulasi yang sering kali menyaru sebagai berita. Ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan pola komunikasi ini dapat memicu keterbelahan sosial, di mana individu cenderung hanya mendengarkan suara-suara yang sejalan dengan pemikiran mereka sendiri dalam sebuah ruang gema digital.

Perubahan pola interaksi ini pun berdampak pada cara kita merawat empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teknologi memudahkan kita untuk saling menyapa, frekuensi pertemuan fisik yang berkurang dapat melemahkan kepekaan sosial terhadap isyarat-isyarat emosional yang hanya

bisa ditangkap melalui kehadiran nyata. Tantangan humanisme kita saat ini adalah bagaimana tetap menjadi manusia yang utuh di tengah kepungan layar yang serba datar.

6.2.2 Ekonomi Digital dan Pergeseran Stratifikasi Ekonomi

Berlanjut ke aspek kesejahteraan, transformasi ekonomi digital telah menjadi pilar utama dalam pergeseran struktur kelas masyarakat kontemporer. Model bisnis lama yang kaku mulai digantikan oleh ekonomi berbagi yang lebih fleksibel dan partisipatif bagi siapa saja. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen sekaligus konsumen, yang secara tidak langsung merombak cara kita mencari nafkah dan menumpuk aset (Setiadi, 2020).

Hadirnya platform-platform digital telah membuka akses pasar bagi para pelaku usaha kecil di daerah terpencil untuk menjangkau konsumen global. Inovasi ini memberikan harapan baru bagi pemerataan ekonomi yang selama ini cenderung terpusat di kota-kota besar. Namun, kita juga harus waspada terhadap munculnya kerentanan baru, seperti minimnya perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor ekonomi platform yang bersifat tidak tetap.

Lebih jauh lagi, perubahan ini menciptakan tuntutan akan keterampilan baru yang berfokus pada kreativitas dan kecakapan teknologi. Pendidikan tidak lagi cukup hanya membekali lulusan dengan pengetahuan teknis statis, melainkan harus menumbuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Tanpa adanya jembatan pendidikan yang kuat, transisi ekonomi ini berisiko memperlebar jurang pemisah antara kelompok yang melek teknologi dengan mereka yang masih tertinggal secara digital.

6.2.3 Tantangan Identitas dan Privasi di Dunia Tanpa Batas

Di balik segala kemudahan ekonomi dan sosial tersebut, isu mengenai identitas dan privasi menjadi tantangan moral yang sangat serius bagi masyarakat modern. Data pribadi kini telah menjadi komoditas baru yang sangat berharga, yang jika tidak dikelola dengan etika yang ketat, dapat mengancam kebebasan individu. Masyarakat mulai belajar untuk bernegosiasi antara

kenyamanan yang ditawarkan teknologi dengan kebutuhan untuk menjaga ruang privat agar tidak dieksploitasi oleh kepentingan tertentu.

Pencarian identitas diri di era digital juga sering kali terjebak dalam budaya pamer yang memicu perbandingan sosial secara terus-menerus. Fenomena ini memberikan tekanan psikologis yang besar, terutama bagi generasi muda yang tumbuh besar di bawah pengawasan algoritme media sosial. Perubahan sosial yang sehat seharusnya mampu memberikan ruang bagi individu untuk berkembang secara autentik tanpa harus merasa terbebani oleh standar kesempurnaan yang diciptakan oleh dunia maya (Lukman, 2023).

Keamanan siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sudah menjadi kebutuhan sosial yang mendasar bagi keberlangsungan hidup kita. Ancaman peretasan dan penipuan daring dapat menghancurkan kepercayaan sosial dalam sekejap, yang merupakan modal utama dalam setiap interaksi manusia. Oleh karena itu, membangun ketahanan digital secara kolektif adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan sosial di era digital adalah tentang bagaimana kita meredefinisi martabat manusia di tengah otomatisasi. Kita dituntut untuk tetap memiliki kendali atas teknologi yang kita ciptakan sendiri, bukan justru diperbudak olehnya. Dengan mengedepankan prinsip humanisme dan etika, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah perubahan yang kita ambil akan selalu bermuara pada peningkatan kualitas hidup yang lebih berkeadilan.

Semua transformasi ini memberikan gambaran jelas bahwa kita sedang berada di ambang era baru yang sangat berbeda dengan masa lalu. Pemahaman yang mendalam mengenai disrupsi ini akan membantu kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan yang bertanggung jawab. Mari kita bersiap untuk terus merajut kohesi sosial yang lebih kuat di tengah keberagaman digital yang kian kaya.

Tabel 6.2. Transformasi Masyarakat Digital

Dimensi	Masyarakat Industri Tradisional	Masyarakat Digital Kontemporer
Pola Interaksi	Fisik, Terikat Lokasi, Berjenjang	Virtual, Tanpa Batas, Jaringan Horisontal
Sumber Informasi	Media Massa Searah, Otoritas Tunggal	Media Sosial Dua Arah, Konten Berbasis Pengguna
Struktur Ekonomi	Manufaktur, Jam Kerja Kaku, Kantor	Ekonomi Berbagi, Fleksibel, Berbasis Platform
Modal Sosial	Kepercayaan Lokal, Tatap Muka	Reputasi Digital, Jangkauan Global

Sumber: Transformasi Digital dan Dinamika Struktur Sosial.

6.3 Dampak Dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang kita bicarakan pada bab sebelumnya bukan sekadar fenomena yang lewat begitu saja, melainkan meninggalkan jejak yang mendalam pada setiap sendi kehidupan. Dampak yang ditimbulkan sering kali menyerupai pedang bermata dua; ia membawa kemajuan yang mencerahkan, namun di sisi lain menyimpan potensi keretakan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Memahami konsekuensi ini adalah langkah awal yang sangat penting agar kita dapat merancang strategi penyesuaian yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi masa depan (Martono, 2020).

Respons masyarakat terhadap perubahan sangatlah beragam, mulai dari penerimaan penuh hingga resistensi yang kuat. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur mental dan sosial di dalam kelompok tersebut. Ketika perubahan terjadi terlalu cepat sementara nilai-nilai lama masih sangat dominan, terjadilah guncangan budaya yang menguji ketangguhan kohesi sosial yang telah dibangun selama berabad-abad oleh nenek moyang kita.

Oleh karena itu, bagian ini akan mengupas bagaimana perubahan memengaruhi lembaga kemasyarakatan, memicu ketidakstabilan sementara, hingga akhirnya menuntut sebuah

upaya penataan ulang. Fokus utama kita adalah pada upaya manusia untuk tetap berdaulat di tengah arus transformasi yang kian menderu. Mari kita telusuri satu per satu bagaimana dinamika ini bekerja dalam ruang sosial kita yang majemuk.

6.3.1 Dampak Perubahan pada Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga keluarga adalah unit terkecil yang paling pertama merasakan getaran perubahan sosial. Di era modern ini, kita melihat pergeseran peran dalam keluarga yang lebih cair, di mana fungsi sosialisasi anak kini mulai terbagi dengan lembaga pendidikan formal dan bahkan media digital. Meskipun fleksibilitas ini memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk berkembang, tantangan baru muncul dalam menjaga kualitas komunikasi emosional yang hangat dan bermakna di tengah kesibukan masing-masing (Setiadi, 2020).

Lembaga pendidikan juga mengalami transformasi besar dari sekadar tempat transfer ilmu menjadi wadah persemaian karakter dan kreativitas. Kurikulum kini dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan zaman tanpa menanggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Perubahan ini menuntut para pendidik untuk tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan empati pada diri peserta didik sebagai bekal hidup di masa depan.

Dalam ranah keagamaan, perubahan sosial mendorong lahirnya reinterpretasi ajaran agar tetap relevan dengan persoalan kontemporer. Agama diharapkan mampu menjadi kompas moral di tengah kompleksitas masalah sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis lingkungan. Di sini, lembaga agama memainkan peran penting sebagai jangkar spiritual yang memberikan ketenangan sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk tetap bertindak etis di tengah perubahan yang serba cepat.

Lembaga ekonomi pun tidak luput dari perombakan, terutama dengan hadirnya sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis digital. Perubahan ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam setiap transaksi. Selain itu, munculnya kesadaran akan ekonomi hijau menunjukkan

bahwa masyarakat mulai memikirkan dampak jangka panjang dari setiap kegiatan produksi terhadap kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan kita semua.

Terakhir, lembaga politik mengalami pergeseran menuju tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif. Warga negara kini memiliki saluran yang lebih luas untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial telah meningkatkan kesadaran politik masyarakat, di mana kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai milik segelintir orang, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat secara jujur.

6.3.2 Tantangan Disorganisasi dan Jalan Menuju Reorganisasi Sosial

Setiap perubahan besar sering kali diikuti oleh fase disorganisasi sosial, yaitu kondisi di mana norma-norma lama mulai memudar namun norma baru belum terbentuk secara mapan. Fase ini sering kali memicu kecemasan dan konflik karena masyarakat kehilangan pegangan dalam bertindak. Namun, secara sosiologis, disorganisasi sebenarnya adalah proses pembersihan dari elemen-elemen sosial yang tidak lagi fungsional untuk kemudian digantikan dengan yang lebih baik.

Ketidakteraturan ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas atau perilaku menyimpang di kota-kota besar yang sedang mengalami transisi cepat. Hal ini terjadi karena kontrol sosial tradisional mulai melemah, sementara sistem hukum formal belum mampu menjangkau seluruh celah kehidupan masyarakat. Di sinilah pentingnya peran komunitas lokal untuk tetap menjaga solidaritas organik agar setiap individu tetap merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya.

Jalan menuju reorganisasi sosial memerlukan dialog yang jujur antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Reorganisasi bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menciptakan tatanan baru yang mampu mengakomodasi aspirasi lama dan kebutuhan masa depan secara harmonis. Proses ini melibatkan penyusunan kembali aturan-aturan main yang lebih

adil dan disepakati bersama sebagai landasan untuk hidup berdampingan secara damai.

Dalam proses ini, kepemimpinan sosial yang empatik sangatlah dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan pendapat. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang mampu mendengarkan suara kelompok minoritas dan memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam proses perubahan. Penataan ulang ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan membangun sistem sosial yang lebih tangguh terhadap guncangan di masa mendatang.

Kesuksesan reorganisasi sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan atau modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sesama dan terhadap institusi, proses adaptasi akan berjalan lebih cepat dan minim konflik. Oleh karena itu, investasi pada pembangunan karakter dan penguatan ikatan sosial jauh lebih berharga daripada sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata.

6.3.3 Resiliensi Komunitas dan Adaptasi Berkelanjutan

Di tengah pusaran perubahan, resiliensi atau ketangguhan menjadi kata kunci bagi keberlangsungan sebuah komunitas. Resiliensi bukan sekadar kemampuan untuk bertahan, melainkan kemampuan untuk bangkit kembali dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tekanan. Komunitas yang tangguh adalah mereka yang mampu memanfaatkan kearifan lokal sebagai fondasi untuk menyerap inovasi luar tanpa harus kehilangan jati diri mereka yang asli.

Strategi adaptasi berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha. Sinergi ini dikenal sebagai kolaborasi multipihak yang bertujuan untuk menciptakan solusi-solusi inovatif bagi masalah sosial yang muncul. Pendidikan sepanjang hayat menjadi instrumen utama dalam strategi ini, agar setiap warga negara memiliki kelenturan mental untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia.

Adaptasi juga berarti keberanian untuk melakukan koreksi terhadap pola hidup yang merusak, seperti pola konsumsi yang berlebihan. Masyarakat mulai beralih pada gaya hidup yang lebih minimalis dan menghargai keberadaan alam. Perubahan perilaku ini adalah bentuk adaptasi tingkat tinggi, di mana manusia menyadari bahwa keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada keseimbangan ekosistem sosial dan ekosistem alam yang saling bertautan.

Secara humanis, adaptasi berkelanjutan menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari teknologi atau pasar. Setiap perubahan harus diukur kemanfaatannya terhadap peningkatan martabat manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, perubahan sosial tidak akan menjadi beban yang menghimpit, melainkan menjadi tangga yang membawa kita menuju peradaban yang lebih mulia dan berkeadilan bagi semua.

Mari kita tutup pembahasan ini dengan keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki energi kreatif untuk mengelola perubahan. Tantangan yang ada di depan mata adalah ujian bagi kedewasaan kita sebagai makhluk sosial. Dengan tetap memegang teguh nilai gotong royong dan kemanusiaan, kita tidak hanya akan selamat dari arus perubahan, tetapi kita akan menjadi bagian dari arus yang membawa kebaikan bagi semesta.

Tabel 6.3. Dampak dan Respons Sosial

Aspek Kehidupan	Dampak Perubahan	Strategi Adaptasi
Lembaga Keluarga	Pergeseran Peran, Digitalisasi Pola Asuh	Penguatan Komunikasi Empatik, Literasi Digital Keluarga
Lembaga Ekonomi	Otomatisasi, Ekonomi Berbagi	Peningkatan Keterampilan Baru (<i>Upskilling</i>), Etika Bisnis Hijau
Lembaga Politik	Partisipasi Digital, Polarisasi	Pendidikan Kewargaan, Literasi Media, Penguatan Demokrasi
Struktur Sosial	Disorganisasi, Pudarnya Norma Lama	Reorganisasi, Penataan Hukum, Penguatan Modal Sosial

Sumber: Dampak Perubahan Sosial dan Strategi Adaptasi Masyarakat Digital.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). Indikator kesejahteraan rakyat 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2023). Potret demografi Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Hendarsyah, D. (2020). Ekonomi digital di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(1), 78-89. Sinta 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3145>
- Lukman, L. (2023). Digital identity and self-representation in the age of algorithms. *Journal of Cyber Psychology and Behavior*, 12(3), 210-225. Scopus Q1. <https://doi.org/10.1016/j.cyb.2023.01.005>
- Martono, N. (2020). Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial. PT RajaGrafindo Persada. ISBN: 978-602-425-412-4.
- Nurhadi, N. (2021). Perubahan sosial masyarakat di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 45-58. Sinta 3. <https://doi.org/10.33369/jsn.9.1.45-58>
- Prasetyo, A. (2022). Social capital and community resilience in the digital era: A study of Indonesian urban society. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(5/6), 481-495. Scopus Q1. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-01-2022-0012>
- Setiadi, E. M. (2020). Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial. Kencana. ISBN: 978-602-422-756-2.
- Sugiono. (2022). Sosiologi pembangunan: Tantangan masyarakat di era disrupsi. Pustaka Pelajar. ISBN: 978-623-236-241-1.
- Widodo, S. (2023). Digital transformation and its social consequences in rural Indonesia. *Journal of Social Change*, 15(2), 112-128. <https://doi.org/10.5567/jsc.2023.15.2.112>

BAB 7

GENDER DAN KETIDAKSETARAAN

Studi mengenai gender mengkaji konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali disalahpahami sebagai ketetapan biologis yang bersifat kodrati. Dalam pandangan sosiologis, perbedaan ini sangat krusial karena gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks budaya dan waktu. Ini berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang merujuk pada atribut biologis yang relatif permanen (Asnawi, 2012; Kiram, 2020). Dengan demikian, ketidaksetaraan gender bukanlah cerminan dari perbedaan biologis, melainkan hasil dari proses sosial yang membentuk relasi kuasa, norma, dan ekspektasi yang tidak seimbang dalam masyarakat (Kiram, 2020). Ketimpangan ini sering kali termanifestasi melalui sistem diskriminasi yang membatasi akses individu terhadap sumber daya, pendidikan, dan partisipasi publik berdasarkan stereotip yang kaku. Hal ini menciptakan hambatan sistemik yang menguatkan marjinalisasi kelompok tertentu dan membatasi peluang pengembangan dirinya (Yanti dkk., 2025).

Akibatnya, hierarki gender yang terbentuk tidak sekadar membatasi ruang gerak individu, melainkan juga melembagakan ketimpangan ke dalam struktur sosial yang lebih luas, sehingga memperkuat bias dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik (Jannah, 2025; Susanti & Patonah, 2020). Kondisi ketidakadilan ini sering kali dilegitimasi oleh aktor-aktor dominan yang memiliki kekuasaan lebih untuk mempertahankan hak istimewa sosial dengan cara menormalisasi pembagian peran tersebut sebagai sesuatu yang bersifat alami. Melalui

narasi budaya dan institusi sosial yang melanggengkan pandangan hegemonik, subordinasi gender kemudian diterima sebagai konsensus sosial yang wajar, sehingga menutupi realitas bahwa pembagian peran tersebut hanyalah instrumen untuk menjaga distribusi sumber daya yang tidak setara serta memperkuat struktur kekuasaan yang ada (Susanti & Patonah, 2020).

Oleh karena itu, upaya dekonstruksi terhadap stereotip peran gender menjadi penting untuk memutus siklus diskriminasi dan mewujudkan kondisi di mana hak-hak asasi manusia dapat dinikmati secara seimbang, adil, dan setara oleh setiap individu. Langkah ini menuntut komitmen kolektif untuk mengkritisi kebijakan yang tidak responsif terhadap gender serta mendorong transformasi sosial yang inklusif, sehingga relasi kuasa yang timpang dapat digantikan oleh tatanan sosial yang lebih demokratis dan berkeadilan (Susanti & Patonah, 2020; Yanti dkk., 2025).

Manifestasi ketidakadilan tersebut sering kali berwujud dalam berbagai bentuk diskriminasi sistemik. Secara spesifik, Fakih mengidentifikasi lima bentuk manifestasi diskriminasi tersebut sebagai marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda yang secara kolektif merugikan baik laki-laki maupun perempuan dalam struktur sosial budaya (Meo & Boro, 2021). Kelima bentuk diskriminasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait secara dialektis dan diperkuat oleh institusi sosial seperti keluarga, dunia pendidikan, hingga kebijakan ekonomi (Asmillah dkk., 2021; Mandasari, 2022).

Dominasi sistem patriarki menempatkan laki-laki pada hierarki tertinggi sebagai pengambil keputusan, sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak subordinat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan partisipasi politik (Afanin, 2023; Mahyus dkk., 2025). Paham patriarki yang melegitimasi dominasi laki-laki ini terus diabadikan melalui norma sosial dan keyakinan budaya yang memandang peran perempuan sebatas ranah domestik, sehingga membatasi peran serta eksistensinya dalam tatanan publik (Munasaroh, 2022; Najwah, 2021; Sulistyowati, 2021).

Kesenjangan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, menjadi akar penyebab terjadinya berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat (Situmeang, 2021; Subarkah & Tobroni, 2021).

7.1 Konstruksi Sosial Gender

Konstruksi sosial gender merujuk pada proses panjang sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya yang dipengaruhi oleh institusi agama dan negara. Mekanisme sosialisasi yang sistematis di dalam keluarga, dunia pendidikan, hingga media massa, identitas gender yang dikonstruksi secara kultural ini kemudian mengakar kuat dan menjadi dasar bagi pembagian kerja serta akses sumber daya yang tidak setara (Asmillah dkk., 2021; Najwah, 2021). Ketika pola-pola ini terus direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari, mereka menjadi kebenaran yang dianggap objektif. Ini dapat menutup ruang untuk mempertanyakan ketimpangan relasi kuasa serta melanggengkan dominasi patriarki dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat (Munasaroh, 2022; Situmeang, 2021).

Lebih jauh lagi, proses ini menciptakan suatu siklus dialektis dimana norma budaya yang dipandang sebagai kehendak Tuhan sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan yang dianggap permanen. Ketika interpretasi atas norma tersebut dikukuhkan secara kaku, ruang bagi diskursus kritis menjadi sangat terbatas, sehingga setiap upaya untuk mempertanyakan kembali peran gender sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral masyarakat. Akibatnya, ketidakadilan tidak hanya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif, tetapi juga memperoleh pembenaran yang dianggap suci, yang pada akhirnya memperlambat agenda transformasi sosial menuju relasi kuasa yang lebih setara.

Dalam tatanan masyarakat, tidak hanya perbedaan feminitas dan maskulinitas yang ditetapkan, tetapi juga pembagian peran antara ruang publik dan domestik yang dikukuhkan sehingga memposisikan perempuan dalam kondisi

subordinasi (Afanin, 2023; Sulistyowati, 2021). Hal ini secara sistematis membatasi peran perempuan di ranah domestik, sementara laki-laki diberikan akses eksklusif terhadap otoritas dan pengambilan keputusan di ranah publik (Najwah, 2021; Susanti & Patonah, 2020). Ketimpangan pembagian ruang ini melembagakan dominasi atas perempuan sebagai entitas yang kurang produktif dan tidak layak memegang kendali atas sumber daya strategis (Jannah, 2025; Mahyus dkk., 2025). Konstruksi sosial yang mendefinisikan kelayakan peran dalam struktur sosial dapat menimbulkan hambatan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor strategis (Ana dkk., 2023).

7.1.1 Definisi Konseptual Gender

Secara konseptual, gender dipahami sebagai seperangkat atribut sosial dan peran yang dikonstruksi secara kultural bagi laki-laki dan perempuan. Secara fundamental, perbedaannya adalah bahwa seks merupakan penanda biologis (Maulida, 2021). Seks berfokus pada perbedaan fisiologis serta reproduksi, sedangkan gender merupakan atribusi peran yang terbentuk melalui pengaruh konstruksi sosial dan kultural yang terus direproduksi oleh masyarakat (Ihsani, 2021). Pembagian ini mencakup berbagai pola perilaku dan harapan sosial yang dianggap sesuai bagi seseorang berdasarkan identitas maskulin atau feminin yang disematkan kepadanya (Maulida, 2021).

Saat ini, pemahaman mengenai gender semakin diperkaya oleh perspektif interseksionalitas. Perspektif ini menyoroti bahwa pengalaman ketidaksetaraan individu tidak bersifat tunggal, melainkan saling terkait dengan berbagai kategori sosial lainnya seperti kelas ekonomi, etnisitas, usia, dan status sosial (Kiranantika, 2022; Manalu dkk., 2024). Selain itu, juga menekankan bahwa dampak ketidakadilan gender yang dialami seseorang sering kali terakumulasi dan diperparah oleh posisi marjinalnya dalam struktur sosial yang lebih luas, sehingga melahirkan bentuk-bentuk penindasan yang unik dan kompleks (Lestari dkk., 2025; Yusro, 2024). Dengan mengintegrasikan analisis interseksionalitas, kajian sosial dapat memetakan secara lebih akurat bagaimana dinamika kekuasaan bekerja dalam keberagaman masyarakat Indonesia, serta merancang intervensi

kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap berbagai lapisan identitas yang saling bersinggungan (Kiranantika, 2022; Manalu dkk., 2024).

7.1.2 Gender dan Identitas

Di era kontemporer, diskursus gender tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, melainkan telah merambah berbagai ruang, termasuk ruang digital, yang berperan signifikan dalam negosiasi dan rekonstruksi identitas gender (Subkhan dkk., 2026). Norma-norma gender juga terlembaga dalam struktur formal organisasi dan kebijakan publik. Ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi progresif dan realitas praktik ketimpangan di lapangan (Nasiah & Hakim, 2025). Kesenjangan ini muncul karena banyak institusi cenderung mengadopsi pendekatan yang bersifat "gender-blind" dan gagal menyentuh habitus budaya yang mendasari pembagian peran secara sistemik, yang berdampak pada kebijakan formal yang sering kali hanya menjadi seremonial tanpa membawa transformasi struktural berarti (Clavero & Galligan, 2020; Nasiah & Hakim, 2025). Akibatnya, upaya formal untuk mencapai kesetaraan justru sering kali tereduksi oleh mekanisme internal institusi yang secara halus terus melanggengkan distribusi kekuasaan yang tidak setara (Waylen, 2013).

Kondisi ini semakin diperparah oleh kehadiran media sosial yang berpotensi memicu kekerasan gender secara daring, di mana perempuan kerap menjadi objek subordinasi di ruang siber (Fauzi, 2021). Oleh karenanya, pemahaman mengenai gender perlu diperluas dengan mengintegrasikan dinamika ruang digital dan dekonstruksi ideologi maskulinitas sebagai upaya progresif menuju transformasi sosial yang lebih substansial (Ramadhan, 2018; Subkhan dkk., 2026).

Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa pemahaman mengenai eksklusi tidak cukup jika hanya berfokus pada gender semata, karena individu juga mewujudkan berbagai identitas sosial lain, seperti kekayaan, etnis, dan usia, yang saling berkaitan dalam membentuk kerentanan seseorang (Yaneri & Deswanti, 2021). Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat

Indonesia, ekspresi gender yang tidak sejalan dengan standar maskulinitas dominan, sering kali menjadi target perundungan. Ini menegaskan adanya relasi kuasa yang memvalidasi pengucilan terhadap individu yang dianggap berada di posisi bawah (Ayuningrum, 2021).

Hal ini mempertegas urgensi pengadopsian konsep Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial untuk memastikan bahwa setiap upaya penghapusan diskriminasi tidak hanya berfokus pada dimensi gender, tetapi juga menyentuh kerentanan spesifik akibat identitas sosial lainnya yang dimarginalkan (Kurnia dkk., 2022). Pendekatan ini sangat krusial mengingat budaya patriarki di Indonesia masih mengakar kuat. Proses pembangunan dan output kebijakan kerap bias gender sehingga mengokohkan bentuk-bentuk ketidakadilan seperti stereotip, beban ganda, dan marginalisasi (Amalia dkk., 2025).

7.2 Ketidaksetaraan Gender Struktural

Ketidaksetaraan gender struktural terwujud secara nyata dalam dunia kerja. Perempuan masih menghadapi diskriminasi sistemik berupa kesenjangan upah, akses promosi jabatan yang terbatas, serta beban kerja domestik yang tidak diakui secara ekonomi (Nuraeni & Suryono, 2021; Sarmauli dkk., 2024). Stereotip peran gender yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga sering kali membatasi partisipasinya dalam sektor publik dan menurunkan ekspektasi sosial terhadap karier profesional perempuan (Audina, 2022; Naswa, 2025).

Sejalan dengan fenomena tersebut, data menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, yang diperburuk oleh meningkatnya angka kekerasan berbasis gender dari tahun ke tahun (Munir & Saidah, 2025). Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah hadir, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh bias gender yang mengakar pada struktur aparat penegak hukum dan norma sosial patriarkal (Rahmayani dkk., 2025; Saputra & Lisnarini, 2023). Budaya patriarki yang masih sangat kuat

menempatkan laki-laki dalam kendali tunggal atas berbagai ranah kehidupan, sehingga memperkuat subordinasi perempuan dalam dinamika pengambilan keputusan rumah tangga hingga akses publik (Syafirin & Syam, 2024; Apriliandra & Krisnani, 2021).

7.2.1 Hierarki Struktural Gender

Hierarki struktural ini menempatkan laki-laki pada posisi dominan sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan dipandang sebagai pihak yang resesif dan lemah dalam tatanan sosial (Saraswati & Sewu, 2022). Konstruksi ini tidak jarang memposisikan perempuan sekadar sebagai pelengkap atau objek laki-laki, daripada diakui sebagai subjek utama yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah hidupnya sendiri (Octaviani dkk., 2022). Ketimpangan akses terhadap sumber daya pembangunan ini semakin menegaskan bahwa subordinasi perempuan merupakan produk dari sistem sosial yang sengaja mendiskriminasi untuk mengokohkan kekuasaan pihak tertentu (Pramesti & Andalas, 2023).

Bentuk ketidakadilan ini berwujud dalam berbagai manifestasi sistemik, mulai dari marginalisasi peran di sektor publik hingga beban ganda yang membatasi pengembangan diri perempuan (Herman, 2022; Hatami, 2023). Dalam lanskap ketenagakerjaan di Indonesia, ketimpangan ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan di level manajerial, yang hanya mencapai 30 persen (Triadi & Maryanto, 2024). Selain itu, ketertinggalan partisipasi ini diperparah oleh kontribusi rendah pendapatan perempuan serta tingginya proporsi pengangguran dibandingkan laki-laki, yang secara langsung menghambat efektivitas pembangunan nasional.

Kondisi ini menciptakan efek domino. Beban domestik yang diemban oleh perempuan memaksanya untuk mengorbankan peluang ekonomi. Pada akhirnya, ini dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas (Karwati, 2021). Ketidakadilan tersebut semakin terinstitusionalisasi ketika aparat penegak hukum justru menunjukkan bias gender dalam menangani kasus kekerasan. Dalam beberapa kasus, yang terjadi justru mendorong penyelesaian damai secara paksa sehingga

merugikan korban perempuan (Azkia & Andriasari, 2023). Ketimpangan ini juga berakar dari pelabelan perempuan sebagai kelompok inferior, yang harus berada dalam perlindungan laki-laki, sebuah konstruksi yang membatasi partisipasi politik serta akses ekonomi (Salfa, 2023).

7.2.2 Dominasi Patriarki

Sistem patriarki berfungsi sebagai tatanan sosial yang mengukuhkan otoritas laki-laki sebagai pemegang kontrol utama atas tubuh, seksualitas, serta status sosial perempuan, baik di ranah domestik maupun ruang publik (Imani dkk., 2023). Konstruksi ini dilegitimasi melalui institusi pendidikan dan media yang secara konsisten membentuk persepsi bahwa subordinasi perempuan merupakan keniscayaan sosial (Munasaroh, 2022). Melalui reproduksi nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan, penafsiran teks keagamaan yang cenderung bias, serta representasi media yang kerap menonjolkan perspektif maskulin, subordinasi tersebut kemudian terinternalisasi dan dianggap sebagai tatanan alamiah (Hannan, 2022). Hegemoni ini menciptakan kondisi yang memandang ketidaksetaraan peran sebagai sesuatu yang normal dan tak terelakkan, sehingga menutup ruang bagi upaya transformasi struktural yang lebih adil (Wijana dkk., 2024).

Kendala kultural ini diperburuk oleh segregasi pekerjaan yang membatasi akses perempuan pada posisi strategis dan sektor-sektor yang dianggap sesuai dengan stereotip gender tertentu, akibatnya mempersempit ruang gerak perempuan dalam meniti karier profesional (Nuraeni & Suryono, 2021; Triadi & Maryanto, 2024). Praktik ini tidak hanya membatasi peluang ekonomi, tetapi juga secara sistematis menempatkan perempuan dalam bidang yang minim nilai ekonomi, sehingga memperkuat dependensi Perempuan terhadap laki-laki di ranah domestik maupun publik (Karwati, 2021; Naswa, 2025).

7.3 Perspektif Teoretis Gender

Perspektif teoretis mengenai gender menekankan bahwa ketimpangan bukanlah kodrat biologis, melainkan hasil dari

konstruksi sosial-budaya yang terstruktur. Pandangan ini menyoroti bahwa peran, status, dan akses terhadap sumber daya ditentukan melalui mekanisme sosialisasi yang dilegitimasi oleh institusi masyarakat. Akibatnya, menempatkan perbedaan gender sebagai alat untuk memosisikan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan dalam posisi subordinat (Imani dkk., 2023; Munasaroh, 2022). Melalui proses ini, ketidakadilan dijustifikasi sebagai suatu keniscayaan alamiah, yang kemudian diinternalisasi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik maupun publik, untuk mempertahankan relasi kuasa yang timpang (Herman, 2022; Wijana dkk., 2024).

Kondisi ini didukung oleh sistem patriarki yang telah membudaya, di mana laki-laki mempertahankan kontrol eksklusif atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan penting (Kurniawan, 2021; Hafani & Buldani, 2025). Selain itu, pola interaksi ini sering kali didorong oleh narasi kultural yang keliru. Ketundukan perempuan dianggap sebagai manifestasi dari hukum kodrat yang tidak patut dipertanyakan (Kusumaningrum dkk., 2023; Rohendi & Shamsu, 2023).

Ketimpangan ini pada gilirannya membatasi partisipasi perempuan dalam ranah strategis seperti bisnis dan politik. Ini menempatkan perempuan dalam posisi yang selalu diabaikan dalam kontribusi pembangunan nasional (Subagja, 2022). Stereotipe gender ini bahkan telah terenkulturasi sebagai dogma turun-temurun, di mana masyarakat cenderung memberikan sanksi sosial bagi perempuan yang berupaya keluar dari batasan peran domestik tersebut (Siregar & Rosramadhana, 2022). Fenomena ini selaras dengan teori *nurture*, yang menegaskan bahwa posisi serta karakteristik perempuan ditentukan sepenuhnya oleh lingkungan dan budaya yang tidak mendukung pengembangan potensinya (Al-Aydrus, 2023).

7.3.1 Teori Feminis

Feminisme hadir sebagai ideologi kesadaran kolektif yang bertujuan membongkar sistem penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, baik di lingkup domestik maupun ruang sosial yang lebih luas (Ridwan & Inhilda, 2025). Lebih jauh lagi,

pemikiran ini turut mengkritik epistemologi modern yang cenderung androsentris, di mana konstruksi ilmu pengetahuan sering kali disusun berdasarkan perspektif laki-laki yang melegitimasi subordinasi perempuan sebagai standar kebenaran ilmiah (Rohmatullah, 2022; Sejati dkk., 2025).

Teori feminis lahir untuk mengkritik tajam terhadap upaya sistematis untuk menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki di seluruh aspek kehidupan sebagai reaksi atas ketimpangan yang terjadi akibat bias makna antara konsep jenis kelamin dan gender (Tanjung dkk., 2025). Secara mendasar, teori ini berargumen bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan hanyalah produk dari konstruksi budaya, bukan cerminan dari sifat biologis yang tak terelakkan (Karimah, 2021; Nugroho & Suhendi, 2022). Oleh karena itu, para pemikir feminis berargumen bahwa subordinasi perempuan merupakan sistem bertingkat yang dibentuk oleh kekuasaan yang mendominasi, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi lemah dan rentan terhadap eksploitasi (Oktaviani & Megawati, 2021). Lebih lanjut, perspektif ini menekankan bahwa sistem sosial tersebut sengaja menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kepemimpinan politik dan otoritas moral untuk mempertahankan dominasi (A. Nugroho dkk., 2021).

Sebagai upaya merespons tantangan atas ketidaksetaraan ini, berbagai aliran feminis bermunculan menawarkan kerangka analisis komprehensif untuk memahami bagaimana relasi kuasa dan ideologi patriarki dikonstruksi dalam berbagai sektor kehidupan (Nurmadani dkk., 2025). Sebagai contoh, feminisme sosialis secara spesifik mengidentifikasi konstruksi sosial sebagai akar utama penindasan, yang mendorong perlunya pemberian ruang keadilan substantif bagi perempuan di berbagai sektor kerja, termasuk sektor ekonomi marjinal (I. P. W. Saputra & Hasrin, 2022).

Di samping itu, feminisme radikal turut mengkritisi institusi keluarga sebagai salah satu struktur yang membatasi hak-hak perempuan, sehingga mendorong refleksi mendalam atas fenomena sosial kontemporer seperti pilihan hidup *childfree* atau *unmarried* sebagai bentuk otonomi diri (Ningrum, 2024). Adapun

feminisme liberal menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara sebagai kunci utama untuk meruntuhkan batasan kultural yang menghambat perempuan dari ranah profesional dan pengambilan kebijakan (Wahid, 2023). Transformasi struktural ini memerlukan upaya rekonstruksi budaya yang lebih luas untuk menggeser paradigma patriarki menuju tatanan masyarakat yang lebih egaliter (Azizah, 2022). Upaya ini mencakup dekonstruksi terhadap stereotip domestik yang selama ini membatasi kapasitas aktual perempuan, sehingga memungkinkan perempuan mendapatkan pengakuan yang setara dalam kontribusi sosial maupun ekonomi (Gusty, 2023; Maulid, 2022).

Di sisi lain, perspektif kriminologi feminis memperluas diskursus ini dengan menyoroti bagaimana relasi kuasa yang timpang dan stigma sosial sering kali memosisikan perempuan sebagai korban atau pelaku kejahatan dalam sistem hukum yang bias. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis interseksional untuk memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman viktimisasi serta keterlibatan perempuan dalam tindak pidana (Kuswandi & Madianwati, 2025).

Analisis interseksional berargumen bahwa ketimpangan gender tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan beririsan dengan kategori sosial lain seperti kelas, ras, dan etnis yang secara kolektif membentuk pengalaman unik berupa penindasan terhadap perempuan (Rachman, 2023). Pendekatan ini menjadi krusial untuk mengakui bahwa ketidakadilan struktural tidak hanya berakar pada disparitas gender, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel sosial lainnya yang membentuk realitas kehidupan perempuan secara spesifik. Sebagai contoh, perempuan yang hidup dalam masyarakat dengan sistem adat patrilineal kuat sering kali menghadapi tantangan ganda di mana otoritas tradisional mempertegas posisi subordinatnya terlepas dari latar belakang pendidikan atau ekonomi (Putri & Kamala, 2026).

7.4 Dampak Ketidaksetaraan Sosial

Ketidaksetaraan sosial yang berakar dari sistem dominasi menciptakan disparitas mendalam dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok perempuan marjinal (Makhanya, 2024). Sebagai contoh, ketiadaan kerangka persepsi yang komprehensif dalam kebijakan publik sering kali mengakibatkan isu kesehatan spesifik yang dihadapi perempuan migran miskin, hilang dari agenda pembangunan nasional (Song dkk., 2023). Kesenjangan ini diperparah oleh kebijakan yang bersifat satu dimensi, sehingga kebutuhan unik kelompok tersebut terabaikan akibat kurangnya data yang mempertimbangkan irisan identitas seperti ras, status kewarganegaraan, dan kelas sosial (Borah, 2025; DEMİROĞLU, 2023). Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai ketidakberdayaan sistemik, di mana kelompok tersebut tidak hanya mengalami marjinalisasi ekonomi, tetapi juga eksploitasi terstruktur dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari (Udasmoro & Setiadi, 2021). Selain itu, fenomena ini sering kali diakibatkan oleh kurangnya sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan, yang mengakibatkan kegagalan dalam mengatasi ketimpangan struktural dan budaya patriarki yang masih mengakar di berbagai lapisan masyarakat (Mahyus dkk., 2025).

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena representasi perempuan sering kali terabaikan dalam diskursus publik, sehingga menjadikan perempuan sebagai objek budaya yang terus-menerus terpinggirkan oleh struktur patriarki (Kiranantika, 2022). Dominasi laki-laki dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi ini secara signifikan menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraannya (Bila dkk., 2024). Lebih jauh lagi, budaya patriarki ini menciptakan berbagai manifestasi ketidakadilan, mulai dari beban ganda domestik hingga subordinasi perempuan dalam jabatan struktural di sektor publik (Meo & Boro, 2021; Sulistyowati, 2021).

7.4.1 Marjinalisasi Kelompok Rentan

Kelompok ini mencakup individu seperti pekerja rumah tangga, ibu tunggal, dan perempuan yang berada dalam kondisi kerentanan sosial-ekonomi ekstrem. Kelompok ini sering kali terabaikan dalam program kesejahteraan standar karena kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan uniknya (Mursalin dkk., 2024). Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marjinalisasi ini sering kali mengakibatkan proses pemiskinan struktural, baik di lingkungan kerja maupun dalam lingkup rumah tangga dan kultur masyarakat (Khasanah, 2022).

Manifestasi diskriminasi ini mencakup subordinasi, stereotip negatif, beban kerja ganda, hingga berbagai bentuk kekerasan yang berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa (Asmilla dkk., 2021). Dalam sektor pertanian, misalnya, program intensifikasi pembangunan yang bersifat eksklusif sering kali meminggirkan peran perempuan, sehingga perempuan kehilangan akses terhadap teknologi dan sumber daya ekonomi yang justru memperparah kemiskinan (Mandasari, 2022). Di tingkat akar rumput, sistem patriarki melanggengkan diskriminasi ini melalui norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama atas sumber daya, sehingga membatasi mobilitas perempuan dan kesempatan untuk berkembang (Aula, 2023); (Shintiya dkk., 2025).

Stereotip gender yang mengakar juga kerap menstigma perempuan sebagai pihak yang lemah atau emosional, sehingga membenarkan posisi subordinasinya dalam pengambilan keputusan (Silfiah & Humiati, 2023; Situmeang, 2021). Kesenjangan akses ini diperburuk oleh pelabelan sosial yang menganggap peran domestik sebagai kodrat, sehingga beban kerja ganda yang ditanggung perempuan sering kali dianggap tidak bernilai secara ekonomis dan terabaikan dalam kebijakan pembangunan (Afanin, 2023; Modiano, 2021). Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya subordinasi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang irasional, sehingga menghambat perempuan untuk menempati posisi

kepemimpinan atau peran strategis dalam masyarakat (Nabila & Noviana, 2021; Tarigan, 2024).

Akibatnya, perempuan sering kali terjebak dalam posisi subordinat yang membatasi hak dan kebebasannya, baik di ranah privat maupun public (Herawati dkk., 2021; Soesilo dkk., 2021). Selain itu, konstruksi sosial yang mengidentikkan perbedaan jenis kelamin dengan kodrat permanen telah tersistematisasi secara evolutif dalam berbagai tatanan masyarakat dan kebijakan publik, yang pada akhirnya melegitimasi eksklusi perempuan dari akses ekonomi serta politik yang setara (Najwah, 2021).

7.4.2 Ketimpangan Akses Sumberdaya

Ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, seperti lahan pertanian dan teknologi, sering kali terhambat oleh kultur patriarki yang memberikan kontrol otoritatif sepenuhnya kepada laki-laki (Haq, 2023). Meskipun dalam sistem adat tertentu perempuan secara formal memegang hak kepemilikan lahan, pengelolaan dan kendali strategis atas sumber daya tersebut secara konsisten tetap didominasi oleh laki-laki (Yurike & Syafruddin, 2025). Hal ini menyebabkan perempuan kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan terkait praktik pertanian maupun pengelolaan aset ekonomi yang memengaruhi kelangsungan hidupnya (Adefila dkk., 2024). Akibat dari ketimpangan ini, perempuan mengalami kerentanan ekonomi yang berdampak pada pemiskinan struktural, yakni kehilangan otonomi atas diri sendiri serta akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan (Kurniawati & Sa'adah, 2022; Sumampouw dkk., 2023).

Hal ini diperparah oleh rendahnya dukungan keluarga dan norma patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, sehingga mempersempit peluangnya untuk mencapai kemandirian ekonomi (Firdaus, 2025). Kesenjangan ini semakin memburuk dengan minimnya keterlibatan perempuan dalam ranah pekerjaan berbayar, di mana pendapatan dan jaminan sosial mereka jauh tertinggal dibandingkan laki-laki di hampir semua sektor industri (Sari dkk., 2021). Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia kaum perempuan

akibat akses pendidikan yang terbatas sering kali menjadi faktor utama yang menghambat untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia pembangunan (Ajizah & Khomisah, 2021). Lebih lanjut, regulasi negara yang masih mengandung bias gender turut melegitimasi konstruksi sosial-budaya ini sebagai alat untuk membatasi ruang gerak perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun partisipasi publik (Aliwar & Jahada, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender guna mengeliminasi hambatan struktural tersebut serta mendukung pemberdayaan perempuan agar mampu mencapai kemandirian dan daya saing yang lebih baik (Rahmadani & Agustina, 2024). Ketidaksetaraan ini pada akhirnya menciptakan hambatan sistemik yang membatasi kemampuan ekonomi nasional untuk tumbuh, karena potensi sumber daya manusia perempuan tidak teroptimalkan secara produktif di pasar tenaga kerja (Aprilia & Triani, 2022). Padahal, keterlibatan aktif perempuan dalam sektor ekonomi telah terbukti mampu memberikan kontribusi unik, di mana perempuan cenderung mengalokasikan hingga sembilan puluh persen pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitasnya (Kurniasari, 2021).

Kebijakan yang responsif gender memerlukan pendekatan komprehensif, seperti integrasi prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) dalam setiap tahapan perumusan kebijakan publik (Rimbawan & Nurhaeni, 2024). Langkah ini sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar ke-5, yang menekankan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan strategis dan partisipasi ekonomi (Ari dkk., 2022). Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan perempuan sebagai pekerja profesional dan representasinya di parlemen terbukti memberikan dampak positif bagi Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah (Fatah & M.M. Sitti Retno Faridatussalam S.E., 2026). Strategi ini dapat dioptimalkan melalui implementasi program pemberdayaan di tingkat komunitas terkecil guna memicu kesadaran kolektif akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan (Budiman dkk., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adefila, A. O., Ajayi, O. O., Toromade, A. S., & Sam-Bulya, N. J. (2024). A sociological review of gender equity in agricultural development: global trends and lessons for U.S. policy. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(11), 2658–2677. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i11.1694>
- Afanin, Z. N. (2023). Male Entitlement Bagian Stereotipe Gender (Analisis Semiotika). *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 1(1), 88–109. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1386>
- Ajizah, N., & Khomisah, K. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Persepektif Sadar Gender. *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>
- Al-Aydrus, N. (2023). Gender Dalam Perspektif Islam. *Musawa Journal for Gender Studies*, 15(1), 38–59. <https://doi.org/10.24239/msw.v15i1.2046>
- Aliwar, A., & Jahada, J. (2022). Partisipasi Perempuan Di Perguruan Tinggi: Survei Pada Mahasiswa Di Iain Kendari. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 18. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.3901>
- Amalia, A. A., Amal, C. A., Nur, K. W., Aldi, M., Hamid, N. A. A., Sawerigading, A. A., & Nurawal, M. A. (2025). Integration Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) In Participatory Planning Of Informal Settlements: Case Study Of Tammua Urban Village, Makassar. *Journal of Architecture & Environment*, 24(2), 95. <https://doi.org/10.12962/j2355262x.v24i2.a20151>
- Ana, S., Syukur, M., Syukur, M., & Ahmad, R. S. (2023). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia. *Nirwasita Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954>

- Aprilia, V., & Triani, M. (2022). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(3), 43. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i3.13772>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Ari, I. R. D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2022). Kesenjangan Gender Dan Keterkaitannya Dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Di Indonesia: Studi Kasus Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>
- Asmillah, L. N., Nensilanti, N., & Syamsudduha, S. (2021). Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Sentral Sebagai Pengaruh Budaya Patriarki Dalam Film Kim Ji-Young, Born 1982. *FON Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 178–192. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4433>
- Asnawi, H. S. (2012). Politik Hukum Kesenjangan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>
- Audina, D. J. (2022). Kesenjangan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Deleted Journal*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Ayuningrum, N. G. (2021). Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Bereksresi Gender Feminin. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.22146/jwk.3620>

- Azizah, N. (2022). Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 113–128. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13608>
- Azkia, S., & Andriasari, D. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- Bila, S., Nurmalsyari, Alviani, D., Rusliawan, S., & Sajidah, N. (2024). Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriarki. *JSPH Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3), 19–29. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1422>
- Borah, D. (2025). *Intersectionality in Policy Making: Interplay of Gender, Race, and Class in Contemporary Governance*. 688–700. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25jul655>
- Budiman, R. C. P., Rafeinia, D. C., & Arintyas, A. P. R. D. A. (2023). Gender-Based Development Discourse and Its Impact on Women Informal Workers in Yogyakarta. *Populasi*, 31(2), 49. <https://doi.org/10.22146/jp.92550>
- Clavero, S., & Galligan, Y. (2020). Analysing gender and institutional change in academia: evaluating the utility of feminist institutionalist approaches. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 42(6), 650–666. <https://doi.org/10.1080/1360080x.2020.1733736>
- Demiroğlu, E. T. (2023). Immigrant Women in Local Equality Action Plans of Municipalities: A Study on Action Plans of Municipalities in Türkiye. *DergiPark (Istanbul University)*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/82953/1349965>
- Fatah, M. F. Al, & M.M. Sitti Retno Faridatussalam S.E. (2026). Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Mendorong Produk Domestik Regional Bruto: Bukti Empiris Dari Indonesia. Dalam *UMS Library Center of Academic Activities (Universitas Surakarta)*. Universitas Surakarta.

- Fauzi, E. P. (2021). Konstruksi Sosial Soft Masculinity dalam Budaya Pop Korea. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 127. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3687>
- Firdaus, F. (2025). Subordinasi Dan Marginalisasi Perempuan Dalam Akses Pendidikan Tinggi Di Pedesaan: Studi Komparatif Di Kabupaten Gowa. *SosioReligius Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 10(1), 66–84. <https://doi.org/10.24252/sosioReligius.v10i1.58504>
- Gusty, N. (2023). Kekerasan Perempuan Pada Tokoh Utama dalam Novel Tuhan Lindungi Mahkotaku: Kajian Feminisme. *Kode Jurnal Bahasa*, 12(2). <https://doi.org/10.24114/kjb.v12i2.47320>
- Hafani, Moch. H., & Buldani, M. N. (2025). Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki-Laki Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga. *Asa*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120>
- Hannan, A. (2022). Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer. *Realita Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 20(2), 145–172. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.138>
- Haq, N. U. (2023). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Buruh Tani Akibat Adanya Ketidaksetaraan Gender. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 107. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4205>
- Hatami, W. (2023). Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan. *Equalita Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13512>
- Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131–142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>

- Herman, M. (2022). Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam Dan Minangkabau. *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, 21(2), 93. <https://doi.org/10.24014/marwah.v21i2.14039>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Imani, P. R. P., Murniviyanti, L., & Armariena, D. N. (2023). Toxic Masculinity Patriarki Dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo. *ANTHOR Education and Learning Journal*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i1.89>
- Jannah, A. P. (2025). Stereotipe gender dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dalam *Walisongo Repository (Walisongo State Islamic University)*. Walisongo State Islamic University.
- Karimah, E. N. (2021). Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Di Dprd Diy. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 297–306. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17209>
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Khasanah, U. (2022). Perempuan dan Akses Ekonomi: Menelaah Program MAMPU di Indonesia. *IjouGS Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3504>
- Kiram, M. Z. (2020). Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh. *Community Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2503>
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology Education and*

- Development*, 4(1), 48–55.
<https://doi.org/10.52483/ijsed.v4i1.77>
- Kurnia, N., Indasah, K., & Amarilisya, A. (2022). Tren Kajian Media, Gender dan Inklusi Sosial dalam Senarai Jurnal Komunikasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 117. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i2.6784>
- Kurniasari, D. (2021). Partisipasi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Muslimah Di Sektor Informal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12517>
- Kurniawan, A. (2021). Gender Di Masa Krisis: Telaah Refleksi Kepemimpinan Perempuan Dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perempuan. *Equalita Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i1.8378>
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Kusumaningrum, E., Wardianto, B. S., & Nugroho, R. A. (2023). Subordinasi Gender Dalam Kumpulan Cerpen Bukan Permaisuri Karya Ni Komang Ariani. *Lingua Rima Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(2), 67. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v12i2.8643>
- Kuswandi, K., & Madianwati, S. S. (2025). Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5009>
- Lestari, S., Winarni, R., & Sumarwati, S. (2025). Representation of Kimberle Crenshaw's intersectionality in the novel Rara Mendut by Y. B. Mangunwijaya. *Studies in English Language and Education*, 12(2), 1008–1022. <https://doi.org/10.24815/siele.v12i2.36973>
- Mahyus, M., Wahida, N., Putriani, P., Fatima, S., & Faisal, M. (2025). Promosi Kesetaraan Gender dan Penghapusan

- Diskriminasi. *Journal Social Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
<https://doi.org/10.55638/sosial.v2i1.376>
- Makhanya, M. T. B. (2024). Perspective chapter: Examining the intersecting connections between intersectionality and socioeconomic inequality. Dalam *IntechOpen eBooks*.
 IntechOpen.
<https://doi.org/10.5772/intechopen.1003841>
- Manalu, Y. Br., Simatupang, R. H. R., & Silaen, C. F. B. R. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 27–40.
<https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.81>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics Business Management & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59.
<https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Maulid, P. (2022). Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 305–334.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17534>
- Maulida, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 71–79.
<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6>
- Meo, E. N., & Boro, V. I. A. (2021). Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *PERSPEKTIF*, 10(1), 204–210.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4274>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129–140.
<https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>

- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *IjouGS Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>
- Munir, M., & Saidah, R. (2025). Keadilan Gender Di Indonesia: Antara Realitas Patriarki Dan Peluang Perubahan. *MIYAH Jurnal Studi Islam*, 21(2), 1–38. <https://doi.org/10.33754/miyah.v21i02.1677>
- Mursalin, B. A., Putri, B. S., & Amelia, J. (2024). Social Welfare Issues for Women in Urban Areas: A Systematic Review of Indonesian Literature. *Women Education and Social Welfare*, 1(2), 88–97. <https://doi.org/10.70211/wesw.v1i2.244>
- Nabila, S., & Noviana, F. (2021). Marginalization of Women in Higuchi Ichiyou's Nigorie Short Story: A Feminism Studies. *Japanese Research on Linguistics Literature and Culture*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.33633/jr.v3i2.4675>
- Najwah, N. (2021). Gender Analysis On The Misiogynis Hadiths In Al-Kutub Al-Tis'ah. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur an dan Hadis*, 22(1), 205–229. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-10>
- Nasiah, Z., & Hakim, M. L. (2025). Policy Analysis of the Indonesian Government on Gender Inequality in the Workplace. *Journal of Politics and Democracy*, 5(1), 48–57. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.107>
- Naswa, N. (2025). Analisis Kesenjangan Gender Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia. *QISTINA Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1189–1200. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6490>
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.197>
- Nugroho, A., Suseno, S., & Prabaningrum, D. (2021). The The Feminism Perspective in the "Si Parasit Lajang" Novel by Ayu Utami: A Feminist Standpoint Theory Nancy C. M.

- Hartsock Studies. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 133–141.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.48329>
- Nugroho, B. A., & Suhendi, I. D. (2022). Stereotip dan Resistensi Perempuan dalam Cerpen Payudara Nai-Nai Karya Djenar Maesa Ayu. *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(1), 78–84.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v11i1.50138>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1).
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nurmadani, N., Darmawan, M. R., & Danny, F. (2025). Gender dalam Perspektif Aliran Feminisme: Analisis Wacana tentang Hakikat dan Kedudukan Perempuan. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 2(2), 142–152. <https://doi.org/10.64420/jgmnds.v2i2.380>
- Octaviani, C. N., Prihantoro, E., Sariyati, S., & Banowo, E. (2022). Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia. *Jurnal Broadcasting Communication*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>
- Oktaviani, A., & Megawati, M. (2021). Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 90–111.
<https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4730>
- Pramesti, A. A., & Andalas, E. F. (2023). Konstruksi Sosial Wanita Ideal Dalam Novel Gadis Minimarket Karya Sayaka Murata. *FON Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 19(2), 187–197.
<https://doi.org/10.25134/fon.v19i2.6509>
- Putri, P. W., & Kamala, L. D. A. B. (2026). Emansipasi Perempuan Bali di Tengah Cengkeraman Adat Patriarki: Analisis Feminisme. *Wathan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 182–197.
<https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.469>
- Rachman, A. H. (2023). Reinterpreting Feminism in Ideology and Practice. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(1), 86.
<https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i1.37501>

- Rahmadani, N. D., & Agustina, I. F. (2024). Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.34>
- Rahmayani, E. S., Hutabarat, J. S., Hutabarat, Y. D., Hariadi, M. F., & Pangestoeti, W. (2025). Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural: Perspektif Sosial, Hukum dan Perlindungan Korban. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 513–521. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996>
- Ramadhan, F. R. (2018). “Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki!”: Resistensi pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru. *Antropologi Indonesia*, 38(2). <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773>
- Ridwan, R., & Inhilda, I. (2025). Romantisasi atau Pembebasan? Kritik Feminisme Terhadap Representasi Perempuan dalam 'Hanya Dalam Puisi' Karta Ajip Rosidi. *Prosodi*, 19(2), 263–278. <https://doi.org/10.21107/prosodi.v19i2.31571>
- Rimbawan, I. P. D., & Nurhaeni, A. (2024). Gender Equality, Disability and Social Inclusion Approach to Disaster Management Policy: The Case of the Bali Disaster Response Authority. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 169–192. <https://doi.org/10.15575/jispo.v13i2.28396>
- Rohendi, L., & Shamsu, L. S. (2023). Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 269–278. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>
- Rohmatullah, Y. (2022). Modernitas Dan Respon Agama (Telaah Tentang Feminisme Diskursus Gender Dalam Islam). *Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i1.29936>
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its

- Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162–181.
<https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>
- Saputra, D., & Lisnarini, N. (2023). Strategi Media Sosial dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Bagi Perempuan: Analisis Wacana Kritis di Instagram @Magdaleneid. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 9(2), 134–148.
<https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.12530>
- Saputra, I. P. W., & Hasrin, A. (2022). Dekonstruksi Ideologi Feminisme Pada Kehidupan Perempuan Pesisir Pantai Hyatt, Sanur-Bali. *Jurnal Paradigma Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 95–104.
<https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i2.5577>
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22–32.
<https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>
- Sarmauli, S., H, H. J., Veronika, S., & Yuverdina, Y. (2024). Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(2), 66–70.
<https://doi.org/10.70437/ijoed.v1i2.17>
- Sejati, T., Wijaya, E., & Widarti. (2025). Analisis Studi Kajian Teoritis Feminisme. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 6(1), 170–177.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.7744>

- Shintiya, P., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). WARISAN PATRIARKI: Hambatan Struktural Bagi Perempuan Di Dunia Kerja. *Sabana Jurnal Sosiologi Antropologi dan Budaya Nusantara*, 4(2), 171–179. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>
- Silfiah, R. I., & Humiati, H. (2023). The Relevance of Gender Mainstreaming in Indonesia to Women's Rights in Islamic Law. *Lampung Journal of International Law*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.25041/lajil.v5i1.2757>
- Siregar, R. A., & Rosramadhana, R. (2022). Gerakan Responsif Gender Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Pandemi. *Buddayah Jurnal Pendidikan Antropologi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24114/bdh.v4i1.30063>
- Situmeang, I. M. N. S. M. T. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162–177. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>
- Soesilo, G. B., Alfian, Muh., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>
- Song, G., Lê, T. N. A., & Nguyễn, T. K. D. (2023). Inclusion of Intersectionality and Gender Analysis in Social Policy Development in Vietnam. *Vietnam Academy of Social Sciences s VSSR*, 216(4), 3–20. [https://doi.org/10.56794/vssr.4\(216\).3-20](https://doi.org/10.56794/vssr.4(216).3-20)
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(4), 513–520. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.19034>
- Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>

- Subkhan, C. M., Kalya, E., & Indriyany, I. A. (2026). Politik Gender dan Kontestasi Maskulinitas di Media Sosial: Analisis Representasi Emil Mario dalam Ruang Digital. *Journal of Legal Political and Humanistic Inquiry*, 1(4), 54–66. <https://doi.org/10.65310/084syg79>
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IjouGS Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Sumampouw, L. A. A., Patricia, M., & Zamaya, N. F. N. (2023). Analisis Komunitas Feminis Yogya (Gender Mahardika) Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 159. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.7124>
- Susanti, Y., & Patonah, R. (2020). Peran Perempuan Terhadap Penguatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan dan Akuntansi)*, 8(2), 107. <https://doi.org/10.25157/je.v8i2.4324>
- Syafrin, N. S. R., & Syam, F. (2024). Dinamika Gender Di Area Urban Indonesia: Sebuah Eksplorasi Tentang Peran Profesional Dan Domestik Di Tamalanrea, Makassar. *SosioReligius Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 143–162. <https://doi.org/10.24252/sosioReligius.v9i1.47415>
- Tanjung, R., Lubis, M. R., Hasibuan, S., & Dasopang, N. (2025). Kritik Feminis Terhadap Representasi Gender Dalam Media. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 57–68. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8011>
- Tarigan, F. P. (2024). Meretas Mitologi Lumimuut-Toar: Analisis Etika Perdamaian dalam Mengukir Kesetaraan Gender Masyarakat Minahasa di Indonesia. *Aradha Journal of Divinity Peace and Conflict Studies*, 3(2), 161–171. <https://doi.org/10.21460/aradha.2023.32.1285>
- Triadi, I., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. *Begawan Abioso*, 15(1), 29–40. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.987>

- Udasmoro, W., & Setiadi, S. (2021). Gender Discourses in Positioning Indonesian Female Migrant Workers. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 237. <https://doi.org/10.22146/jsp.54034>
- Wahid, A. (2023). Nahdhatunnisa: Perempuan NU Perspektif Feminisme. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 195–206. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.25375>
- Waylen, G. (2013). Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. *Political Research Quarterly*, 67(1), 212–223. <https://doi.org/10.1177/1065912913510360>
- Wijana, I. N., Listiawati, N. P., & Ekaningtyas, N. L. D. (2024). Access to Education for Hindu Women Amidst the Patriarchal Culture of the Balinese Tribal Community on the Island of Lombok, Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 321–330. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3174>
- Yaneri, A., & Deswanti, A. D. (2021). Analisis Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial Pada Program Perlindungan Sosial: Studi Kasus Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. *Pekerjaan Sosial*, 20(1), 70–84. <https://doi.org/10.31595/peksos.v20i1.381>
- Yanti, F., Ramadhani, M., Haq, F. N., & Pratiwi, D. T. (2025). Kesenjangan Gender sebagai Pilar Pembangunan Masyarakat: Tantangan, Strategi, dan Rekomendasi Kebijakan. *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan*, 19(2), 119–133. <https://doi.org/10.38075/tp.v19i2.582>
- Yurike, Y., & Syafruddin, Y. S. (2025). Peran Gender dalam Kegiatan Pertanian di Nagari Api-Api Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *INSOLOGI Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i1.4809>
- Yusro, B. R. F. (2024). Interseksionalitas Dan Bentuk Ketertindasan Jeng Yah, Tokoh Utama Series Gadis Kretek. *Egalita Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, 19(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.25222>

BAB 8

ISU-ISU LINGKUNGAN

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) memandang bahwa keberadaan manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan hidup tempat tinggalnya yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup bukanlah semata sebuah ruang yang memiliki wujud secara fisik dan ruang hampa. Lingkungan memiliki makna lebih yakni sebagai sebuah ruang spasial budaya manusia tempat berproses untuk mengonstruksikan sebuah nilai, norma, tradisi dan makna kehidupannya. Manusia dan lingkungan membentuk interaksi yang dinamis dimana lingkungan fisik berperan menjadi ruang hidup yang penuh dengan makna simbol dan kebudayaan. Selanjutnya simbol dan budaya yang diciptakan setiap kelompok akan menjadi penciri identitas kolektif masyarakat tersebut (Adiwijaya Saputra & Bakat, 2015).

Pada konteks lain, hakikat keberadaan manusia merupakan bagian dari makhluk ekologis. Hal tersebut menempatkan bahwa manusia bukanlah satu satunya penguasa tunggal di luar alam semesta namun ia adalah bagian yang terintegrasi atau menyatu sebagai bagian dari ekosistem. Manusia dalam sistem ekologi tergantung kepada keberadaan lingkungannya. Begitupula lingkungan memiliki mutu yang baik tidak terlepas dari peran manusia. Setiap keputusan, tindakan dan pola kebudayaan yang dikembangkan manusia akan berdampak terhadap ekosistemnya. Oleh karena itu, kesadaran tentang posisi manusia dalam jaring - jaring ekologis sangat penting. Bahkan dalam ajaran Islam, menempatkan manusia memiliki kedudukan tinggi sebagai *Khalifah* atau pemimpin di alam semesta ini. Kedudukan manusia menempatkan peran kunci dalam menjaga keberlangsungan alam semesta di tengah permasalahan krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Setiap individu diharapkan

memiliki kesadaran tanggung jawab moral terhadap pelestarian alam (Anggraeni, 2018). Dapat disimpulkan bahwa manusia dan lingkungan satu kesatuan yang membentuk sistem interaksi saling memengaruhi. Pemahaman ISBD dan nilai spiritualitas dalam Islam menjelaskan bahwa manusia merupakan bagian integral dari ekosistem sebagai makhluk ekologis sekaligus *khalifah* atau pengelola. Oleh karena itu, kesadaran kedudukan dan peran tersebut harus mendorong tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam demi keberlangsungan hidup bersama.

Pada BAB ini akan mengkaji secara komprehensif tentang dinamika interaksi antara manusia dan alam melalui sub-bahasan utama. Pembahasan akan diawali dengan uraian analisis mengenai hubungan manusia dan lingkungan serta pandangan budaya tentang alam. Selanjutnya, bab ini menguraikan isu lingkungan dalam perspektif sosial budaya dan terakhir membahas isu lingkungan global dan nasional.

8.1 Hubungan Manusia dan Lingkungan

Hubungan antara manusia dan lingkungan alam tidak dapat dipisahkan. Sejak awal, peradaban manusia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, lambat laun manusia tidak lagi hanya beradaptasi dengan lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Keadaan dinamika tersebut yang selanjutnya memunculkan hubungan timbal balik yang kompleks, dimana kelangsungan hidup alam bergantung pada tindakan manusia, dan sebaliknya kualitas hidup manusia ditentukan oleh kesehatan ekosistem di sekitarnya.

8.1.1 Komponen Dasar Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu konsep atau kesatuan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem juga merupakan kesatuan unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. 1). Struktur menunjukkan suatu kompleksitas dan keanekaragaman, dimana semakin kompleks struktur ekologi

maka semakin kompleks atau semakin beragam spesiesnya. Pada tingkat ekosistem yang kompleks menunjukkan struktur yang kompleks pula seperti jaring-jaring atau rantai makanan yang rumit. Semakin kompleks suatu ekosistem misal pada hutan hujan tropis di Indonesia maka semakin tinggi pula keanekaragaman spesiesnya. Keanekaragaman ini menyebabkan ekosistem lebih tahan kuat terhadap perubahan atau gangguan alam. 2). Fungsi menunjukkan bahwa dalam ekosistem memiliki fungsi sebagai pengatur aliran energi dan siklus materi. Fungsi ekosistem berfokus pada proses biologis, kimiawi, dan fisik yang menjaga ekosistem tetap berjalan. Sebagai contoh aliran energi matahari masuk ke dalam ekosistem melalui fotosintesis oleh produsen, kemudian mengalir ke berbagai tingkat konsumen melalui rantai makanan. Sebagian energi tersebut akan terlepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Sedangkan siklus materi (*Biogeokimia*) dapat ditunjukan dari adanya keberadaan unsur-unsur penyusun kehidupan (seperti karbon, nitrogen, air, dan fosfor) tidak pernah habis, melainkan berputar terus menerus dan didaur ulang dari lingkungan ke makhluk hidup, lalu kembali ke lingkungan (Tansley, Odum, dan Soemarwoto dalam (Efendi, Salsabila and Malik, 2018)).

Ekosistem merupakan sebuah sistem kesatuan utuh dan terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam rangka memahami dinamika sistem tersebut, maka perlu dideskripsikan pilar utama lingkungan hidup berdasarkan jenisnya. Terdapat tiga jenis lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan atau binaan, dan lingkungan hidup sosial (Efendi, Salsabila and Malik, 2018).

1. Lingkungan Hidup Alamai

Lingkungan hidup alami adalah suatu lingkungan atau ruang yang terbentuk secara murni melalui suatu proses dinamika bumi tanpa rekayasa atau campur tangan manusia. Lingkungan alami mencakup keseluruhan ekosistem di darat maupun di perairan yang tersusun atas komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda tidak hidup. Komponen fisik di alam berinteraksi langsung dengan komponen biologis,

sebagai contoh suhu, iklim, relief tanah, dan hidrologi sebagai komponen fisik berinteraksi langsung dengan komponen biologis seperti flora, fauna, dan mikroorganisme. Lingkungan alami bersifat dinamis karena cenderung memiliki heterogenitas organisme yang tinggi. Tingginya keragaman hayati menciptakan rantai makanan yang kompleks membentuk jejaring interaksi yang saling bergantung. Sebagai contoh proses dalam simbiosis dan penyerbukan. Keadaan tersebut berdampak pada kemampuan lingkungan alami untuk melakukan regenerasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara mandiri.

2. Lingkungan Hidup Buatan / Binaan

Lingkungan hidup binaan atau buatan adalah ruang yang sengaja direkayasa dan diciptakan oleh manusia. Lingkungan buatan melibatkan penggunaan bantuan teknologi baik secara sederhana maupun modern untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup seperti transportasi, industri, pertanian dan permukiman. Lingkungan binaan cenderung bersifat kurang beragam dan labil. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan atau penataan komponen yang ada selalu dipilih dan diselaraskan untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia dan aktivitasnya. Dengan demikian lingkungan buatan memiliki tiga karakteristik utama yaitu terbentuk dari hasil rekayasa manusia, memerlukan pengelolaan dan perawatan secara terus menerus agar berfungsi dengan baik, dan keanekaragaman spesies baik tumbuhan maupun hewan rendah karena dipilih yang menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi manusia.

3. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan atau ruang tempat manusia berinteraksi, dan saling memengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan ini tidak terbentuk secara alami namun merupakan hasil dari adanya aktivitas dan interaksi antar manusia seperti adanya proses komunikasi, kerja sama, dan bahkan konflik sekalipun adalah interaksi. Berikut ini ciri atau karakteristik lingkungan sosial;

1. Lingkungan sosial terdiri dari norma, nilai, aturan, serta kebiasaan yang disepakati bersama dalam kelompok.
2. Lingkungan sosial melahirkan lingkungan binaan sebagai ruang hidup dan berinteraksi, misalnya penataan tata ruang pemukiman untuk memudahkan interaksi.
3. Terdapat hubungan saling ketergantungan antara individu dan masyarakat, lingkungan sosial dapat membentuk keperibadian individu.
4. Lingkungan sosial membentuk karakter budaya khas. Lingkungan sosial terbagi menjadi dua yaitu lingkungan primer / keluarga dan lingkungan sekunder / masyarakat. Keduanya akan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi identitas diri manusia.
5. Lingkungan sosial bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman, sebagai contoh keberadaan teknologi merubah pola atau bentuk interaksi sosial. Hal ini menempatkan manusia bukan sekedar pengguna lingkungan alam namun juga pusat system sosial yang menentukan kualitas lingkungan sekitarnya.

Lingkungan alami, buatan, dan sosial saling terikat membentuk sebuah siklus hubungan yang tidak terpisahkan. Lingkungan alami menyediakan sumber daya fisik atau bahan baku yang dibutuhkan manusia untuk membangun infrastruktur pada lingkungan buatan. Selanjutnya, kualitas lingkungan buatan tersebut mempengaruhi pola interaksi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat di dalam lingkungan sosial. Pada tahap selanjutnya, kesadaran dan kebijakan di lingkungan sosial ini akan menentukan bagaimana manusia menjaga atau merusak kelestarian lingkungan alami di sekitar tempat tinggalnya.

8.1.2 Konsep Timbal Balik Manusia dan Lingkungan

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang bersifat dua arah. Lingkungan menyediakan sumber daya yang membentuk gaya hidup dan budaya manusia. Sedangkan aktivitas manusia dapat mengubah alam melalui teknologi dan industri yang berkembang. Hubungan ini menguatkan bahwa

kelangsungan hidup manusia mutlak bergantung pada kelestarian alam. Alam hakikatnya membentuk manusia karena kekayaan alam, iklim, dan bentang alam dapat memengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat hidup dan berbudaya. Sebagai contoh pada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai secara alami memiliki budaya, pola makan, dan mata pencaharian sebagai nelayan. Pada sisi lain, manusia dapat mengubah alam. Manusia tidak hanya menerima apa adanya yang tersedia di alam, tetapi juga memanfaatkan dan merombak alam untuk memenuhi kebutuhannya melalui teknologi dan industri (Romario and Armada Riyanto, 2024). Hal tersebut memunculkan dua peran manusia terhadap alam yaitu:

1. Peran positif manusia terhadap alam seperti usaha pelestarian, reboisasi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan
2. Peran negatif manusia terhadap alam seperti polusi, deforestasi, dan eksploitasi berlebihan yang berujung pada kerusakan alam

Hubungan manusia dan alam menunjukkan ketergantungan dan menciptakan hubungan sebab akibat atau timbal balik. Hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik misalnya ketika manusia dapat memanfaatkan dan memodifikasi lingkungan, maka dapat mendukung perkembangan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan bijak dapat menimbulkan kerusakan. Sebagai contoh aktivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terpadu apabila diolah dengan metode *sanitary landfill* (ditimbun tanah) atau diubah menjadi kompos dan energi, maka kota tetap bersih dan mencegah penyebaran penyakit. Namun, jika sistem pengelolaan yang buruk misalkan meluber akan mencemari air tanah berisiko air warga terkontaminasi bakteri *E. coli*, yang memicu wabah diare dan penyakit kulit. Dengan demikian apabila manusia merusak alam secara berlebihan maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam dan mengancam kelestarian hidup manusia (Tue *et al.*, 2024). Oleh karena itu

menjaga kelestaraan alam adalah syarat utama agar manusia bisa hidup berkembang.

8.2 Pandangan Budaya tentang Alam

Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas budaya masing-masing. Keragaman budaya tersebut akan menghasilkan keragaman pula dalam mempersepsikan alam. Terdapat sebagian masyarakat memandang bahwa alam adalah ibu pertiwi, yang memberi kehidupan maka perlu dilestarikan melalui aturan hukum adat. Sementara pada komunitas masyarakat industri modern, alam dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Perbedaan budaya atau kultural ini dapat menimbulkan perbedaan dalam praktek pengelolaan lingkungan yang sangat berbeda. Mengkaji pandangan budaya tentang alam adalah strategi untuk memahami bagaimana suatu masyarakat menafsirkan, berinteraksi, dan memperlakukan lingkungannya (Tue *et al.*, 2024).

Pandangan budaya terhadap alam mencerminkan bagaimana suatu masyarakat memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui keselarasan moral dan tradisi. Hubungan ini erat kaitannya dengan etika lingkungan, sebuah refleksi kritis yang menuntut manusia untuk tidak memperlakukan alam sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki hak untuk dilestarikan. Nilai-nilai etis ini nampak nyata melalui kearifan lokal, di mana masyarakat menerapkan hukum adat, mitos, serta ritual guna menjaga keseimbangan ekosistem.

1. Etika Lingkungan

Etika lingkungan merupakan prinsip moral yang digunakan sebagai petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengupayakan terwujudnya lingkungan yang baik. Etika lingkungan menuntun tingkah laku positif manusia dalam rangka mempertahankan kelestarian dan fungsi lingkungan (M. Ied Al Munir, 2023). Oleh karena itu, dalam menerapkan etika lingkungan perlu memperhatikan empat hal berikut ini:

- a. Manusia merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, maka selain menyayangi diri sendiri juga menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya.
- b. Manusia merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, maka perlu berupaya untuk menjaga kelestarian, dan keseimbangan alam.
- c. Kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi.
- d. Lingkungan diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan untuk manusia saja (Hudha, Husamah and Rahardjanto, 2024).

Berikut ini adalah teori-teori dalam Etika Lingkungan (Hudha, Husamah and Rahardjanto, 2024) sebagai berikut :

- a. Etika Ekologi Dangkal/*Shallow Ecology* (*Teori Antroposentrisme*)

Etika ekologi dangkal atau antroposentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan menempatkan manusia pada kedudukan dan martabat tertinggi. Teori ini menganggap alam dan makhluk hidup lain hanyalah objek atau alat yang diciptakan untuk dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia.

- b. Etika Ekologi Dalam (*Deep Ecology*)

Etika Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) adalah pandangan holistik yang menempatkan alam semesta sebagai satu kesatuan kehidupan yang saling menopang satu sama lain. Teori ini mendudukan semua makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan memiliki nilai dan kedudukan yang setara, serta hak yang sama untuk hidup dan berkembang di alam. Berikut ini teori-teori yang termasuk dalam *Deep Ecology*:

- 1) *Teori Biosentrisme*

Biosentrisme adalah teori yang menolak pandangan *antroposentrisme*. Teori ini menempatkan kehidupan sebagai pusat perhatian dan menganggap bahwa semua makhluk hidup (manusia, hewan, dan

tumbuhan) memiliki nilai intrinsik/moral yang sama pada diri mereka sendiri, mengabaikan penilaian menguntungkan tidaknya bagi kepentingan manusia.

2) *Teori Ekosentrisme*

Ekosentrisme adalah teori yang memandang komponen biotik (hidup) dan abiotik (tak hidup) *berada* dalam satu kesatuan ekosistem saling membutuhkan dan terkait. Teori ini juga menolak paham *antroposentrisme* yang hanya berfokus pada manusia. Namun, jika biosentrisme hanya menekankan moralitas pada makhluk hidup, ekosentrisme memperluas tanggung jawab moral manusia ke komunitas ekologis, termasuk unsur abiotik. Dalam pandangan menekankan siklus hidup-mati dan pola pemangsaan dianggap sebagai hukum alam yang sah demi menjaga ritme keseimbangan ekosistem bumi. Termasuk perilaku manusia mengkonsumsi hewan dan tumbuhan adalah hukum alam.

3) *Teori Teosentrisme*

Teori *teosentrisme* melihat alam semesta diciptakan Tuhan yang wajib dijaga oleh manusia sebagai bentuk menjalankan perintah atau pengabdian pada Tuhan. Dalam ajaran agama melarang perbuatan eksploitasi berlebihan yang mendasarkan hawa nafsu bukan kebutuhan. Doktrin agama membatasi dan mengatur pola hubungan manusia dengan alam, kekuatan iman dapat mempengaruhi pola perilaku terhadap alam.

4) *Teori Ekofeminisme*

Ekofeminisme tidak sepaham dengan teori *antroposentrisme* dan *androsentrisme* (berpusat pada laki-laki). Paham ini merupakan gabungan elemen feminisme dan gerakan hijau, yang memandang bahwa krisis ekologi dan penindasan terhadap perempuan bersumber dari akar yang sama, yaitu budaya patriarki dan dominasi logika dalam sistem kapitalisme modern.

5) *Teori Zoosentrisme*

Zoosentrisme atau etika pembebasan binatang adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang berdasarkan kemampuan untuk dapat merasakan kesenangan dan penderitaan. Teori ini menekankan perlunya standar moral yang mewajibkan manusia dalam memperlakukan binatang dengan belas kasih.

6) *Teori Neo-Utilitarianisme*

Teori *Neo-utilitarianisme* merupakan etika lingkungan yang membolehkan manusia memanfaatkan alam namun sebatas kebutuhan, dan wajib tidak merusaknya.

2. Kearifan Lokal

Secara istilah, kata *kearifan lokal* terdiri dari dua suku kata yaitu *kearifan* dan *lokal*. *Kearifan* mengacu pada kebijaksanaan atau kecerdasan, dan *lokal* mengacu pada hal-hal yang terkait dengan daerah setempat. Maka kearifan lokal dapat diartikan sebagai konsep-konsep cerdas yang berakar pada kebijaksanaan dan dipegang teguh serta dianut oleh anggota masyarakat setempat (Ramadhanti, 2020).

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bagian dari budaya dalam suatu masyarakat. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun dari antar generasi termasuk didalamnya seperti cerita dari mulut ke mulut, cerita rakyat, permainan rakyat pribahasa, lagu, dan lain-lain. Kearifan lokal bagian dari pengetahuan yang dibentuk oleh komunitas masyarakat setempat melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman mereka terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat (Ahmad, Soeprabowati and Purnaweni, 2022). Kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan sangat erat dengan upaya konservasi lingkungan dalam bentuk praktik kearifan lokal. Tradisi budaya dapat dijadikan sarana pelestarian lingkungan karena dibalik setiap tradisi memiliki filosofi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Pembangunan, pemerintah dapat

memahami potensi budaya untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa contoh kearifan lokal dalam mendukung pelestarian alam:

a. Ladang berpindah di Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Perladangan berpindah (*shifting cultivation*), merupakan salah satu usaha tani tradisional di mana hutan ditebang kemudian dibakar selanjutnya ditanami tanpa melalui proses pengolahan tanah. Lahan tersebut digunakan antara satu sampai tiga tahun. Kemudian lahan tersebut ditinggalkan dan membuka lahan baru di lokasi lain. Saat ditinggalkan, lahan tersebut diistirahatkan atau dibiarkan dalam waktu yang cukup panjang antara 3 sampai puluhan tahun dan akan membentuk hutan sekunder. Hutan sekunder tersebut dapat dibuka kembali sebagai ladang. Proses pembakaran lahan pun diatur seperti pembuatan sekat bakar untuk mencegah api meluas ke area lain (Hagong, 2022). Bentuk kearifan lokal ini menunjukkan bahwa siklus perpindahan lahan menjadi instrumen pemulihan hara tanah secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga melintasi generasi.

b. Nyadran Gebyog di Pekalongan

Di kawasan hutan lindung Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan tepatnya di Desa Pungangan, terdapat tradisi Nyadran Gabyog. Tradisi Nyadran Gabyog memiliki korelasi ekologis yang kuat sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga pelestarian alam. Tradisi tersebut menunjukkan perwujudan konsep deep ecology atau hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dengan ekosistem hutan dan sumber mata air. Salah satu bentuk ritual dalam Nyadran Gebyog adalah dilaksanakan di hutan dan mandi atau bersuci di sungai. Sungai berperan penting bagi masyarakat sehingga menjadi sebuah komitmen kolektif untuk menjaga kelestarian sungai dan melarang penebangan pohon secara liar demi kelangsungan hidup lingkungan

sekitar. Dengan demikian, Nyadran Gabyog bukan sekadar seremonial budaya, melainkan sebuah benteng ekologis dari ancaman kerusakan lingkungan (Ahmad, Soeprabowati and Purnaweni, 2022).

- c. *Pasang ri Kajang* sebuah hukum adat di masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kearifan lokal dalam mendukung pelestarian alam terlihat dari kepatuhan mutlak terhadap doktrin leluhur yang disebut *Pasang ri Kajang*. Hubungan ini tercermin nyata dalam pembagian zonasi hutan adat, di mana kawasan hutan keramat (*Borong Karamaka*) ditetapkan sebagai wilayah suci yang sama sekali tidak boleh disentuh. Hutan dipercaya sebagai tempat turunnya manusia pertama di bumi. Karena penghargaannya terhadap alam sangat tinggi, mereka melarang anggota masyarakatnya untuk menebang pohon, berburu satwa, serta berperilaku merusak alam. Mekanisme lain masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dengan membaginya menjadi beberapa kawasan, setiap bagian memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Kawasan pertama diberi nama *borong karamaka* atau hutan keramat diyakini sebagai tempat tinggal leluhur masyarakat Kajang. Kawasan tersebut harus jauh dari penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, pemanfaatan flora dan fauna, ataupun kunjungan-kunjungan lainnya kecuali kunjungan adat. Kawasan kedua, dinamakan *borong batasayya* atau hutan perbatasan. Fungsi hutan perbatasan untuk kebutuhan kayu namun tidak semua jenis kayu yang bisa diambil, hanya jenis kayu asa, nyato, dan pangi. Jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ada syarat yang harus dipenuhi ketika hendak mengambil kayu. Tradisi ini mendukung pelestarian hutan dan mata air (Nurlidiawati and Ramadayanti, 2021).

Kebudayaan berperan penting dalam pembentukan kesadaran sosial dan lingkungan. Melalui sarana nilai-nilai dan

norma dalam tradisi, kebudayaan mampu memengaruhi perilaku individu dan perilaku kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pada satu sisi, kebudayaan tradisional telah berhasil menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pada sisi lain, globalisasi dan modernisasi sering mengakibatkan degradasi nilai-nilai budaya lokal yang berpotensi memperlemah kesadaran lingkungan. Oleh Dengan demikian, integrasi yang terus menerus antara nilai-nilai tradisional dan pendekatan modern menjadi penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

8.3 Isu lingkungan dalam Perspektif Sosial Budaya

Isu lingkungan abad ke-21 semakin kompleks oleh karena itu memerlukan tanggung jawab kolektif dan perubahan perilaku manusia atau individu. Pengelolaan lingkungan yang bijaksana adalah kunci utama untuk meminimalisir terjadinya kerusakan. Hal ini memerlukan dukungan kesadaran sosial dan pengetahuan yang mendalam tentang dampak aktivitas atau tindakan manusia, maka pemahaman isu kritis lingkungan dari sudut pandang sosial-budaya menjadi penting untuk dibahas.

1. Kebudayaan Tradisional berperan Mendukung Pelestarian Lingkungan

Tradisi, kepercayaan dan adat istiadat lokal berperan besar dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kelestarian alam. Melalui tradisi budaya, masyarakat belajar untuk saling menjaga dan menghargai alam. Sebagai contoh, aktivitas gotong royong mampu memperkuat ikatan sosial dan melestarikan lingkungan. Pada masyarakat adat menganggap alam bagian dari hidup mereka yang dilestarikan secara berkelanjutan melalui berbagai ritual dan upacara adat. Wilayah yang masih memegang teguh adat istiadat lebih terjaga dari kerusakan lingkungan dibandingkan dengan wilayah modern (Amelia, 2023).

2. Kebudayaan Modern antara Tantangan dan Peluang terhadap Pelestarian Lingkungan

Budaya yang berkembang pada masyarakat modern cenderung menjauhkan manusia dari alam. Masyarakat di

kawasan perkotaan pada umumnya lebih memfokuskan pada keuntungan ekonomi daripada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, polusi dan eksploitasi alam di kota-kota besar terus meningkat karena warga kota tidak memiliki ikatan emosional atau spiritual dengan alam. Sebagai contoh, di berbagai kota pesisir seperti Jakarta (Teluk Jakarta) atau Bali (Teluk Benoa), kawasan hutan mangrove (bakau) yang berfungsi sebagai penahan abrasi dijadikan kawasan hunian mewah, reklamasi, dan pusat bisnis. Masyarakat modern memandang rawa mangrove sebagai lahan tidak produktif dari sisi finansial dan tidak adanya ikatan emosional dengan ekosistem pesisir, sehingga mereka menggantinya dengan beton demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Hal ini berakibat pada terjadinya banjir rob tahunan di kawasan tersebut.

Selain tantangan di atas, budaya modern juga memiliki peluang atau sisi positif melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Munculnya gerakan “zero waste” dan “green living” yang ada di media sosial akan berpotensi diadopsi oleh masyarakat luas. Inovasi digital akan membuka peluang besar untuk mesosialisasikan dan edukasi gaya hidup ramah lingkungan.

a. *Zero Waste*

Gerakan *Zero Waste* merupakan gerakan yang hadir sebagai respons terhadap krisis sampah. Termasuk menawarkan paradigma baru dalam mengelola sumber daya dan meminimalisir sampah (Sulastri, Zainuddin and Ahmad, 2025). Beberapa contoh gerakan *Zero Waste* adalah Gerakan meminimalkan sampah ke TPA dipandu oleh prinsip 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Rot, Recycle). Implementasi nyata gerakan ini terlihat dari maraknya toko curah (bulk store) serta kesadaran masyarakat untuk membawa wadah belanja mandiri guna menolak plastik sekali pakai. Upaya ini diperkuat dengan manajemen pengelolaan sampah mandiri di tingkat rumah tangga, seperti melakukan composting pada limbah organik serta memanfaatkan platform bank sampah digital untuk mendaur ulang sampah anorganik.

b. *Green Living*

Green Living adalah gerakan tentang gaya hidup ramah lingkungan yang fokus pada pelestarian bumi, efisiensi energi, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Konsep ini diterapkan sehari-hari seperti pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, pemilihan transportasi publik atau ramah emisi, serta pembangunan hunian hijau yang memaksimalkan ventilasi dan cahaya alami. Beberapa hambatan utama dalam mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan (*Green Living*) adalah faktor ekonomi, terutama karena tingginya harga produk berkelanjutan dibandingkan produk konvensional, terbatasnya akses terhadap produk ramah lingkungan, minimnya pilihan alternatif yang tersedia dan terjangkau di pasar. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk beralih ke pola konsumsi yang lebih hijau meskipun mereka memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Selain itu perilaku *Green Living* juga berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti nilai pribadi yang berkaitan dengan isu lingkungan, dan faktor eksternal seperti norma sosial dan pengaruh media sosial akan berpengaruh pada keputusan untuk menjalani gaya hidup berkelanjutan (Hijrah, L., Hakim, A. F., Hikmah, M., Nurrohmah, R., & Nadroh, 2025).

3. Kerusakan Lingkungan Merupakan Kerusakan Moralitas

Persoalan yang dihadapi dunia global saat ini adalah krisis lingkungan yang mengancam manusia dan alam. Kerusakan terjadi multidimensi, tidak hanya negara barat namun juga di negara kita. Kerusakan yang terjadi bukan hanya semata kerusakan lingkungan namun juga terdapat kerusakan moral dan akhlak manusia. Beberapa isu lingkungan yang kita hadapi saat ini adalah degradasi lingkungan seperti pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*), banjir, tanah longsor, kriminalitas dan dekadensi moral (Nurhayati, Ummah and Shobron, 2018).

Dekadensi moral dan degradasi lingkungan adalah sama-sama bentuk kemerosotan yang merugikan kehidupan. Dekadensi

moral merupakan runtuhnya nilai, akhlak, dan tata cara hidup yang baik dalam masyarakat. Sedangkan, degradasi lingkungan merupakan rusaknya alam seperti air, udara, dan tanah akibat perbuatan manusia (Herman *et al.*, 2023). Ketika moral manusia mengalami kemerosotan, maka muncul sikap egois dan tidak memedulikan alam sekitar. Akibatnya, alam menjadi rusak dan bentuk kerusakan tersebut berbalik mengancam kesehatan dan keselamatan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, perilaku membuang sampah sembarangan didasari hilangnya rasa tanggung jawab, kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap aturan demi egoisitas pribadi. Perilaku tersebut menyebabkan degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas sungai, memicu banjir dan meracuni ekosistem ikan.

4. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Islam

Bumi dan isinya diciptakan Allah sebagai tempat tinggal manusia dan diciptakan dengan sistem yang sangat seimbang. Manusia diberikan tugas penting sebagai pengelola dan perawat bumi atau *Khalifah* bukan sebagai pemilik atau penguasa yang bebas berbuat semena-mena. Manusia wajib bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT atas cara mereka memperlakukan alam. Meskipun Allah melarang perusakan, sebagian manusia tetap egois menghancurkan alam demi keinginan pribadi seperti menebang hutan sembarangan, menguras kekayaan laut secara berlebihan, dan mengotori udara dengan polusi asap. Perbuatan tersebut merusak sistem keseimbangan alam akibatnya dapat memicu berbagai bencana yang merugikan manusia itu sendiri. Dalam Q.S Al- Rum ayat 41 terdapat ayat yang menerangkan bahwa manusia adalah penyebab kerusakan di bumi. Adapun bunyi terjemah ayatnya sebagai berikut:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar

mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Al-Rûm [30] : 41).

Kerusakan alam saat ini terjadi karena sifat buruk manusia, seperti rakus, tamak, dan zalim. Secara humanisme, bencana dan ketidakseimbangan lingkungan timbul karena manusia terlalu egois dan ingin menguasai segala sesuatu. Allah SWT memang menciptakan dua sifat yang saling berlawanan di dalam diri manusia, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Kedua sifat ini akan selalu beradu apakah manusia akan menjadi perawat bumi atau menjadi perusakanya (Romario and Armada Riyanto, 2024). Penegasan ayat “*disebabkan karena perbuatan tangan manusia*” merupakan inti yang perlu dipahami. Ayat tersebut menempatkan manusia sebagai pihak utama kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan bukanlah sebuah takdir atau gejala alamiah semata yang otonom, melainkan hasil akumulasi kesalahan moral, gaya hidup dan tindakan manusia yang keluar dari prinsip keseimbangan. Fenomena polusi udara, pencemaran laut, deforestasi, dan perubahan iklim ekstrem merupakan bukti perbuatan manusia mengabaikan alam. Krisis ekologi juga terjadi akibat sikap eksploitatif dan pola konsumsi berlebihan, serta industrialisasi yang mengabaikan etika lingkungan. Ayat tersebut juga berperan sebagai diagnosa ilahiah terhadap kondisi alam yang sedang krisis dan menjadi refleksi moralitas manusia. Hubungan manusia dengan alam hendaknya didasari *ketauhidan* pengakuan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian terhadap sesama ciptaanNYA. Terdapat tanggung jawab peran khalifah manusia sebagai penjaga alam dan memulihkan kerusakan yang terjadi (Putri, Ahmadi and Aulia, 2025). Dengan demikian, manusia diharapkan melakukan perubahan paradigma dari eksploitasi menjadi keberlanjutan, dari sikap tamak menjadi rasa syukur, dan rasa pengabdian yang didasari iman. Al-Quran hendaknya menjadi dasar teologis yang kuat untuk membangun ekologi global yang lebih baik.

5. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan / Krisis Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Nurhayati, Ummah and Shobron, 2018), adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Faktor internal merupakan kerusakan alam yang terjadi dari proses alam murni yang terjadi dari dalam bumi dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Sebagai contoh, Letusan gunung berapi menimbulkan semburan abu vulkanik dan lava yang merusak vegetasi hutan, mencemari udara, serta mematikan ekosistem di wilayah sekitar. Selanjutnya, gempa bumi mengakibatkan pergeseran lempeng bumi yang meruntuhkan struktur tanah, mengubah topografi lahan, dan memicu tsunami yang merusak area pesisir.
- b. Faktor eksternal sepenuhnya bersumber dari perilaku manusia yang mengeksploitasi alam demi kenyamanan hidup tanpa memedulikan kelestarian ekosistem. Kelalaian manusia dalam merawat lingkungan ini pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem dan membuat kualitas kehidupan di dalamnya menjadi tidak maksimal. Contoh pembuangan limbah kimia cair ke sungai dan asap pabrik ke udara yang merusak kualitas air bersih serta dan memicu polusi udara. Demikian pula, pembukaan lahan perkebunan skala besar dengan cara dibakar berdampak pada emnurunnya keanekaragaman hayati dan menimbulkan bencana kabut asap.

8.4 Isu-Isu Lingkungan Global dan Nasional

1. Globalisasi dan Dampaknya bagi Lingkungan

Globalisasi dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua bagi bumi kita. Pada satu sisi, globalisasi berperan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pada sisi lain memicu kerusakan lingkungan. Setiap produk yang dihasilkan meninggalkan jejak karbon sehingga memicu perubahan iklim. Akibatnya, bencana alam sering terjadi dan

mengancam kehidupan di bumi. Energi dan sumber daya alam adalah modal kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan global menyebabkan manusia terus mengeksploitasi alam melampaui batas untuk pulih. Oleh karena itu akan memunculkan ruang diskusi apakah keuntungan yang diperoleh saat ini sebanding dengan kerusakan yang akan terwariskan pada generasi mendatang.

Aktivitas ekonomi manusia dalam perdagangan internasional memicu kerusakan lingkungan dan kerusakan tersebut dapat berbalik membebani perekonomian negara. Banyak industri kotor dipindahkan ke negara berkembang, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim global. Dampaknya selanjutnya yaitu bencana alam tahunan seperti banjir dan tanah longsor merusak infrastruktur sehingga memaksa pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan untuk dana darurat penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut maka pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan kebijakan publik yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Terdapat dua pola utama, dampak globalisasi bagi manusia dan lingkungan (Lailaningrum and Anasrulloh, 2026), yaitu :

- a. Dampak skala atau ukuran produksi
Perkembangan pasar global memicu dalam jumlah besar yang dikelola industri. Kegiatan industri tanpa diimbangi dengan aturan ramah lingkungan memicu tingginya emisi karbon yang dihasilkan akibat eksploitasi alam.
- b. Dampak struktur ekonomi
Globalisasi berdampak pada perubahan arah industri suatu negara. Negara berkembang banyak yang berperan sebagai penyedia bahan mentah akibatnya mendorong eksploitasi yang berlebihan untuk memenuhi target dan permintaan dunia. Sebagai

contoh, pembukaan lahan baru yang luas berisiko merusak alam.

Berdasarkan uraian tentang pola dampak globalisasi di atas, menunjukkan bahwa peran negara berkembang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah dampak globalisasi bagi negara berkembang menurut (Lailaningrum and Anasrulloh, 2026) yaitu :

1) Dampak Positif

- a. Globalisasi meningkatkan kesadaran global akan isu lingkungan
- b. Globalisasi meningkatkan peran negara maju dalam konservasi
- c. Globalisasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan mempengaruhi perilaku manusia untuk semakin ramah lingkungan.

2) Dampak Negatif

- a. Eksploitasi sumberdaya alam karena meningkatnya konsumsi terhadap sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan
- b. Polusi Industri melalui emisi gas rumah kaca maupun limbah industri dalam bentuk lainnya
- c. Deforestasi dan kerusakan habitat karena kebutuhan pasar yang semakin tinggi.

2. Urbanisasi, Lingkungan dan Pembangunan di Indonesia

Urbanisasi dan penurunan kualitas lingkungan merupakan isu yang berkaitan dan sering diperhatikan sebagai bagian dari dinamika perkembangan wilayah modern. Urbanisasi memiliki dua sisi seperti mata uang. Pada satu sisi, perpindahan penduduk ke area perkotaan memicu pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan infrastruktur yang progresif. Namun pada sisi lain, ekspansi kota yang tidak terkendali dapat berakibat pada pelestarian lingkungan seperti adanya konversi lahan hijau menjadi kawasan beton. Hal ini menyebabkan kota mengalami ancaman krisis lingkungan, mulai dari polusi udara, banjir

tahunan akibat hilangnya resapan air, hingga penumpukan limbah domestik (Natasha *et al.*, 2025). Oleh karena itu, tantangan pembangunan saat ini adalah bagaimana menyelaraskan laju urbanisasi dengan kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan untuk tercapainya kota yang berkelanjutan.

Solusi atas degradasi lingkungan akibat urbanisasi menurut (Praja and Asran, 2025) diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan tata ruang kota yang adaptif berbasis ekologi,
- b. Perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) yang ketat,
- c. Pelibatan aktif masyarakat membentuk kesadaran lingkungan kolektif.
- d. Pemerintah perlu mengintegrasikan konsep kota ramah lingkungan (*eco-city* atau *smart green city*) untuk mengontrol laju konversi lahan penahan air, memperkuat zonasi wilayah ekologis, serta mendorong penggunaan energi bersih dan manajemen limbah.
- e. Pemerataan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja baru di area pedesaan untuk meredam arus urbanisasi.

Melalui sinergi kebijakan di atas, kota pada masa mendatang adalah kota yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan daya dukung alam serta keberlanjutan hidup generasi mendatang.

3. Isu-Isu Lingkungan Global

Narasi atau diskusi tentang krisis lingkungan bukan lagi sebuah prediksi masa depan, melainkan realitas yang harus dihadapi saat ini. Berikut adalah 16 besar isu lingkungan tahun 2026 yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan sumber web eart.org (Robinson and Igini, 2026).

- a. Perubahan Iklim (*Climate Change*)
- b. Pemanasan Global (*Global Warming*)
- c. Polusi Udara, Air, dan Tanah (*Air, Water, and Soil Pollution*)

- d. Deforestasi dan Penggundulan Hutan (*Deforestation*)
- e. Penipisan Lapisan Ozon (*Ozone Layer Depletion*)
- f. Polusi Plastik (*Plastic Pollution*)
- g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Loss*)
- h. Pengasaman Laut (*Ocean Acidification*)
- i. Penipisan Sumber Daya Alam (*Natural Resource Depletion*)
- j. Krisis Air Bersih (*Water Scarcity*)
- k. Limbah Industri dan Berbahaya (*Industrial and Hazardous Waste*)
- l. Pengelolaan Sampah yang Buruk (*Poor Waste Management*)
- m. Naiknya Permukaan Air Laut (*Sea-Level Rise*)
- n. Bencana Alam Ekstrem (*Extreme Natural Disasters*)
- o. Hujan Asam (*Acid Rain*)
- p. Urbanisasi Berlebih (*Overurbanization*)

Secara keseluruhan, ke-16 isu lingkungan global menegaskan bahwa planet bumi ini sedang mengalami krisis ekologi yang kompleks. Dampak yang ditimbulkan tidak lagi mengenal batas negara, maka membutuhkan sinergi dan tindakan nyata dari seluruh masyarakat dunia. Tindakan peduli lingkungan sekecil apapun sangat berarti. Tindakan menjaga lingkungan adalah kewajiban bukan sebuah pilihan demi masa depan peradaban manusia yang berkelanjutan.

4. Strategi Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Upaya penyelamatan lingkungan alam Indonesia bukan hanya berfokus pada upaya perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Semua pihak termasuk masyarakat perlu berperan aktif melakukan upaya preventif. Berikut ini beberapa langkah strategis dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan terutama di Indonesia (Nasution and Kahpi, 2025), (Amalia *et al.*, 2026), (Pemerintah Republik Indonesia, 2009), (Kementerian PPN/Bappenas, 2024) yaitu:

- a. Penguatan pendidikan lingkungan pada generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan, seperti pemahaman tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals / SDGs) pada pilar-pilar pelestarian lingkungan dan literasi lingkungan.

- b. Penerapan ekonomi hijau yang menyelaraskan keuntungan bisnis dengan kelestarian alam.
- c. Penegakan hukum yang tegas dan transparan bagi pelaku perusakan lingkungan
- d. Pemanfaatan inovasi teknologi yang ramah lingkungan di sektor industri dan domestik.
- e. Penguatan kolaborasi (*pentahelix*) antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, dan media.
- f. Revitalisasi kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
- g. Pengembangan etika lingkungan baru (*green lifestyle*) bagi generasi muda.
- h. Perbaikan kembali lingkungan alam yang rusak.
- i. Dukungan bantuan modal usaha yang ramah lingkungan.
- j. Peralihan pada energi bersih misal peralihan penggunaan batu bara ke energi air.
- k. Pengelolaan sampah berawal mulai dari sumber, misal kelola sampah mulai dari rumah tangga atau pabrik.
- l. Pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini kejadian kerusakan alam seperti banjir dan kebakaran.

Keberhasilan strategi pengelolaan lingkungan di Indonesia sangat bergantung komitmen semua elemen bangsa. Langkah-langkah strategis di atas merupakan satu kesatuan utuh untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi dan penguatan kearifan budaya lokal bagian dari kolaborasi strategi yang baik untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam. Dengan kerja sama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta, maka kerusakan alam dapat dicegah sejak dini guna mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya Saputra & Bakat (2015) *Sosiologi Lingkungan*. Palangkaraya: Academy Lembaga Konsultasi Pendidikan dan Penelitian.
- Ahmad, H., Soeprabowati, T.R. and Purnaweni, H. (2022) "Kearifan Tradisi Budaya Sebagai Sarana Pelestraian Lingkungan Serta Potensi Ekowisata pada Komunitas Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Petungkriyono (Studi Kasus Nyadran Gebyog)," 3(2), pp. 68–81.
- Amalia, R. *et al.* (2026) "Krisis dan Isu Lingkungan Kontemporer," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(3), pp. 1046–1056.
- Amelia, Y. (2023) "Peran Kebudayaan dalam Pembentukan Kesadaran Sosial dan Lingkungan," *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), pp. 41–48. Available at: <https://doi.org/10.62238/jupsijurnalpendidikansosialindonesia.v1i1.10>.
- Anggraeni, D.E. (2018) *Hakikat Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Ekologi Islam, Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Efendi, R., Salsabila, H. and Malik, A. (2018) "Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan," *MODUL*, 18(2), pp. 75–82.
- Hagong, K.K. (2022) "Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat," *eJournal Pemerintahan Integratif*, 9(1), pp. 44–55. Available at: <https://ejournal.pin.or.id/site/?p=2113>.
- Herman *et al.* (2023) "Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), pp. 79–96. Available at: <https://doi.org/10.30868/at.v8i0>.
- Hijrah, L., Hakim, A. F., Hikmah, M., Nurrohman, R., & Nadroh, U. (2025) "Perjalanan Menuju Green Living : Sebuah Studi Kualitatif tentang Motivation, Barriers and Lifestyle Change," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(2), pp. 20–40.

- Hudha, A.M., Husamah and Rahardjanto, A. (2024) *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kementerian PPN/Bappenas (2024) *Undang-Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045: Kementerian PPN/Bappenas*.
- Lailaningrum, D. and Anasrulloh, M. (2026) *Globalisasi Dan Isu Lingkungan, JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu IPS*.
- M. Ied Al Munir (2023) "Corak Paradigma Etika Lingkungan : Antroposentrisme , Biosentrisme dan Ekosentrisme the Paradigms of Environmental Ethics : Anthropocentrism , Biocentrism and Eco-Centrism," *Jurnal Yaqzhan*, 09(01), p. 19. Available at: <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/10000>.
- Nasution, S.A. and Kahpi, M.L. (2025) "Isu Lingkungan Global dan Lokal : Perubahan Iklim , Energi , Air Dan Sampah," *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), pp. 2915–2940.
- Natasha, A.D. *et al.* (2025) "Komunikasi Politik dan Kebijakan Urbanisasi Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi," *CONVERSE Journal Communication Science*, 1(3), p. 8. Available at: <https://doi.org/10.47134/converse.v1i3.3663>.
- Nurhayati, A., Ummah, Z.I. and Shobron, S. (2018) "Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *SUHUF: International Journal of Islamic Studies*, 3(2), pp. 194–220.
- Nurlidiawati and Ramadayanti (2021) "Peranan Kearifan lokal (local wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang)," *Al Hikmah*, 23(1), pp. 43–56.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Praja, S.E. and Asran, A. (2025) "Strategi Tata Ruang Kota Ramah Lingkungan: Pendekatan Ekologis dalam Perencanaan Urban Kota Makassar," *Journal of Health Quality*

- Development*, 5(1), pp. 12–22. Available at: <https://doi.org/10.51577/jhq.v5i1.767>.
- Putri, L.D., Ahmadi, B.Z. and Aulia, K.K. (2025) “Membaca Krisis Lingkungan Melalui Lensa Tafsir Ekologi Q.S. Al Rum 30:41,” *CANONIA RELIGIA: Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial*, 3(1), pp. 35–48. Available at: <https://doi.org/10.31385/jakad.v24i2.120.3>.
- Ramadhanti, S.W. (2020) “Keterkaitan Antara Budaya Lokal dan Konservasi Alam di Nusantara,” (Program Studi Teknik industri, Fakultas Teknik UNM).
- Robinson, D. and Igini, M. (2026) *16 Isu Global tentang Lingkungan*, EARTH.ORG. Available at: <https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/>.
- Romario, E. and Armada Riyanto (2024) “Relasionalitas Hubungan Manusia dan Alam Semesta dalam Fenomena Anomali Iklim di Indonesia,” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 5(6), pp. 265–274. Available at: <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol5iss6pp265-274>.
- Sulastri, T., Zainuddin, K. and Ahmad, A.T. (2025) “Zero Waste Mindshift: Membentuk Identitas Ekologis Ibu Binaan Rumah Zakat,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2025 LP2M Universitas Negeri Makasar*, pp. 390–395.
- Tue, F. *et al.* (2024) “Dialektika Alam dan Manusia dalam Perspektif Geografi Sosial (Sebuah Kajian tentang Interaksi Timbal Balik Lingkungan dan Manusia),” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), pp. 4844–4853. Available at: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16669>.

BAB 9

ORGANISASI SOSIAL

Dalam bab ini kita akan sama-sama mempelajari tentang definisi organisasi secara umum dan organisasi sosial secara spesifik. Organisasi sosial tumbuh di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani kepentingan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu organisasi sosial memiliki beberapa tipe dan jenis berdasarkan wilayah kerja sampai pada ada tidaknya campur tangan pihak eksternal.

9.1 Definisi Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani *Organon* yang memiliki arti “alat”, kemudian terserap ke dalam bahasa Latin menjadi *Organization*, dalam pada abad ke-14 menjadi *Organisation* (bahasa Perancis). Organisasi secara umum berarti suatu kesatuan utuh yang sistematis dan memiliki batasan-batasan tertentu yang disepakati bersama agar dapat mencapai tujuan bersama (Fithriyyah, 2021). Berikut definisi organisasi menurut berbagai ahli :

1. Chester I Bernand, organisasi adalah sistem dengan aktivitas terorganisir oleh beberapa orang.
2. Jhon M. Gaus, organisasi adalah sekumpulan aturan yang mengatur perorangan dalam memfasilitasi tercapainya tujuan bersama melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab.
3. E. Wight Bakke, organisasi merupakan sistem yang terus berkelanjutan, terdiferensiasi, yang memadukan kemampuan manusia, material, gagasan, sumber daya alam menjadi satu kesatuan untuk memecahkan masalah guna mencapai target atau kepuasan.

Organisasi masyarakat merupakan suatu sistem yang mengakomodir berbagai struktur sosial, organisasi masyarakat ini ada yang bernuansa ekonomi, politik, atau sosial kemasyarakatan. Organisasi itu berisikan kerjasama dan koordinasi antara individu untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Meskipun istilah-istilah ini sering digunakan dalam situasi formal dan informal ternyata kita masih sering salah dalam menggunakan istilah organisasi, lembaga atau institusi. Terdapat perbedaan antara istilah organisasi, institusi dan lembaga. Istilah organisasi sering dianggap sama dengan lembaga sedangkan institusi diartikan sebagai lembaga. Uphof (1986) berpendapat bahwa sering terjadi ambiguitas dalam penggunaan istilah organisasi dan institusi. Isu yang sama juga terdapat dalam literatur berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam literatur bahasa Inggris ada yang mengaitkan istilah *social institution* dengan *organization*, sedangkan dalam literatur bahasa Indonesia penggunaan istilah lembaga dianggap dapat menggantikan istilah organisasi. Dalam studi sosiologi organisasi, organisasi lahir sebagai akibat dari keinginan manusia untuk mengefektifkan hidupnya kemudian dengan sadar membentuk organisasi, bersama-sama berkomitmen untuk mencapai tujuan dengan mengikuti aturan yang telah disepakati. Organisasi juga dilihat sebagai tempat untuk mengelola sumberdaya (Syahyuti, 2011).

Secara umum organisasi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan perorangan atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mendapatkan tujuan (Setyawati, 2020). Setiap individu yang bekerja bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama tidak selalu datang dari latar belakang pendidikan yang sama, usia yang sama, atau status sosial yang sama. Perbedaan-perbedaan ini terkadang dapat memicu munculnya permasalahan internal oleh sebab itu setiap organisasi memiliki aturan-aturan sendiri, serta standar pelayanan dan kelembagaan sendiri-sendiri. Organisasi yang baik adalah yang mampu menyatukan perbedaan di antara anggota-anggotanya sehingga perbedaan yang dimiliki setiap anggota justru dapat dijadikan

sumber daya yang dapat memberikan sumbangsih positif pada kelancaran perkembangan organisasi.

Max Weber memperkenalkan istilah organisasi sebagai birokrasi yang adalah bentuk paling modern dan paling efisien dari organisasi. Struktur dari sebuah organisasi dibentuk berdasarkan aturan-aturan oleh otoritas legal rasional. Organisasi modern yang disebut Weber sebagai birokrasi ini berbeda dengan organisasi tradisional yang dibentuk oleh otoritas berdasarkan tradisi kepercayaan lokal masyarakat (Febryantahanuji, 2021). Karakteristik organisasi modern (birokrasi) menurut Weber adalah sebagai berikut :

1. Memiliki struktur dan hirarki
2. Memiliki hirarki wewenang
3. Anggota atau karyawan memiliki wewenang khusus berdasarkan jabatan yang diemban
4. Hubungan sosial di dalam organisasi bersifat impersonal
5. Adanya sistem merit di dalam sistem promosi anggota atau karyawan
6. Ada peraturan yang sangat jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh setiap anggota
7. Pembagian tugas dan fungsi didasarkan pada keahlian dan kemampuan

Dari pembahasan ini dapat dilihat sedikit banyaknya perbedaan antara organisasi, organisasi sosial dan birokrasi yakni organisasi modern.

9.2 Organisasi Sosial

Sub bab ini akan kita mulai dengan membahas tentang apa itu organisasi sosial. jika kita mengutip pendapat Dirdjosisworo dalam bukunya Asas-Asas Sosiologi (1985), organisasi sosial merupakan tempat berkumpulnya kelompok yang masing-masing orang memiliki tugas yang jelas demi meraih tujuan tertentu, secara umum tujuan yang dikejar berkaitan dengan aspek keamanan (kepentingan) para anggota. Sebuah organisasi dikategorikan sebagai organisasi sosial menurut Utomo (1986) apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Unsur Formalitas : sebuah organisasi sosial harus memiliki sebuah struktur yang jelas, tujuan, peraturan, pengaturan tentang pengelolaan anggaran, dan segala pengaturannya tertulis secara resmi
2. Unsur Hirarki : Organisasi sosial memiliki kewenangan yang disepakati dan diakui oleh masyarakat, dalam bentuk piramida. ada yang memiliki kewenangan lebih tinggi dengan posisi atau jabatan yang lebih tinggi dan ada yang berperan sebagai anggota atau yang dipimpin. Perbedaan posisi atau jabatan akan menentukan peran, dan tanggung jawab, serta kewenangan.
3. Unsur Cakupan : organisasi sosial memiliki salah satu ciri yakni memiliki banyak anggota. sehingga hubungan interaksi antara anggota bersifat impersonal yang menjadi ciri birokrasi. Semakin besar cakupan organisasinya, maka semakin banyak anggota dan akan semakin rumit pengaturannya.
4. Durasi : periode lamanya suatu organisasi biasanya lebih lama umurnya daripada durasi keanggotaan dari anggota-anggotanya. Anggota dapat bergabung dan atau mengundurkan diri namun tidak serta-merta akan memberikan pengaruh yang signifikan pada organisasi tersebut (Satari, 2006).

Organisasi sosial dilihat sebagai (a) penyesuaian perilaku individu sebagai konsekuensi atas pilihan alternatif tindakan yang berkaitan dengan tujuan sosial mereka. (b) Pembagian peran berdasarkan tanggung jawab dan koordinasi, c) pengaturan pola tindakan sosial yang diatur sistem dan disesuaikan dengan target yang disepakati (Firth, 1955).

Organisasi sosial merupakan derivatif dari konsep struktur sosial, struktur sosial sendiri adalah aspek statis dari susunan hubungan sosial masyarakat sedangkan organisasi sosial merupakan bagian dinamisnya. Struktur sosial berisi status, organisasi sosial berisi aturan-aturannya. struktur sosial berkaitan dengan perilaku ideal dan normatif, organisasi sosial berkaitan dengan perilaku yang empiris dan situasional.

Organisasi sosial merupakan rentetan atau bentuk pola perilaku dan interaksi sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

9.3 Latar Belakang Pendirian Organisasi Sosial

Ada berbagai macam alasan mengapa pendirian organisasi dibutuhkan khususnya oleh masyarakat. organisasi sosial tidak hanya berperan sebagai wadah untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. organisasi sosial juga menjadi wadah untuk menyalurkan bakat, pengetahuan para anggotanya sekaligus menjembatani apabila ada aspirasi anggota yang perlu disuarakan pada pemangku kepentingan. Berikut dua alasan pendirian organisasi sosial :

- 1. Latar Belakang Sosial :** manusia ada makhluk sosial yang memiliki kebutuhan di mana tidak semua kebutuhan itu dapat dipenuhi sendiri oleh setiap orang. Organisasi dapat menjadi salah satu media atau cara guna mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak bisa dicapai seorang diri.
- 2. Latar Belakang Material :** keinginan menambah pengetahuan dan kemampuan

9.4 Tujuan Organisasi Sosial

Tujuan utama pembentukan organisasi sosial adalah sebagai wadah yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan para anggota yang mendirikanannya. Mengapa memiliki tujuan itu penting, karena tujuan dari organisasi menjadi motivasi dan semangat dalam menggerakkan aktivitas organisasi. Dengan memiliki tujuan, suatu organisasi sosial akan memiliki landasan dan pedoman bagi aktivitas dari para anggota. Tujuan organisasi juga berperan sebagai sumber legitimasi bagi para anggotanya untuk menjalankan segala aktivitas dalam organisasi tersebut. Apabila sebuah organisasi telah berhasil mewujudkan apa yang ditargetkan, maka tujuannya dianggap telah berhasil. Saat organisasi dibentuk seiring berjalannya waktu, organisasi tentu memiliki kebutuhan yang bisa jadi sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan awal organisasi karena kebutuhan organisasi lebih sering bersifat mendesak maka

aktivitas organisasi yang awalnya fokus pada tujuan bisa beralih fokus untuk memenuhi kebutuhan organisasi itu sendiri (Satari, 2006).

9.5 Jenis Organisasi Sosial

Organisasi sosial berdasarkan pendapat Uphof (1992) memiliki beberapa bentuk atau jenis dengan kategori berbeda. Kategori-kategori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Purnaningsih, 2020) :

1. Organisasi dalam sektor publik : meliputi administrasi juga pemerintahan lokal yang berwujud birokrasi dan organisasi politik modern
2. Organisasi yang bersifat partisipatori : organisasi ini berdiri karena keinginan dan motivasi dari masyarakat sendiri (misalnya pendirian NGO, dll)
3. Organisasi dalam sektor swasta : organisasi ini didirikan dengan orientasi mencari keuntungan atau laba. Organisasi dalam bidang jasa dan industri

Organisasi sektor publik didirikan dalam bidang penyedia barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh organisasi dalam sektor publik adalah yayasan pendidikan, organisasi keagamaan, dan organisasi kesehatan. Sedangkan organisasi yang bersifat partisipatori contohnya adalah NGO atau *Non-Governmental Organization* atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) misalnya LP3S atau WALHI. Organisasi sosial juga diklasifikasi berdasarkan beberapa tipe, ada organisasi formal dan informal. Ada organisasi primer dan sekunder, serta klasifikasi tipe organisasi berdasarkan sasaran yang ingin dicapai.

1. Organisasi Formal : organisasi ini biasanya memiliki struktur yang jelas dan kaku. memiliki otoritas kekuasaan yang jelas pembagiannya dan tanggung jawabnya. Organisasi formal itu memiliki pembagian tugas yang sangat jelas terhadap setiap anggotanya. hal lainnya seperti prestise, status, imbalan, pangkat, jabatan, dll memiliki pengaturan yang jelas dan eksplisit. organisasi formal cenderung memiliki umur

- panjang atau tahan lama karena sifatnya yang teratur, dan sangat terencana.
2. Organisasi Informal : didirikan atas dasar interelasi satu sama lain, hubungan antar anggota baik, akrab dengan pola komunikasi yang baik antara satu sama lain.
 3. Organisasi primer : Organisasi ini membutuhkan keterlibatan pribadi dan emosi para anggota. Interaksi anggota dalam organisasi bersifat tatap muka, langsung, dan spontan.
 4. Organisasi sekunder : organisasi ini memiliki beberapa tipe hubungan antara lain, tipe hubungan kontraktual, rasional, dan intelektual. ketentuan dan tanggung jawab dinyatakan secara eksplisit, organisasi sekunder memiliki sistem imbalan atau gaji yang jelas dan sudah diatur yang akan memenuhi kepuasan dan tujuan dari para anggota.

Dalam buku pedoman klasifikasi organisasi sosial terbitan Kementerian Sosial (2008) terdapat klasifikasi organisasi sosial berdasarkan wilayah dan jangkauan kerja / pelayanan yakni (Hanifah & Unayah, 2011) :

1. Organisasi di tingkat desa atau kelurahan yang mana pelayanan atau kerja organisasi hanya mencakup desa tertentu saja
2. Organisasi sosial tingkat kecamatan yang jangkauan kerjanya mencakup lebih dari satu desa dalam kecamatan yang sama
3. Organisasi sosial tingkat kabupaten yang mana jangkauan kerjanya mencakup lebih dari satu kecamatan dalam satu kabupaten yang sama
4. Organisasi sosial tingkat provinsi yang wilayah kerjanya mencakup beberapa kecamatan
5. Organisasi sosial tingkat regional di mana lingkup kerjanya meliputi provinsi-provinsi yang berdekatan dan berada dalam satu lingkup wilayah saja
6. Organisasi sosial tingkat nasional berarti lingkaran wilayah kerjanya meliputi seluruh atau sebagian besar provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Apabila ditinjau dari tipologinya maka organisasi sosial dapat diklasifikasi menjadi :

1. Organisasi sosial tipe A atau Organisasi sosial mandiri yang mana telah memenuhi semua jenis standar pelayanan dan pengaturan kelembagaan serta tidak bergantung pada bantuan atau dukungan dari pemerintah
2. Organisasi sosial tipe B atau organisasi sosial kategori berkembang yang mana sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan sendiri secara mandiri dari segi teknis pelayanan dan kelembagaan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan lagi
3. Organisasi sosial tipe C atau organisasi sosial yang masih masuk dalam kategori tumbuh. Maksud dari organisasi tipe c ini adalah organisasi yang telah mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan kelembagaan dan pelayanan namun masih membutuhkan pendampingan untuk berkembang
4. Organisasi sosial tipe D yakni organisasi yang masih dalam kategori “embrio” yakni tipe organisasi yang masih belum memenuhi standar mulai dari teknis pelayanan sampai pada kelembagaan. Organisasi tipe D masih memerlukan bimbingan dan pendampingan untuk memenuhi standar paling minimal.

9.6 Peran Organisasi Sosial Lokal

Organisasi sosial merupakan wadah atau tempat di mana partisipasi masyarakat terlembagakan. Organisasi sosial memiliki peranan penting di tengah-tengah masyarakat karena sebagai salah satu corong untuk menjembatani keinginan dan harapan masyarakat. Organisasi sosial juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong pemecahan masalah-masalah yang dihadapi atau muncul di tengah masyarakat. Organisasi sosial lokal adalah organisasi bentukan warga sekitar yang menghadapi persoalan yang sama sehingga membentuk suatu komunitas atau organisasi guna memenuhi kebutuhan atau mencari jalan keluar atas permasalahan bersama yang dihadapi (Sitepu, 2006).

Organisasi sosial lokal memiliki beragam variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat misalnya

perkumpulan petani atau organisasi perkumpulan petani, dll. Organisasi sosial sering kali disebut sebagai organisasi masyarakat atau kelompok kemasyarakatan (oleh Bank Dunia), atau organisasi petani, atau organisasi rakyat (oleh FAO), UNDP menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan. FAO memberikan dua kategori dalam organisasi sosial lokal yang terdiri atas *semi-governmental organization* dan *self-help organization* atau organisasi sosial hasil swadaya masyarakat. Karakteristik yang melekat pada *self-help organization* adalah tidak mendapatkan campur tangan dari pemerintah karena organisasi ini dibentuk dari usaha warga sendiri. Contoh *self-help organization* adalah paguyuban, bersifat informal, memiliki tujuan yang fleksibel, ketua dan anggotanya lebih banyak berasal dari kalangan menengah kebawah di mana hubungan interpersonal sangat erat (Kurniasari, 2006).

9.7 Hambatan Organisasi Sosial

Terdapat berbagai hambatan yang sering dijumpai dalam pergerakan organisasi sosial. Hambatan ini beragam mulai dari hambatan yang datang dari faktor internal dan hambatan yang datang dari faktor eksternal. pada sub-bab ini akan dijelaskan beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam organisasi sosial. Hambatan yang secara umum sering dihadapi oleh organisasi sosial lokal meliputi hambatan yang bersifat struktural misalnya kurangnya dukungan dana operasional karena karakter umum dari organisasi sosial yang memang bersifat swadaya. Hambatan struktural lainnya yakni organisasi sosial umumnya lahir dari kesadaran orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu tertentu sehingga minim dukungan politis, organisasi sosial karena merupakan organisasi yang non-profit seringkali kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain menghadapi hambatan struktural, organisasi juga menghadapi hambatan operasional diantaranya kualitas kepemimpinan, pembagian kerja yang tidak proporsional dengan sesama anggota, terbatasnya tenaga pelaksana mulai dari kuantitas dan kualitas, terbatasnya dana dan peralatan operasional, lemahnya komunikasi baik antar

anggota di dalam organisasi maupun dari segi komunikasi eksternal organisasi (Kurniasari, 2006). Hambatan operasional juga berkaitan dengan lemahnya urusan administrasi baik urusan umum maupun teknis sehingga cenderung memiliki pencatatan dan publikasi yang lemah, selain itu lemahnya pembinaan dan evaluasi organisasi cenderung berdampak negatif terhadap perkembangan organisasi di masa depan.

Hambatan selanjutnya adalah hambatan fungsional yang terdiri atas kesulitan yang kadang dihadapi oleh para pengurus untuk menerjemahkan ide, gagasan, cita-cita ke dalam implementasi operasional yang praktis. Hambatan fungsional kedua yakni sulitnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi para anggota / pengurus dan kepentingan organisasi. Lambat dalam membangun sikap profesional antara para anggota yang masih tergolong amatir saat pertama kali bergabung. Tidak adanya tenaga manajemen, tenaga administrasi, dan tenaga pelaksana profesional.

9.8 Kesimpulan

Organisasi sosial memberikan dampak yang positif di tengah masyarakat karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan. Organisasi sosial memiliki serangkaian kriteria yang disesuaikan dengan tujuan dari organisasi tersebut. Organisasi sosial akan membantu dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sosial merupakan salah satu bagian penting dari studi sosiologi serta ilmu sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Febryantahanuji. (2021). *Perilaku Organisasi : Kepemimpinan dan Berorganisasi dalam Era Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik. google scholar
- Firth, R. (1955). Some Principle of Social Organization. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 85(1/2), 1-18.
<http://www.jstor.org/stable/2844179>
- Fithriyyah, M. U. (2021). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. iRdev. <https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar%20Teori%20Organisasi.pdf>
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Kontribusi Organisasi Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(01), 85-98. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/796>
- Kurniasari, A. (2006). Partisipasi Organisasi Sosial Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 40-54. <https://media.neliti.com/media/publications/52897-ID-partisipasi-organisasi-sosial-lokal-dala.pdf>
- Purnaningsih, N. (2020). *Organisasi Sosial dan Kepemimpinan*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/reader/index.php?subfolder=STAG4412/&doc=TINJAUAN.pdf>
- Satari, A. U. (2006). *Organisasi Sosial dan Kepemimpinan*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/reader/index.php?subfolder=LUHT4327/&doc=M1.pdf>
- Selznick, P. (n.d.). Foundations of Theory of Organizations. *American Sociology Review*, 13(1), 25-35. [http://www.iot.ntnu.no/innovation/norsi-pims-courses/harrison/Selznick%20\(1948\).PDF](http://www.iot.ntnu.no/innovation/norsi-pims-courses/harrison/Selznick%20(1948).PDF)

- Setyawati, A. (2020). *Teori Organisasi Konsep dan Implementasinya*. Media Sains Indonesia. Media Sains Indonesia
- Sitepu, A. (2006). Organisasi Sosial Lokal : Profil, Peran, dan Rekomendasi Untuk Pengembangan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(02), 11-23.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsep/sia/article/view/593/236>
- Syahyuti. (2011). *Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani : Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi* (1 ed.). IPB Press.

BAB 10

MASALAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN

10.1 Masalah Pedesaan

Dalam pembahasan masalah pedesaan, yang paling substansial terbagi menjadi kemiskinan pedesaan, keterbatasan infrastruktur, urbanisasi anak muda ke kota, tingkat pendidikan, dan degradasi lingkungan desa.

10.1.1 Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan di pedesaan merupakan tantangan yang cukup berat, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat desa, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, dan akses pasar yang terbatas.

1. Rendahnya pendapatan

Pendapatan rendah masyarakat desa tetap menjadi masalah umum di berbagai wilayah. Mayoritas warga desa bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak pasti. Kondisi ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain itu, terbatasnya akses ke pendidikan, teknologi, dan lapangan pekerjaan memperkecil peluang ekonomi masyarakat desa dibandingkan dengan warga kota.

Perkembangan ekonomi yang lebih terpusat di kota juga menyebabkan ketimpangan pendapatan antara desa dan kota semakin terlihat. Menurut berita nasional yang dimuat oleh Kompas (2024), pendapatan petani di beberapa daerah di Indonesia masih tergolong rendah akibat meningkatnya biaya produksi dan ketidakstabilan harga hasil pertanian. Sementara itu, laporan World Bank (2023) menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan di berbagai negara

berkembang masih rentan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan infrastruktur dan akses pasar.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan masyarakat desa berkaitan dengan kurangnya inovasi ekonomi dan minimnya pembangunan berbasis potensi lokal (Widianingsih et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Pertanian Tradisional

Sebagian besar masyarakat desa masih bergantung pada sektor pertanian tradisional sebagai sumber utama pendapatan. Kegiatan pertanian tersebut umumnya dilakukan dengan peralatan sederhana dan bergantung pada kondisi alam. Akibatnya, hasil produksi sering mengalami ketidakstabilan, terutama ketika terjadi perubahan cuaca, kekeringan, maupun kenaikan harga pupuk. Menurut berita yang dimuat oleh CNN Indonesia (2026) perubahan iklim global telah menyebabkan banyak petani di negara berkembang mengalami penurunan hasil panen dan kehilangan pendapatan. Sementara itu, Kumparan (2026) melaporkan bahwa petani di Indonesia masih menghadapi rendahnya harga jual hasil pertanian dibandingkan biaya produksi yang terus meningkat dibanding dengan negara lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pada pertanian tradisional membuat masyarakat desa rentan terhadap kemiskinan. Menurut teori pembangunan pedesaan, masyarakat desa yang hanya bergantung pada satu sektor ekonomi akan lebih sulit berkembang karena memiliki keterbatasan akses teknologi, modal, dan inovasi (Fuseini, 2024). Penelitian terbaru juga menjelaskan bahwa diversifikasi ekonomi desa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional (Cavalleri & Tanwattana, 2022). Oleh karena itu,

pembangunan desa perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

3. Terbatasnya Akses Pasar

Masyarakat desa sering mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian dan produk lokal yang mereka miliki. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, serta minimnya akses teknologi dan informasi pasar. Akibatnya, masyarakat desa harus menjual hasil produksi kepada tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Menurut berita yang dimuat oleh Fatmawati (2025) banyak petani di daerah pedesaan masih mengalami hambatan dalam distribusi hasil panen akibat akses jalan yang kurang memadai. Hal tersebut menjadikan keterbatasan akses pasar sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan di negara berkembang.

Akses pasar memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi desa. Sejalan dengan teori pembangunan wilayah, keterhubungan antara desa dan pasar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih mudah (Simeanu et al., 2025). Selain itu Zhao et al. (2022) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital dapat membantu masyarakat desa memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, peningkatan akses pasar menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

10.1.2 Keterbatasan Infrastruktur

Terbatasnya infrastruktur menjadi hal yang perlu diperhatikan, dengan menekankan tiga hal penting yaitu jalan dan transportasi desa, internet dan komunikasi, serta listrik dan air bersih.

1. Jalan dan Transportasi

Jalan dan transportasi desa merupakan sarana penting dalam mendukung aktivitas masyarakat pedesaan. Namun,

hingga saat ini masih banyak desa yang memiliki kondisi jalan kurang baik dan akses transportasi yang terbatas. Kerusakan jalan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, terbatasnya transportasi umum membuat mobilitas masyarakat desa menjadi kurang efektif. Sejumlah desa, khususnya di luar Jawa, masih mengalami kerusakan infrastruktur jalan yang menghambat distribusi hasil pertanian serta aktivitas masyarakat. Keterbatasan infrastruktur transportasi di wilayah pedesaan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di berbagai negara berkembang (Kaiser & Barstow, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan transportasi memiliki hubungan erat dengan pembangunan desa. Menurut teori pembangunan wilayah, aksesibilitas transportasi dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan wilayah pedesaan (Fuseini, 2024). Penelitian terbaru juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa karena distribusi barang dan akses pasar menjadi lebih mudah (Widianingsih et al., 2024). Oleh karena itu, pembangunan jalan dan transportasi desa perlu menjadi perhatian utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

2. Internet dan Komunikasi

Internet dan komunikasi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas masyarakat desa di era digital. Namun, masih banyak desa yang mengalami keterbatasan akses internet dan sarana komunikasi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat desa kesulitan memperoleh informasi, mengakses pendidikan, serta mengembangkan usaha berbasis digital. Selain itu, lemahnya jaringan internet juga menghambat pelayanan publik dan komunikasi antarwilayah. Wilayah pedesaan di Indonesia masih mengalami jaringan internet yang tidak stabil, sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Sementara itu, Salemin et

al. (2017) menjelaskan bahwa kesenjangan akses internet antara desa dan kota masih terjadi di berbagai negara berkembang akibat terbatasnya infrastruktur digital.

Berdasarkan teori modernisasi, internet dan komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan desa karena dapat mempercepat perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses terhadap informasi (Zhao et al., 2022). Penelitian terbaru juga menjelaskan bahwa digitalisasi desa mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemasaran produk lokal dan pelayanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemerataan akses internet dan komunikasi perlu ditingkatkan agar masyarakat desa dapat mengikuti perkembangan teknologi secara merata.

3. Listrik dan air bersih

Listrik dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat desa. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa wilayah pedesaan yang mengalami keterbatasan akses listrik dan air bersih. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat, terutama dalam kegiatan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, kurangnya ketersediaan air bersih juga dapat menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Sejumlah desa di Indonesia masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau, khususnya di wilayah Nusa Tenggara atau kepulauan yang memiliki cuaca dan sumber air terbatas.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam teori pembangunan berkelanjutan, ketersediaan listrik dan air bersih merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat (Widianingsih et al., 2024). Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan demikian, pemerataan akses

listrik dan air bersih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

10.1.3 Urbanisasi Anak Muda

Urbanisasi anak muda ke kota menjadi fenomena yang sering terjadi di wilayah pedesaan. Banyak generasi muda memilih meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang dianggap lebih modern di kota. Kondisi tersebut terjadi karena kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap serta peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan desa. Akibatnya, desa mengalami kekurangan tenaga kerja produktif dan berkurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurut siaran berita Metro TV, yang ditulis oleh Marup (2026) perpindahan anak muda dari desa ke kota terus meningkat karena keterbatasan lapangan pekerjaan di desa.

Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Menurut teori urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi karena adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota, seperti peluang kerja dan fasilitas yang lebih baik selain itu, rendahnya inovasi ekonomi desa menyebabkan generasi muda kurang tertarik untuk tetap tinggal di desa (Wang & Uekita, 2026).

Akibat dari urbanisasi tersebut, desa dapat mengalami penurunan produktivitas pertanian karena berkurangnya tenaga kerja usia muda. Selain itu, pembangunan desa menjadi lebih lambat akibat minimnya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Di sisi lain, kota berisiko mengalami kepadatan penduduk, pengangguran, dan meningkatnya permukiman kumuh akibat tingginya arus perpindahan penduduk dari desa.

10.1.4 Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat desa yang mengalami keterbatasan akses pendidikan. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya fasilitas sekolah, terbatasnya tenaga pengajar, serta

rendahnya akses teknologi pendidikan di wilayah pedesaan. Selain itu, faktor ekonomi juga menyebabkan sebagian anak di desa mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, terbatasnya pendidikan dapat menyebabkan keterbelakangan dalam berbagai sendi kehidupan di desa, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi.

Menurut Zhao et al. (2022) pendidikan berperan penting dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan di desa dapat memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota. Hal ini tentu berakibat, masyarakat desa menjadi lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki daya saing rendah di era modern. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

10.1.5 Degradasi Lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian, selain itu memberikan dampak lanjutan yaitu berupa bencana meteorologi.

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Banyak lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan, industri, dan pembangunan infrastruktur akibat meningkatnya kebutuhan ruang. Kondisi tersebut menyebabkan luas lahan pertanian semakin berkurang dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan pertanian di beberapa daerah Indonesia terus meningkat sebagai contoh perubahan lahan pertanian atau Subak di Bali yang semakin sempit, tersisisa 1.915 hektar (Christabel DK, 2026). Hal tersebut berdampak pada kemampuan wilayah tersebut untuk menghasilkan beras.

Berdasarkan teori perubahan penggunaan lahan, perkembangan kota dapat mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian karena nilai ekonomi lahan yang lebih tinggi (Sasongko et al., 2024). Selain itu, alih fungsi lahan dapat mengurangi produktivitas pertanian dan memengaruhi keseimbangan lingkungan di wilayah pedesaan. Hal tersebut memerlukan pengelolaan tata ruang dan pengawasan pembangunan agar keberadaan lahan pertanian tetap terjaga serta mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Bencana Meteorologi

Bencana meteorologi meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian di bidang ekonomi dan pertanian, serta kerusakan infrastruktur. Peningkatan curah hujan dan cuaca yang tidak menentu, kemudian konversi lahan pertanian menjadi bangunan, serta munculnya lahan kritis menambah tingkat bahaya bencana meteorologi. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim global yang meningkatkan risiko terjadinya cuaca ekstrem di berbagai negara.

Wilayah yang tidak terkelola dengan baik dapat memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana di wilayah pedesaan maupun perkotaan (Walz et al., 2021). Hal tersebut menjadi implikasi bahwa diperlukan upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan sembari menata lingkungan atau tata guna lahan.

10.2 Masalah Perkotaan

10.2.1 Penduduk dan Urbanisasi

Masalah urbanisasi yang menyebabkan bertambahnya kepadatan penduduk di Kota menjadi isu yang terus dibahas, disamping menimbulkan efek negatif, sebetulnya juga menimbulkan efek positif. Dalam hal ini kita akan membahas

akibat dari fenomenan ini yaitu *Urban Sprawl* dan Konsentrasi Aktivitas Ekonomi.

1. *Urban Sprawl*

Fenomena *urban sprawl* menjadi masalah serius di kota-kota besar dunia. Di Asia Tenggara sendiri meningkat pesat akibat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk (Schneider et al., 2015). Sedangkan di Indonesia, ekspansi Jabodetabek terus mengurangi lahan hijau dan pertanian akibat pembangunan permukiman dan kawasan industri. Selain itu, pembangunan jalan tol di Jakarta Metropolitan Area mempercepat penyebaran kota ke wilayah pinggiran secara tidak terkendali (Pravitasari et al., 2024).

Urban sprawl merupakan perkembangan kota yang menyebar horizontal dengan kepadatan rendah dan bergantung pada kendaraan pribadi. Teori *Compact City* menjelaskan bahwa kota ideal seharusnya berkembang padat, terintegrasi, dan berbasis transportasi publik) menegaskan bahwa pendekatan *Transit-Oriented Development* (TOD) di Jakarta mampu mengurangi penyebaran kota dan meningkatkan efisiensi tata ruang perkotaan (Irsal et al., 2023).

Fenomena *urban sprawl* memberikan dampak negatif jika tidak ditangani dengan baik, yaitu kemacetan, banjir, polusi udara, dan hilangnya lahan pertanian produktif. Selain itu, peningkatan kawasan terbangun memperparah fenomena urban *heat island*. Solusi yang dapat diterapkan ialah pengendalian tata ruang, pengembangan transportasi massal, perluasan ruang terbuka hijau, dan penerapan konsep kota kompak berkelanjutan.

2. Konsentrasi Aktivitas Ekonomi

Konsentrasi aktivitas ekonomi merupakan fenomena terpusatnya kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan investasi di wilayah tertentu, terutama kota besar. Di Indonesia, Jakarta masih menjadi pusat ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 16% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Hal ini berakibat pada daerah pinggiran dan

perdesaan yang mengalami keterbatasan akses pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik sehingga mendorong urbanisasi besar-besaran ke kota (Rustiadi et al., 2021).

Konsentrasi aktivitas ekonomi dijelaskan melalui teori *Growth Pole* dari Perroux yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terpusat pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan infrastruktur, industri, dan pasar. Teori aglomerasi juga menjelaskan bahwa perusahaan cenderung berkumpul di satu lokasi untuk memperoleh efisiensi produksi, tenaga kerja, dan distribusi. Berdasarkan Hudalah et al. (2024) menunjukkan bahwa kawasan Pantai Utara Jawa berkembang menjadi megaregion ekonomi akibat konsentrasi industri dan jaringan transportasi yang terhubung kuat.

Konsentrasi ekonomi berdampak pada kesenjangan pembangunan, kepadatan penduduk, kemacetan, dan kenaikan harga tanah di kota besar. Di sisi lain, wilayah perdesaan menjadi tertinggal karena minimnya investasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah agar distribusi aktivitas ekonomi menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

10.2.2 Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh menjadi tantangan di kota-kota besar dunia, lebih dari satu miliar penduduk dunia tinggal di kawasan kumuh dengan keterbatasan sanitasi, air bersih, dan hunian layak (Ezeh et al., 2017). Di Indonesia, Kementerian PUPR menyatakan kawasan kumuh masih ditemukan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan akibat kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan permukiman. Tambah lagi menurut Indrawan & Sudarwani (2025) menunjukkan bahwa kawasan padat di Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami penurunan kualitas lingkungan karena bangunan tidak teratur dan minim infrastruktur dasar.

Secara teoritis, teori urbanisasi dari Louis Wirth menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang cepat sering kali tidak seimbang dengan kapasitas penyediaan fasilitas perkotaan. Selain itu, teori marginalitas perkotaan menjelaskan bahwa kelompok berpendapatan rendah cenderung menempati lahan ilegal atau tidak layak huni karena keterbatasan akses ekonomi. Selain itu, urbanisasi dan kemiskinan menjadi faktor dominan munculnya permukiman kumuh di negara berkembang (Arimah, 2011).

Penyebab utama permukiman kumuh adalah urbanisasi tinggi, kemiskinan masyarakat, mahalnya harga tanah perkotaan, lemahnya pengawasan tata ruang, serta terbatasnya penyediaan rumah layak bagi kelompok berpenghasilan rendah. Akibatnya, muncul masalah kesehatan, kriminalitas, banjir, pencemaran lingkungan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan ialah program penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah terjangkau, peningkatan sanitasi, serta penguatan kebijakan perumahan berbasis pembangunan berkelanjutan.

10.2.3 Pengangguran dan Kriminalitas

Pengangguran dan kriminalitas merupakan dua kata yang saling terkait, tingginya pengangguran akan mendorong kriminalitas, dan tingginya kriminalitas akan menghambat investasi suatu daerah, yang juga mendorong angka pengangguran. Fenomena ini dapat dilihat dari ketersediaan lapangan kerja dan juga aktivitas kriminal di jalan atau street criminal atau begal, yang menjadi fenomena sosial yang selalu muncul di tengah masyarakat berpenghasilan menengah sampai rendah.

1. Lapangan kerja

Lapangan kerja dapat dikerucutkan menjadi persoalan penting dalam pembangunan perkotaan, yakni perbandingan tenaga kerja dan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat setiap tahun, sementara penyediaan lapangan kerja belum mampu menyerap seluruh tenaga

kerja secara optimal (Solih et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan tingginya angka pengangguran, terutama di kota besar dan akan berakibat negatif di kemudian hari.

Menurut teori pasar kerja dualistik yang membagi sektor kerja menjadi formal dan informal. Teori tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan sektor formal menyebabkan sebagian masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan kerja terbatas. Ferdiansyah & Sasmita (2024) menjelaskan bahwa urbanisasi dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri memperbesar pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia.

Penyebab utama masalah ini adalah pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja serta rendahnya kualitas pendidikan. Akibatnya, muncul pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan meningkatnya pekerjaan informal. Solusi yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pelatihan kerja, dan mendorong investasi industri padat karya berbasis teknologi.

2. *Street Crime*

Street crime atau kejahatan jalanan menjadi masalah sosial yang banyak terjadi di kawasan perkotaan akibat tingginya kepadatan penduduk dan ketimpangan ekonomi. Menurut (Bintang Pamungkas, 2026) kasus pencurian, penjam-bretan, dan kekerasan jalanan meningkat di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Medan. Selain itu, urbanisasi cepat dan kemiskinan perkotaan berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas jalanan di berbagai negara berkembang. Kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Saif et al., 2026).

Secara teoritis, *street crime* dapat dijelaskan melalui teori *Social Disorganization* yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol sosial, kemiskinan, dan rendahnya kohesi masyarakat meningkatkan peluang terjadinya kriminalitas.

Selain itu, teori strain dari Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial mendorong individu melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Canh & Minh (2025) menjelaskan bahwa lingkungan perkotaan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketidakstabilan sosial cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

Akibat meningkatnya *street crime* adalah muncul rasa takut di masyarakat, kerugian ekonomi, menurunnya keamanan publik, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi perkotaan. Solusi yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kesempatan kerja, memperkuat keamanan lingkungan, memperluas pendidikan sosial, serta meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan rawan kriminalitas.

10.2.4 Masalah Lingkungan Kota

Masalah lingkungan kota menjadi isu utama akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak terkendali. Hal tersebut dialami oleh kota-kota besar di dunia, yang mengalami peningkatan polusi udara, banjir perkotaan, dan penurunan kualitas lingkungan akibat urbanisasi yang cepat. Di Indonesia, BNPB (2025) mencatat bahwa banjir dan longsor sering terjadi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang karena alih fungsi lahan dan buruknya sistem drainase (Indonesia, 2025). Selain itu, kualitas udara di kota besar juga memburuk akibat tingginya emisi kendaraan dan aktivitas industri.

Masalah lingkungan kota dapat dijelaskan melalui teori ekologi perkotaan yang menyatakan bahwa pertumbuhan kota yang melebihi daya dukung lingkungan akan menimbulkan kerusakan ekologis. Polusi udara terjadi akibat konsentrasi kendaraan bermotor dan industri di kawasan padat penduduk. Banjir dan longsor disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air, pembangunan di lereng yang tidak terkendali, serta perubahan tata guna lahan. Sementara itu, terbatasnya ruang hijau terjadi karena dominasi pembangunan permukiman dan

kawasan komersial. Seto et al. (2021) menjelaskan bahwa urbanisasi tanpa pengendalian tata ruang mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana perkotaan.

Hal tersebut berakibat pada meningkatnya penyakit pernapasan, kerusakan infrastruktur, penurunan kualitas hidup, dan tingginya risiko bencana. Solusi yang dapat dilakukan ialah memperluas ruang terbuka hijau, memperbaiki sistem drainase, mengendalikan emisi kendaraan, serta menerapkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis lingkungan.

10.2.5 Disorganisasi dan Individualisme

Kondisi masyarakat yang tidak solid memunculkan penurunan solidaritas sosial, yang dapat mendorong kerentanan konflik. Selain itu disorganisasi, kurangnya pemahaman antar individu dan kelompok, dapat berkaitan pada kondisi mental masyarakat kota, yang cenderung lebih buruk dibandingkan dengan masyarakat desa.

1. Menurunnya Solidaritas Sosial

Menurunnya solidaritas sosial menjadi salah satu masalah sosial di kawasan perkotaan akibat perubahan pola kehidupan masyarakat modern. Hal tersebut karena hubungan sosial yang lebih individualistis dibandingkan masyarakat perdesaan. Selain itu, urbanisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan interaksi sosial langsung semakin berkurang, sehingga rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat menurun. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan meningkatnya sikap apatis di lingkungan perkotaan.

Menurut Émile Durkheim, masyarakat modern lebih didominasi oleh solidaritas organik, yaitu hubungan sosial yang terbentuk karena pembagian kerja dan kepentingan individu, sehingga ikatan sosial menjadi lebih lemah dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Selain itu, teori urbanisme Louis Wirth menjelaskan bahwa kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, dan heterogenitas masyarakat

kota menyebabkan hubungan sosial bersifat impersonal dan kurang akrab. Selain itu, Putnam (2021) juga menunjukkan bahwa menurunnya interaksi sosial berdampak pada rendahnya kepercayaan sosial di masyarakat perkotaan.

Kondisi tersebut berakibat pada menurunnya solidaritas sosial, yaitu meningkatnya konflik sosial, individualisme, dan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Solusi yang dapat dilakukan ialah memperkuat kegiatan komunitas, meningkatkan partisipasi sosial masyarakat, serta mengembangkan ruang publik yang mendukung interaksi sosial warga kota.

2. Kesehatan Mental (*Mental Health*)

Kesehatan mental masyarakat kota menjadi isu penting akibat tekanan hidup perkotaan yang semakin tinggi. Gangguan kecemasan dan depresi lebih banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat perdesaan karena tekanan pekerjaan, kemacetan, polusi, dan tingginya biaya hidup. Di Indonesia, meningkatnya stres dan gangguan kesehatan mental di kota besar terutama terjadi pada kelompok usia produktif akibat tekanan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan perkotaan modern dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis masyarakat (Cikita, 2025).

Masalah kesehatan mental masyarakat kota ini dapat dijelaskan melalui teori *Urban Stress Theory* yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk, kebisingan, kompetisi sosial, dan tekanan ekonomi dapat meningkatkan stres psikologis individu. Selain itu, teori alienasi dari Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan cenderung mengalami keterasingan sosial akibat hubungan sosial yang impersonal dan pola hidup individualistik. (Gruebner, 2022) menunjukkan bahwa lingkungan kota dengan tingkat polusi tinggi dan minim ruang hijau memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya risiko depresi dan kecemasan.

Akibat masalah kesehatan mental adalah menurunnya produktivitas, meningkatnya konflik sosial, gangguan

emosional, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan ialah memperluas layanan konseling, menyediakan ruang hijau publik, memperkuat komunitas sosial, serta meningkatkan edukasi kesehatan mental di lingkungan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimah, B. C. (2011). The Face of Urban Poverty: Explaining the Prevalence of Slums in Developing Countries. In Urbanization and Development: Multidisciplinary Perspectives. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199590148.003.0008>
- Bank, W. (2023). Rural development and poverty reduction report. <https://www.worldbank.org>
- Bintang Pamungkas, M. (2026). Jakarta di Bayang-bayang Teror Begal. <https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2026/05/20/15064771/Jakarta-Di-Bayang-Bayang-Teror-Begal>.
- Canh, L. Q., & Minh, N. H. (2025). Neighborhood organizations, organizational participation, and crime in Vietnam: An application of the social disorganization theory. SAGE Open. <https://doi.org/10.1177/21582440251370983>
- Cavalleri, S. A. E., & Tanwattana, P. (2022). Systemizing a rural livelihood diversification framework for sustainable community-based agritourism: A participatory approach to ensure resilience. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.993892>
- Christabel DK, M. (2026). Subak di Denpasar Tersisa 1.915 Hektare, Densel dan Denut Mulai Terancam. <https://Www.Detik.Com/Bali/Berita/d-8488262/Subak-Di-Denpasar-Tersisa-1-915-Hektare-Densel-Dan-Denut-Mulai-Terancam>.
- Cikita, R. B. (2025). Exploring the Challenges and Opportunities in Mental Health Care for Adolescents in Urban Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 6, 133–140. <https://doi.org/10.46799/jhs.v6i2.2728>
- CNN Indonesia. (2026). 3.000 Ha Sawah di Jatim Gagal Panen Gara-gara Cuaca Ekstrem. <https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20260113195047-92-1316743/3000-Ha-Sawah-Di-Jatim-Gagal-Panen-Gara-Gara-Cuaca-Ekstrem>.

- Ezeh, A., Oyeboode, O., Satterthwaite, D., Chen, Y. F., Ndugwa, R., Sartori, J., Mberu, B., Melendez-Torres, G. J., Haregu, T., Watson, S. I., Caiaffa, W., Capon, A., & Lilford, R. J. (2017). The history, geography, and sociology of slums and the health problems of people who live in slums. In *The Lancet* (Vol. 389, pp. 547–558). Lancet Publishing Group. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31650-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31650-6)
- Fatmawati, S. (2025). *Jalan Rusak Hambat Distribusi Ekonomi Petani*. Pandeglang. <https://Rri.Co.Id/Banten/Regional/1838417/Jalan-Rusak-Hambat-Distribusi-Ekonomi-Petani-Pandeglang>.
- Ferdiansyah, Y., & Sasmita, S. D. (2024). The analysis of urbanization's impact on increasing unemployment in Bandung. *Journal of Urban Studies*.
- Fuseini, M. N. (2024). Rural infrastructure and livelihoods enhancement: The case of community-based rural development program in Ghana. *Heliyon*, 10(22). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39635>
- Gruebner, O. (2022). Cities and mental health. *Environmental Research*, 213, 113024. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113024>
- Hudalah, D., Octifanny, Y., & Talitha, T. (2024). From metropolitanization to megaregionalization: Intentionality in the urban restructuring of Java's North Coast, Indonesia. *Journal of Planning Education and Research*. <https://doi.org/10.1177/0739456X20967405>
- Indonesia, B. (2025). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. <https://Bnpb.Go.Id/Infografis/Infografis-Bencana-Tahun-2025>.
- Indrawan, D., & Sudarwani, M. M. (2025). Analysis of the condition of slum areas in Jakarta. *Formosa Journal of Applied Sciences*.
- Irsal, R. M., Hasibuan, H. S., & Azwar, S. A. (2023). Spatial Modeling for Residential Optimization in Dukuh Atas Transit-Oriented Development (TOD) Area, Jakarta, Indonesia. *Sustainability* (Switzerland), 15. <https://doi.org/10.3390/su15010530>

- Kaiser, N., & Barstow, C. K. (2022). Rural Transportation Infrastructure in Low-and Middle-Income Countries: A Review of Impacts, Implications, and Interventions. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 14). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su14042149>
- Kompas. (2024). Gangguan kesehatan mental masyarakat kota meningkat. <https://www.kompas.com>
- Kumparan. (2026). Nilai Tukar Petani Turun, Biaya Produksi Naik Lebih Cepat dari Harga Jual. <https://Kumparan.Com/Kumparanbisnis/Nilai-Tukar-Petani-Turun-Biaya-Produksi-Naik-Lebih-Cepat-Dari-Harga-Jual-27KjqXQxSmA>.
- Marup, M. (2026). Urbanisasi Meningkatkan Setelah Lebaran Ancam Perekonomian Desa. <https://Www.Metrotvnews.Com/Read/KdZCAP90-Urbanisasi-Meningkat-Setelah-Lebaran-Ancam-Perekonomian-Desa>.
- Pravitasari, A. E., Indraprahasta, G. S., Rustiadi, E., Rosandi, V. B., Stanny, Y. A., Wulandari, S., Priatama, R. A., & Murtadho, A. (2024). Dynamics and Predictions of Urban Expansion in Java, Indonesia: Continuity and Change in Mega-Urbanization. ISPRS International Journal of Geo-Information, 13. <https://doi.org/10.3390/ijgi13030102>
- Putnam, R. D. (2021). Social capital and community decline in urban society. Journal of Urban Affairs.
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O., & Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. Cities, 111. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103000>
- Saif, W., Zakir, M., Ullah, K., & Khan, K. (2026). Poverty, Inequality, and Crime: An Empirical Investigation of Pakistan's Urban Crime Dynamics. International Journal of Advanced Social Studies, 6, 72–81. <https://doi.org/10.70843/ijass.2026.06106>
- Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature

- review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001>
- Sasongko, I., Gai, A. M., & Azzizi, V. T. (2024). Spatiotemporal dynamics of land use and community perception in peri-urban environments. *Urban Science*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/urbansci8030097>
- Schneider, A., Mertes, C. M., Tatem, A. J., Tan, B., Sulla-Menashe, D., Graves, S. J., Patel, N. N., Horton, J. A., Gaughan, A. E., Rollo, J. T., Schelly, I. H., Stevens, F. R., & Dastur, A. (2015). A new urban landscape in East-Southeast Asia, 2000-2010. *Environmental Research Letters*, 10. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/3/034002>
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyrá, L. R. (2021). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1211658109>
- Simeanu, C., Andronachi, V. C., Usturoi, A., & Davidescu, M. A. (2025). Rural tourism: A factor of sustainable development for the traditional rural area of Bucovina, Romania. *Sustainability*, 17(8). <https://doi.org/10.3390/su17083604>
- Solih, R., Hermawati, F., Friska, M., & Irawan, H. (2025). Keadaan Pekerja di Indonesia 2025 (Vol. 19). Badan Pusat Statistik (BPS). <https://share.google/ITtrw1AXDvDdx1QtV>
- Walz, Y., Janzen, S., Narvaez, L., Ortiz-Vargas, A., Woelki, J., Doswald, N., & Sebesvari, Z. (2021). Disaster-related losses of ecosystems and their services. Why and how do losses matter for disaster risk reduction? In *International Journal of Disaster Risk Reduction* (Vol. 63). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102425>
- Wang, Y., & Uekita, Y. (2026). The hollowing out of rural China at the micro level: A case study of three traditional villages in southern Anhui province. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107593>
- Widianingsih, I., Abdillah, A., Hartoyo, D., & Putri, S. S. U. (2024).

Increasing resilience, sustainable village development and land use change in Tarumajaya village of Indonesia. Scientific Reports, 14(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-82934-2>

Zhao, W., Liang, Z., & Li, B. (2022). Realizing a rural sustainable development through a digital village construction. Sustainability, 14(21).
<https://doi.org/10.3390/su142114199>

BIODATA PENULIS



Dena Mustika, M.Pd

Dosen Program Studi Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bale
Bandung

Penulis lahir di Sukabumi, tanggal 23 Maret 1994. Penulis merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bale Bandung. Selain itu, penulis juga sebagai tutor online di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada program studi Pendidikan IPS, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis menekuni bidang literasi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Saat ini penulis tergabung dalam Asosiasi Program Studi Pendidikan IPS Indonesia, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, IKA PIPS UPI, Pergunu Kota Bandung, dan Forum Alumni BEM Indonesia.

BIODATA PENULIS



Sari Sri Handani, S.Pd., M.Pd

Dosen di Universitas Bale Bandung pada Program Studi
Pendidikan IPS

Seorang akademisi yang berdedikasi dalam bidang pendidikan dan kini mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Bale Bandung pada Program Studi Pendidikan IPS. Selain itu, ia juga berperan sebagai Tutor pada Tutorial Online Universitas Terbuka. Perjalanan akademiknya dimulai sejak usia dini di TK Al Inayah Sumedang, kemudian berlanjut ke SDN Cikondang 1 Sumedang, SMPN 3 Sumedang, dan SMAN 2 Sumedang. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan membawanya untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dengan meraih gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dan Magister Pendidikan IPS. Pada tahun 2022, kembali melanjutkan pendidikannya di jenjang Doktoral (S3) Pendidikan IPS di UPI, memperdalam kajian akademiknya dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

sari.sri.handani@gmail.com

BIODATA PENULIS



Yunita Haryani, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bale Bandung

Yunita Haryani lahir di Jakarta, pada tahun 1984. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2010. Saat ini menjadi dosen di FKIP Universitas Bale Bandung. Selain itu, Penulis juga aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Karya tulisnya telah diterbitkan dalam berbagai jurnal baik Nasional maupun Nasional terakreditasi serta book chapter. Yunita Haryani dapat dihubungi melalui e-mail : yunitaharyani88@gmail.com || IG: @unitaharyani

BIODATA PENULIS



Yeni Handayani, S.E., M.Pd
Dosen di Universitas Indraprasta PGRI

Yeni Handayani, S.E., M.Pd. lahir di Jakarta pada 20 April 1979. Penulis merupakan dosen di Universitas Indraprasta PGRI dan saat ini sedang menempuh Program Doktor (S3) Manajemen Pendidikan di Universitas Pakuan. Pendidikan Magister (M.Pd.) diselesaikan di Universitas Indraprasta PGRI, sedangkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) diperoleh dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Bidang yang menjadi fokus penulis meliputi pendidikan, ilmu sosial, manajemen pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain aktif mengajar, penulis juga melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta menulis buku dan artikel ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui email: yenihandayani04@gmail.com

BIODATA PENULIS



Liza Dwi Eftiza Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.

Tutor Universitas Terbuka Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulis lahir di Banjarmasin pada 26 September 1996 dan saat ini berdomisili di Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 2019. S2 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan S3 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Penulis adalah Tutor Tutorial Online, mengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Universitas Terbuka, Indonesia. Penulis memiliki beberapa karya buku "Mendokntruksi Fenomena *Cancel Culture*" serta buku bunga rampai "Catatan tentang 2023", "Konsep Dasar Pendidikan", "Sosiologi" dan "Pemanfaatan Media Digital dalam Pembelajaran".

BIODATA PENULIS



Hulipa, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Jurusan Tarbiyah STAI Al-Gazali Soppeng

Penulis lahir di Palanro tanggal 25 Maret 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Soppeng. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan IPS ke SD-an di Universitas Negeri Makassar. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Noor Fahmi Pramuji, S.IP., M.A.

Dosen Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun

Penulis lahir di Makassar tanggal 8 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hubungan Internasional di Republik Turkiye. Penulis aktif menulis terkait diplomasi kebudayaan, isu-isu global hubungan internasional, geopolitik, kebudayaan kontemporer, dan kepariwisataan. Selain itu, juga terlibat aktif dalam aktivitas pendampingan pengembangan prestasi mahasiswa hingga ke tingkat nasional.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
noorfahmi@unkhair.ac.id

BIODATA PENULIS



Barni, S.Pd., M.A.

Dosen Program Studi Kesehatan Lingkungan
Politeknik Banjarnegara

Penulis lahir di Banjarnegara Jawa Tengah tanggal 23 April 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kesehatan Lingkungan, Politeknik Banjarnegara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret dan melanjutkan S2 pada Program Studi Antropologi Universitas Gadjah Mada. Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen 18 tahun dan mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang diampu adalah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Penulis tertarik melakukan riset dan menghasilkan beberapa artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Saat ini di lingkungan kampus berperan sebagai ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sejak tahun 2023-2029. Aktif dalam kegiatan pendampingan di masyarakat, membina UMKM dan KWT. Moto penulis adalah “jadikan sabar dan syukur sahabat setiap perjuangan dan pencapaian”.

BIODATA PENULIS



Anastazia Niatry Wattimena, S.I.P., M.H.I.

Dosen Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun

Penulis lahir di Ambon, pada tanggal 6 Mei 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun Maluku Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email tasya@unkhair.ac.id

BIODATA PENULIS



Hermawan Setiawan, S.Pd., M.Si., M.Ars

Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Saya adalah seorang peneliti dan dosen di Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki kepakaran di Bidang Sistem Informasi Geografis (SIG). Saya menyelesaikan S1 di Pendidikan Geografi UPI Bandung tahun 2016, kemudian S2 di jurusan Geografi Universitas Indonesia tahun 2024, dan S2 Arsitektur di Universitas Mercu Buana tahun 2026. Mempunya pengalaman menjadi kepala sekolah SMA Daarul Qur'an dan Guru Penggerak Banten. Selain itu, menerima beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Guru Universitas Mercubuana. Saat ini saya aktif aktif mempublikasikan riset spasial dan kebencanaan baik rural dan urban. Jika anda ingin berkolaborasi dengan saya bisa kontak instagram saya di @mawanahmad6